



diskominfo
natuna

LAPORAN TAHUNAN

**DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA
KABUPATEN
NATUNA**

TAHUN 2023





**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN NATUNA**

KATA PENGANTAR

Laporan Tahunan ini merupakan rekaman proses pelaksanaan pembangunan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna yang telah diprogramkan sejak awal Januari sampai akhir Desember 2023. Proses tersebut dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, capaian hingga evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan maupun kegiatan rutinitas.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna berupaya mengoptimalkan kemampuannya untuk melakukan hal yang terbaik. Mulai dari pengelolaan sumber daya manusia, tata kelola organisasi, penyelenggaraan kegiatan pelayanan kepada masyarakat sampai dengan kerjasama dengan stakeholder lainnya. Walaupun dalam realisasinya mengalami rintangan dan hambatan, akan tetapi kendala tersebut dapat diatasi dengan adanya kerjasama yang baik dan kekompakan dari seluruh jajaran pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna. Terima kasih diucapkan kepada semua pihak yang telah membantu Dinas Komunikasi dan Informatika dalam menyelesaikan beberapa pekerjaan yang menjadi tugas pokok dan fungsinya.

Akhirnya dengan segala keterbatasan yang dimiliki, Kami berharap bahwa penyusunan Laporan Tahunan Tahun 2023 dapat berguna bagi proses evaluasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna serta pihak-pihak terkait dalam membina hubungan kerjasama.

Ranai, 28 Maret 2024



 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

DAFTAR ISI

Table of Contents

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR TABEL.....	iv
Daftar GAMBAR	vi
PENDAHULUAN.....	1
A. SEJARAH BERDIRINYA PERANGKAT DAERAH	1
BAB II GAMBARAN	3
UMUM	3
A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI	3
B. STRUKTUR ORGANISASI	21
C. SUMBER DAYA MANUSIA	22
D. SARANA PRASARANA PENUNJANG KEGIATAN RUTINITAS.....	28
BAB III VISI, MISI TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN.....	29
A. VISI MISI RPJMD 2022-2026.....	29
B. PROGRAM PEMERINTAH DAERAH PENDUKUNG VISI MISI YANG TERTUANG DALAM RPJMD 2022-2026.....	31
C. PROGRAM PERANGKAT DAERAH TERTUANG DALAM RPJMD 2022-2026.	32
D. TUJUAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN PRIORITAS (RENSTRA 2022- 2026) 32	
BAB IV HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN	57
A. PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN TAHUN 2023.....	57
B. HASIL CAPAIAN PROGRAM RPJMD 2021-2025 TAHUN 2022 - 2026.....	110
C. HASIL CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2022 - 2026.....	111
D. PELAKSANA PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023	111
E. PELAKSANAAN KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA	111
F. PELAKSANAAN INOVASI PERANGKAT DAERAH.....	112
G. REKOMENDASI RENCANA PEMBANGUNAN TAHUN 2023.....	114
BAB V Hasil Pelaksanaan Kegiatan RUTINITAS SKPD BERDASARKAN TUPOKSI	127
A. SEKRETARIAT	127
B. BIDANG PENYELENGGARAAN E-GOVERNMENT	129
C. BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK.....	165

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Jabatan.....	23
Tabel 2.2	Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan	24
Tabel 2.3	Kondisi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berdasarkan Golongan Ruang dan Jenis Kelamin.....	26
Tabel 2.4	Kondisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin	27
Tabel 2.5	Hasil Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tahun 2023.....	28
Tabel 2.6	Data Kualitas Layanan BTS/OPSEL Menurut Kecamatan di Kabupaten Natuna.....	130
Tabel 2.7	Desa dan Kelurahan yang dapat Mengakses Internet	133
Tabel 3.1	Program Pembangunan Daerah yang Disertai Pagu Indikatif Kab. Natuna Tahun 2021-2026 Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika.....	34
Tabel 3.2	Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaannya Kabupaten Natuna Tahun 2022-2026 Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika.....	36
Tabel 3.3	Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Dan Pendanaan Indikatif Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Natunatahun 2022 - 2026.....	39
Tabel 4.1	Data OPD yang Tersedia Layanan Akses Internet/Masuk dalam Jaringan Intra Pemerintah Kabupaten Natuna, serta OPD yang Mengelola Domain dan Sub Domain Tahun 2023.....	71
Tabel 4.2	Daftar Website Opd	73
Tabel 4.3	Daftar Sub Domain Yang Terdaftar	77
Tabel 4.4	Daftar Aplikasi Layanan Publik Tahun 2023.....	84
Tabel 4.5	Daftar Sistem Elektronik Tahun 2023.....	91
Tabel 4.6	Laporan Pelaksanaan Program/Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2017 – 2021.....	115
Tabel 4.7	Hasil Capaian Program Rpjmd 2016 – 2021 Melalui Pelaksanaan	

	Rkpd Tahun 2017 – 2021.....	119
Tabel 4.8	Hasil Capaian Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Tahun 2017 – 2021.....	120
Tabel 4.9	Pelaksana Program/Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2023.....	121
Tabel 4.10	Rekomendasi Kegiatan Pembangunan Tahun 2021/2022 Dari Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Tahun 2020.....	126
Tabel 5.1	Surat Masuk/ Surat Keluar.....	128
Tabel 5.2	SK Masuk/ SK Keluar.....	128
Tabel 5.3	Daftar Pegawai Negeri Sipil Yang Naik Pangkat Golongan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023.....	129
Tabel 5.4	Rekapan Jumlah Menara OPSEL/BTS Menurut Kecamatan di.....	129
Tabel 5.5	Indikator, Tolok Ukur dan Target Kinerja Kegiatan Penyelenggaraan Persandian Tahun Anggaran 2023.....	140
Tabel 5.6	Data Opd Yang Menerapkan Sertifikat Elektronik Untuk Tanda Tangan Elektronik.....	140
Tabel 5.7	Data Akses Internet Kelurahan/Desa, Puskesmas, Sekolah Dan Ruang Publik/Perkantoran.....	143
Tabel 5.8	Rekapitulasi Bantuan Akses Internet Per Kecamatan.....	164
Tabel 5.9	Perbandingan Kunjungan Website Yang Dikelola Dinas Komunikasi Dan Informatika Tahun 2018/2023.....	168
Tabel 5.10	Jumlah Data SP4N Lapor dari 01 Januari s/d 31 Desember 2023.....	169

Daftar GAMBAR

Gambar 2.1	Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna Tahun 2023.....	21
Gambar 2.2	Grafik Pegawai Berdasarkan Pendidikan	25
Gambar 2.3	Grafik Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin	27
Gambar 4.1	Dokumentasi acara Ngobrol Bareng Kominfo.....	113
Gambar 4.2	Leaflet Ngobrol bareng Kominfo	113
Gambar 4.3	Leaflet Kopi Pagi	113
Gambar 5.1	Jumlah Kunjungan Website Dinas Komunikasi Dan Informatika Tahun 2023.....	166
Gambar 5.2	Jumlah Kunjungan Website Pemerintah Kabupaten Natuna Tahun 2023.....	167

PENDAHULUAN

A. SEJARAH BERDIRINYA PERANGKAT DAERAH

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang telah dilakukan perubahan terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 16 Tahun 2021. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna merupakan Dinas Type C yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang statistik dan bidang persandian yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Adapun tugas pokok, fungsi dan uraian tugas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna tertuang dalam Peraturan Bupati Natuna Nomor 64 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemerintah Kabupaten Natuna yang terakhir dilakukan perubahan pada Peraturan bupati Natuna Nomor 2 Tahun 2022.

Urusan komunikasi dan Informatika merupakan urusan pemerintah wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana tertera dalam pasal 15 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Pembentukan Dinas Komunikasi dan Informatika juga berpedoman kepada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika. Sekalipun secara Nomenklatur, pembentukan Dinas Komunikasi dan Informatika berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2016 ini merupakan dinas baru, namun demikian secara operasional sebenarnya urusan pemerintahan yang terkait dengan komunikasi dan informatika sudah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Natuna dengan nama dan level kelembagaan yang berbeda.

Sebelum tahun 2017, penyelenggaraan urusan komunikasi dan informatika terutama yang berkaitan dengan Teknologi Informasi dan Komunikasi ditangani oleh salah satu bidang di Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika. Penyelenggaraan urusan

persandian ditangani oleh sub bagian pada bagian Hubungan Masyarakat (Humas) Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna, sedangkan urusan statistik daerah ditangani oleh salah satu bidang di Barenlitbangda.

GAMBARAN UMUM

A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Adapun tugas pokok, fungsi dan uraian tugas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna berdasarkan Peraturan Bupati Natuna Nomor 2 Tahun 2022 yang kemudian dilakukan perubahan yaitu Peraturan Bupati Natuna Nomor 62 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemerintah Kabupaten Natuna sesuai susunan organisasi dan rincian tugas dan fungsi setiap jabatan adalah:

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan, merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis di bidang komunikasi dan informatika sesuai dengan kewenangannya.

➤ ***Uraian Tugas***

- 1) Merumuskan dan menetapkan kebijakan perencanaan pembangunan lima tahun dan tahunan sesuai dengan kewenangan lingkup tugasnya;
- 2) Merumuskan kebijakan teknis penyelenggaraan di bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik, dan penyelenggaraan e-Government, Persandian dan Statistik;
- 3) Mengkoordinasikan penyelenggaraan kebijakan dan pelaksanaan kewenangan di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik;
- 4) Menetapkan kerja sama lintas OPD, lintas Pemerintah Daerah dan lintas Pemerintah Pusat serta non pemerintah;
- 5) Menetapkan norma, standar, prosedur dan kriteria atas penyelenggaraan di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik;
- 6) Menetapkan operasional administrasi umum, keuangan, kepegawaian, tata usaha, dan aset/barang persediaan di lingkungan dinas;

- 7) Menetapkan operasional pengelolaan informasi dan komunikasi publik, penyelenggaraan e-Government, persandian dan statistik;
- 8) Menetapkan rekomendasi/perizinan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- 9) Membina Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan dinas dengan memfasilitasi peningkatan kinerja sesuai dengan fungsi dan tugasnya;
- 10) Pengendalian dan mengevaluasi penyelenggaraan di bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik, dan penyelenggaraan e-government dan tugas lainnya di lingkungan dinas;
- 11) Menilai hasil kerja pegawai di lingkungan dinas;
- 12) Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan dinas dan tugas-tugas lainnya yang diberikan atasan secara berkala sebagai akuntabilitas Dinas Komunikasi dan Informatika.

➤ **Fungsi**

- 1) Merumuskan dan/atau menetapkan regulasi dan kebijakan teknis di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik;
- 2) Mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan tugas dan program di lingkungan dinas;
- 3) Melaksanakan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik, urusan administrasi umum, perencanaan, keuangan dan kepegawaian serta urusan lainnya di lingkungan dinas;
- 4) Pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik, administrasi umum, perencanaan, keuangan dan kepegawaian serta urusan lainnya di lingkungan dinas;
- 5) Mengevaluasi penyelenggaraan kinerja pelayanan di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian, dan bidang statistik serta tugas lainnya di lingkungan dinas;
- 6) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas pokok menyusun, merencanakan, mengkoordinasikan, dan mengevaluasi kebijakan urusan perencanaan, pelaporan, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan, urusan rumah tangga, kehumasan dan keprotokolan, serta mengkoordinasikan tugas Kepala Dinas.

➤ **Uraian Tugas**

- 1) Menyusun rencana kerja lima tahun dan tahunan Dinas;
- 2) Menyusun rencana kerja lima tahun dan tahunan di lingkup Sekretariat;
- 3) Menyusun pengelolaan dan pelaksanaan administrasi surat menyurat, kearsipan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan, inventarisasi, dan rumah tangga;
- 4) Menyusun pelaksanaan pembinaan organisasi dan tata usaha;
- 5) Menyusun pelaporan dinas;
- 6) Mengkoordinasikan penyusunan perencanaan, penyusunan pelaporan dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu;
- 7) Mengkoordinasikan penyiapan data dalam rangka penyusunan perencanaan dan pelaporan Dinas;
- 8) Mengevaluasi rencana kerja sekretariat dan kinerja dinas;
- 9) Mengevaluasi dan membina kinerja pegawai di lingkup Sekretariat;
- 10) Menyiapkan dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan;
- 11) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.

➤ **Fungsi**

- 1) Penyusunan kebijakan teknis di bidang urusan sekretariat;
- 2) Penyelenggaraan urusan perencanaan, pelaporan, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan, urusan rumah tangga, kehumasan dan keprotokolan;
- 3) Pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas perencanaan, pelaporan, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan, urusan rumah tangga, kehumasan dan keprotokolan;
- 4) Pelaksanaan pengendalian, pemantauan dan evaluasi kegiatan perencanaan, pelaporan, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan,

kearsipan, perlengkapan, urusan rumah tangga, kehumasan dan keprotokolan;

- 5) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

2.1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menjalankan tugas pokok menyiapkan bahan, melaksanakan dan mengoreksi pelaksanaan urusan administrasi perkantoran, tata laksana organisasi, kelengkapan rumah tangga, urusan kepegawaian, arsip, dokumentasi dan hubungan masyarakat berpedoman kepada Kebijakan Umum dan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika.

Uraian Tugas :

- 1) Menyiapkan rencana kerja lima tahun dan tahunan di lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- 2) Menyiapkan urusan umum, kepegawaian dan tata usaha;
- 3) Meyiapkan pembinaan dan pelatihan SDM pegawai di lingkup Dinas;
- 4) Menyiapkan data LPPD, LKPJ, LAKIP dan segala bentuk pelaporan lainnya, di lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- 5) Menyiapkan Laporan Tahunan Dinas;
- 6) Menyiapkan Profil Dinas;
- 7) Menyiapkan dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan;
- 8) Membuat konsep surat dan dokumen lain-lainnya yang menjadi tugas dan tanggung jawab Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- 9) Melaksanakan operasional administrasi tata usaha, kepegawaian dan urusan umum Dinas;
- 10) Melaksanakan operasional penyusunan data penyusunan laporan tahunan dan profil Dinas;
- 11) Mengoreksi dan menilai hasil kerja pegawai di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- 12) Membina pegawai di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- 13) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan lingkup tugasnya.

2.2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan menjalankan tugas pokok Menyiapkan bahan, melaksanakan dan mengoreksi pelaksanaan kegiatan perencanaan dan tata kelola keuangan dinas.

➤ **Uraian Tugas**

- 1) Menyiapkan rencana kerja lima tahun dan tahunan di lingkup Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- 2) Menyiapkan Renstra dan Rencana Kerja Tahunan Dinas;
- 3) Menyiapkan rekapitulasi LRFK Dinas;
- 4) Menyiapkan LKjIP Dinas;
- 5) Menyiapkan data LPPD, LKPJ, LKjIP dan segala bentuk pelaporan lainnya, di lingkup Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- 6) Menyiapkan dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan;
- 7) Membuat konsep surat dan dokumen lain-lainnya yang menjadi tugas dan tanggungjawab Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- 8) Melaksanakan operasional penyiapan data perencanaan dan data LPPD, LKPJ, LKjIP di lingkup Dinas;
- 9) Menyiapkan administrasi keuangan, aset dan barang persediaan dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 10) Menyiapkan laporan keuangan Dinas;
- 11) Menyiapkan laporan aset dan barang persediaan Dinas;
- 12) Melaksanakan operasional penggunaan aset dan barang persediaan Dinas;
- 13) Melaksanakan operasional administrasi pengelolaan keuangan dan akuntansi keuangan dilingkup Dinas sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- 14) Mengoreksi dan menilai hasil kerja pegawai di Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- 15) Membina pegawai di Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- 16) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan lingkup tugasnya.

3. Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan informasi dan komunikasi publik serta kehumasan Pemerintah Daerah.

➤ **Uraian tugas:**

- 1) Merencanakan operasional kerja lima tahun dan tahunan di lingkup Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;
- 2) Merencanakan operasional kerja sama lintas OPD, lintas Pemerintah Daerah dan lintas Pemerintah Pusat serta non pemerintah di bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik;
- 3) Menyusun regulasi, kebijakan teknis dan operasional penyelenggaraan pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup Pemerintah Daerah, monitoring informasi dan penetapan agenda prioritas komunikasi Pemerintah Daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan masyarakat dan media, kemitraan dengan pemangku kepentingan, manajemen komunikasi krisis, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik, dukungan administratif, keuangan dan tata kelola komisi informasi di Daerah;
- 4) Mengkoordinasikan penyelenggaraan operasional penyelenggaraan pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup Pemerintah Daerah, monitoring informasi dan penetapan agenda prioritas komunikasi Pemerintah Daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan masyarakat dan media, kemitraan dengan pemangku kepentingan, manajemen komunikasi krisis, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik, dukungan administratif, keuangan dan tata kelola komisi informasi di Daerah;
- 5) Menyusun operasional penyelenggaraan pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup Pemerintah Daerah, monitoring informasi dan penetapan agenda prioritas komunikasi Pemerintah Daerah, pengelolaan informasi

untuk mendukung kebijakan nasional dan daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan masyarakat dan media, kemitraan dengan pemangku kepentingan, manajemen komunikasi krisis, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik, dukungan administratif, keuangan dan tata kelola komisi informasi di Daerah;

- 6) Menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria atas penyelenggaraan pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup Pemerintah Daerah, monitoring informasi dan penetapan agenda prioritas komunikasi Pemerintah Daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan masyarakat dan media, kemitraan dengan pemangku kepentingan, manajemen komunikasi krisis, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik, dukungan administratif, keuangan dan tata kelola komisi informasi di Daerah;
- 7) Menyusun rekomendasi dan/atau perizinan atas penyelenggaraan bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;
- 8) Melaksanakan pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi atas penyelenggaraan bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik;
- 9) Pengendalian, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kinerja di Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;
- 10) Memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat baik secara tatap muka maupun melalui media informasi dan komunikasi;
- 11) Menyusun laporan dan melaporkan pelaksanaan tugas di Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik kepada atasan; dan
- 12) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.

➔ **Fungsi**

- 1) Merencanakan perumusan regulasi dan kebijakan teknis di bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik;
- 2) Menyusun operasional, norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup Pemerintah Daerah, monitoring informasi dan penetapan agenda

prioritas komunikasi Pemerintah Daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan masyarakat dan media, kemitraan dengan pemangku kepentingan, manajemen komunikasi krisis, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik, dukungan administratif, keuangan dan tata kelola komisi informasi di Daerah;

- 3) Menyusun bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penyelenggaraan pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup Pemerintah Daerah, monitoring informasi dan penetapan agenda prioritas komunikasi Pemerintah Daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan masyarakat dan media, kemitraan dengan pemangku kepentingan, manajemen komunikasi krisis, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik, dukungan administratif, keuangan dan tata kelola komisi informasi di Daerah;
- 4) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;
- 5) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

3.1. Sub Koordinator Pengelolaan Aspirasi dan Produksi Informasi

Sub Koordinator Pengelolaan Aspirasi dan Produksi Informasi mempunyai tugas pokok Menyiapkan bahan, melaksanakan dan mengoreksi pelaksanaan urusan menyelenggarakan pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah serta pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah.

➤ **Uraian tugas :**

- 1) Menyiapkan bahan, konsep dan pelaksanaan penyusunan rencana kerja lima tahun dan tahunan di Sub Koordinator Pengelolaan Aspirasi dan Produksi Informasi;
- 2) Menyiapkan bahan, konsep dan pelaksanaan penyusunan regulasi, kebijakan teknis dan operasional pengelolaan opini dan aspirasi publik di

- lingkup pemerintah daerah serta pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan Pemerintah Daerah;
- 3) Menyiapkan bahan, konsep dan pelaksanaan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah serta pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan Pemerintah Daerah;
 - 4) Menyiapkan bahan, konsep dan pelaksanaan kerja sama lintas OPD, lintas Pemerintah Daerah dan lintas Pemerintah Pusat serta non pemerintah atas penyelenggaraan pengelolaan aspirasi dan produksi informasi;
 - 5) Melaksanakan pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi atas penyelenggaraan pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah serta pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan Pemerintah Daerah;
 - 6) Melaksanakan pengemasan ulang konten nasional menjadi konten lokal;
 - 7) Melaksanakan pembuatan konten lokal;
 - 8) Melaksanakan layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat;
 - 9) Mengelola sistem pengaduan pelayanan publik;
 - 10) Melaksanakan standarisasi pertukaran untuk data base informasi lintas sektoral;
 - 11) Melaksanakan pemantauan tema komunikasi publik lintas sektoral lingkup nasional dan Pemerintah Daerah;
 - 12) Melaksanakan pengolahan dan analisis data informasi untuk mendukung komunikasi publik lintas sektoral lingkup nasional dan kabupaten;
 - 13) Menyiapkan bahan dan konsep rekomendasi/perizinan atas penyelenggaraan pengelolaan aspirasi dan produksi informasi;
 - 14) Monitoring dan evaluasi atas rencana kerja, regulasi, kebijakan, operasional, kajian, rekomendasi, perizinan dan kinerja di lingkup Sub Koordinator Pengelolaan Aspirasi dan Produksi Informasi;;
 - 15) Menyusun laporan pelaksanaan tugas di Sub Koordinator Pengelolaan Aspirasi dan Produksi Informasi;;
 - 16) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang.

3.2. Sub Koordinator Pengelolaan Saluran Komunikasi Publik dan Kehumasan

Sub Koordinator Pengelolaan Saluran Komunikasi Publik dan Kehumasan mempunyai tugas melaksanakan urusan pengelolaan saluran komunikasi publik dengan cara monitoring informasi dan penetapan agenda prioritas komunikasi Pemerintah Daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan masyarakat dan media, manajemen komunikasi krisis dan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik.

➤ **Uraian tugas:**

- 1) Menyiapkan rencana kerja lima tahun dan tahunan di lingkup Sub Koordinator Pengelolaan Saluran Komunikasi Publik dan Kehumasan;
- 2) Menyiapkan bahan, konsep dan pelaksanaan penyusunan regulasi, kebijakan teknis dan operasional atas penyelenggaraan monitoring informasi dan penetapan agenda prioritas komunikasi Pemerintah Daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan masyarakat dan media, manajemen komunikasi krisis, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan kehumasan;
- 3) Menyiapkan bahan, konsep dan pelaksanaan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan penyelenggaraan monitoring informasi dan penetapan agenda prioritas komunikasi Pemerintah Daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan masyarakat dan media, manajemen komunikasi krisis, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan kehumasan;
- 4) Menyiapkan bahan, konsep dan pelaksanaan kerja sama lintas OPD, lintas Pemerintah Daerah dan lintas Pemerintah Pusat serta non pemerintah atas urusan pengelolaan saluran komunikasi publik dan kehumasan;
- 5) Melaksanakan pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi atas penyelenggaraan monitoring informasi dan penetapan agenda prioritas komunikasi Pemerintah Daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan

- pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan masyarakat dan media, manajemen komunikasi krisis, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan kehumasan;
- 6) Melaksanakan layanan perencanaan komunikasi publik dan citra positif pemerintah daerah;
 - 7) Melaksanakan pemantauan tema komunikasi publik lintas sektoral lingkup nasional dan pemerintah daerah;
 - 8) Melaksanakan pengolahan dan analisis data informasi untuk mendukung komunikasi publik lintas sektoral lingkup nasional dan pemerintah daerah;
 - 9) Melaksanakan saluran komunikasi milik pemerintah daerah/media internal;
 - 10) Melaksanakan diseminasi informasi kebijakan melalui media pemerintah daerah dan non pemerintah daerah;
 - 11) Melaksanakan pemberdayaan dan penyediaan akses informasi bagi media dan lembaga komunikasi publik;
 - 12) Menyiapkan bahan dan konsep rekomendasi/perizinan atas penyelenggaraan penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, serta penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di Daerah;
 - 13) Menyiapkan dan memfasilitasi pengaturan jumpa pers secara berkala;
 - 14) Membina hubungan yang serasi dengan pers dan TV lokal;
 - 15) Menyiapkan menyusun data atau bahan, menganalisa dan melakukan evaluasi dalam rangka pemberitaan dan tanggapan terhadap media massa;
 - 16) Melaksanakan pengelolaan hubungan dengan media (media relations);
 - 17) Monitoring dan evaluasi atas rencana kerja, regulasi, kebijakan, operasional, kajian, rekomendasi, perizinan dan kinerja di lingkup Sub Koordinator Pengelolaan Saluran Komunikasi Publik dan Kehumasan;
 - 18) Menyiapkan serta menyusun laporan pelaksanaan tugas di Sub Koordinator Pengelolaan Saluran Komunikasi Publik dan Kehumasan; dan
 - 19) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang.

3.3. Sub Koordinator Pengembangan Kemitraan dan Layanan Informasi Publik

Sub Koordinator Pengembangan Kemitraan dan Layanan Informasi Publik mempunyai tugas menyiapkan bahan, melaksanakan dan mengoreksi pelaksanaan urusan kemitraan dengan pemangku kepentingan pelayanan informasi publik.

➤ **Uraian tugas:**

- 1) Menyiapkan bahan rencana kerja lima tahun dan tahunan di lingkup Sub Koordinator Pengembangan Kemitraan dan Layanan Informasi Publik;
- 2) Menyiapkan bahan, konsep dan pelaksanaan penyusunan regulasi, kebijakan teknis dan operasional atas penyelenggaraan kemitraan dengan pemangku kepentingan dan pelayanan informasi publik; Menyiapkan bahan, konsep dan pelaksanaan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan pelayanan informasi publik dan layanan hubungan media di daerah;
- 3) Menyiapkan bahan, konsep dan pelaksanaan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan kemitraan dengan pemangku kepentingan dan pelayanan informasi publik;
- 4) Menyiapkan bahan, konsep dan pelaksanaan kerjasama lintas Perangkat Daerah, lintas Pemerintah Daerah dan lintas Pemerintah Pusat serta non pemerintah untuk urusan pengembangan kemitraan dan layanan informasi publik;
- 5) Melaksanakan pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi atas penyelenggaraan kemitraan dengan pemangku kepentingan dan pelayanan informasi publik;
- 6) Melaksanakan pengolahan informasi publik untuk implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 7) Melaksanakan pelayanan informasi publik untuk implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 8) Melaksanakan kemitraan dengan pemangku kepentingan;
- 9) Melaksanakan fungsi Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);
- 10) Melaksanakan dukungan administratif, keuangan, dan tata kelola komisi informasi di Daerah;

- 11) Menyiapkan bahan dan konsep rekomendasi/perizinan atas penyelenggaraan penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, serta penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di daerah;
- 12) Monitoring dan evaluasi atas renja, regulasi, kebijakan, operasional, kajian, rekomendasi, perizinan dan kinerja di lingkup Seksi Pengembangan Kemitraan dan Layanan Informasi Publik;
- 13) Menyusun laporan pelaksanaan tugas di Sub Koordinator Pengembangan Kemitraan dan Layanan Informasi Publik;
- 14) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang.

4. Bidang Penyelenggaraan e-Government

Bidang Penyelenggaraan e-Government mempunyai tugas merencanakan, menyusun dan mengevaluasi penyelenggaraan e-Government.

☞ Uraian tugas:

- 1) Merencanakan operasional kerja lima tahun dan tahunan di lingkup Bidang Penyelenggaran e-Government;
- 2) Merencanakan operasional kerja sama lintas OPD lintas Pemerintah Daerah dan lintas Pemerintah Pusat serta non pemerintah di bidang penyelenggaraan e-Government;
- 3) Menyusun regulasi, kebijakan teknis dan operasional layanan infrastruktur dasar data center, disaster recovery center dan Teknologi Informatika dan Komunikasi, sistem komunikasi intra pemerintah, persandian, keamanan informasi e-Government, manajemen data dan informasi *e-Government*, statistik, pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan pemerintahan, penyelenggaraan ekosistem Teknologi Informatika dan Komunikasi Smart City, penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) pemerintah, pengembangan sumber daya Teknologi Informatika dan Komunikasi pemerintah dan masyarakat, nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan pemerintah;

- 4) Mengkoordinasikan penyelenggaraan operasional bidang penyelenggaraan *e-Government* di lingkup dinas dan lintas OPD, lintas Pemerintah Daerah dan lintas Pemerintah Pusat serta Non Pemerintah;
- 5) Menyusun operasional penyelenggaraan layanan infrastruktur dasar data center, disaster recovery center dan TIK, sistem komunikasi intra pemerintah, persandian, keamanan informasi *e-Government*, manajemen data dan informasi *e-Government*, statistik, pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan pemerintahan, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City, penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) pemerintah, pengembangan sumber daya TIK pemerintah dan masyarakat, nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan pemerintah;
- 6) Menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria atas penyelenggaraan bidang layanan infrastruktur dasar data center, disaster recovery center dan TIK, sistem komunikasi intra pemerintah, persandian, keamanan informasi *e-Government*, manajemen data dan informasi *e-Government*, statistik, pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan pemerintahan, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City, penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) pemerintah, pengembangan sumber daya TIK pemerintah dan masyarakat, nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan pemerintah;
- 7) Menyusun rekomendasi dan/ atau perizinan atas penyelenggaraan *e-Government*;
- 8) Melaksanakan pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi atas penyelenggaraan *e-Government*;
- 9) Pengendalian, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kinerja di Bidang Penyelenggaraan *e-Government*;
- 10) Menilai hasil kerja pegawai di Bidang Penyelenggaraan *e-Government*;
- 11) Menyusun laporan dan melaporkan pelaksanaan tugas di Bidang Penyelenggaraan *e-Government*;

12) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.

➤ **Fungsi**

- 1) Merencanakan perumusan regulasi dan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan e-Government;
- 2) Menyusun pelaksanaan kebijakan di bidang layanan infrastruktur dasar data center, disaster recovery center dan TIK, sistem komunikasi intra pemerintah, persandian, keamanan informasi e-Government, manajemen data dan informasi e-Government, statistik, pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan pemerintahan, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City, penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) pemerintah, pengembangan sumber daya TIK pemerintah dan masyarakat, nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan pemerintah;
- 3) Menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan kebijakan di bidang layanan infrastruktur dasar data center, disaster recovery center dan TIK, sistem komunikasi intra pemerintah, persandian, keamanan informasi e-Government, manajemen data dan informasi e-Government, statistik, pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan pemerintahan, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City, penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) pemerintah, pengembangan sumber daya TIK pemerintah dan masyarakat, nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan pemerintah;
- 4) Menyusun bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang layanan infrastruktur dasar data center, disaster recovery center dan TIK, sistem komunikasi intra pemerintah, persandian, keamanan informasi e-Government, manajemen data dan informasi e-Government, statistik, pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan pemerintahan, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City, penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) pemerintah,

pengembangan sumber daya TIK pemerintah dan masyarakat, nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan pemerintah;

- 5) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di Bidang Penyelenggaraan e-Government;
- 6) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

4.1. Seksi Infrastruktur, Telekomunikasi dan Persandian

Seksi Infrastruktur, Telekomunikasi dan Persandian mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan, melaksanakan dan mengoreksi pelaksanaan layanan infrastruktur dasar data center, disaster recovery center dan TIK, pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, sistem komunikasi intra pemerintah, keamanan informasi e-Government dan persandian.

➤ **Uraian tugas:**

- 1) Menyiapkan rencana kerja lima tahun dan tahunan di lingkup Seksi Infrastruktur, Telekomunikasi dan Persandian;
- 2) Menyiapkan bahan, konsep dan pelaksanaan penyusunan regulasi, kebijakan teknis dan operasional atas penyelenggaraan layanan infrastruktur dasar data center, disaster recovery center dan TIK, pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, sistem komunikasi intra pemerintah, keamanan informasi e-Government dan persandian;
- 3) Menyiapkan bahan, konsep dan pelaksanaan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan layanan infrastruktur dasar data center, disaster recovery center dan TIK, pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, sistem komunikasi intra pemerintah, keamanan informasi e-Government dan persandian;
- 4) Menyiapkan bahan, konsep dan pelaksanaan kerja sama lintas OPD, lintas Pemerintah Daerah dan lintas Pemerintah Pusat serta non pemerintah atas urusan layanan infrastruktur, telekomunikasi dan persandian;
- 5) Melaksanakan pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi atas layanan infrastruktur dasar data center, disaster recovery center dan TIK,

- pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, sistem komunikasi intra pemerintah, keamanan informasi e-Government dan persandian;
- 6) Melaksanakan pengembangan dan penyelenggaraan Data Center (DC) dan Disaster Recovery Center (DRC), pengembangan dan inovasi TIK dalam implementasi e-Government;
 - 7) Melaksanakan peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan infrastruktur dan Teknologi Informatika;
 - 8) Melaksanakan Government Cloud Computing;
 - 9) Melaksanakan pengelolaan akses internet pemerintah dan publik;
 - 10) Melaksanakan filtering konten negatif;
 - 11) Melaksanakan interkoneksi Jaringan Intra Pemerintah;
 - 12) Melaksanakan penyediaan prasarana dan sarana komunikasi pemerintah;
 - 13) Melaksanakan monitoring trafik elektronik;
 - 14) Melaksanakan internet sehat, kreatif, inovatif dan produktif;
 - 15) Melaksanakan pencatatan/agenda berita-berita/ radiogram baik yang diterima ataupun dikirim dari Pusat atau daerah;
 - 16) Menyusun dan menyimpan data personil, materiil serta inventarisasi data lainnya dari seluruh jaringan Sandi Pemerintah Daerah;
 - 17) Memelihara, menyimpan dan mengamankan dokumen dan alat-alat Sandi serta mengembangkan sistem alat-alat Sandi;
 - 18) Melakukan pengiriman dan penerimaan berita dengan pesawat telek atau mesin Sandi;
 - 19) Melakukan pendataan berita/radiologi yang bersifat rahasia yang dikirim melalui hubungan persandian untuk selanjutnya diserahkan kepada petugas Sandi;
 - 20) Menyiapkan bahan dan konsep rekomendasi/perizinan atas penyelenggaraan layanan infrastruktur, telekomunikasi dan persandian;
 - 21) Pengendalian, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kinerja di Seksi Infrastruktur, Telekomunikasi dan Persandian;
 - 22) Menilai kinerja bawahan di lingkup Seksi Infrastruktur, Telekomunikasi dan Persandian;

- 23) Menyusun laporan pelaksanaan tugas di Seksi Infrastruktur, Telekomunikasi dan Persandian;
- 24) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang.

4.2. Seksi Statistik

Seksi Statistik mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan, melaksanakan dan mengoreksi pelaksanaan penyelenggaraan penelitian, penghimpunan data, manajemen data dan informasi e-Government.

➤ **Uraian tugas:**

- 1) Menyiapkan rencana kerja lima tahun dan tahunan di lingkup Seksi Statistik;
- 2) Menyiapkan bahan, konsep dan pelaksanaan penyusunan regulasi, kebijakan teknis dan operasional atas penyelenggaraan penelitian, penghimpunan data, manajemen data dan informasi e-Government;
- 3) Menyiapkan bahan, konsep dan pelaksanaan kerja sama lintas OPD, lintas Pemerintah Daerah dan lintas Pemerintah Pusat serta non pemerintah atas penyelenggaraan statistik;
- 4) Melaksanakan pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi atas penyelenggaraan penelitian, penghimpunan data, manajemen data dan informasi e-Government;
- 5) Melaksanakan Penelitian dan Pengembangan Data;
- 6) Melaksanakan Walidata dan kebijakan;
- 7) Melaksanakan recovery data dan informasi;
- 8) Melaksanakan pengelolaan data elektronik pemerintahan dan non pemerintahan;
- 9) Melaksanakan pengembangan dan pemeliharaan aplikasi pemerintahan dan layanan publik yang terintegrasi;
- 10) Melaksanakan interoperabilitas, interkoneksi layanan publik dan pemerintahan Layanan Pusat Application Programm Interface (API) daerah;
- 11) Melaksanakan pengembangan Business Process Re-engineering pelayanan di lingkungan pemerintahan dan non pemerintah (Stakeholder Smart City);

- 12) Menyiapkan bahan dan konsep rekomendasi/perizinan atas penyelenggaraan penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, serta penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di daerah;
- 13) Pengendalian, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kinerja di Seksi Statistik;
- 14) Menilai kinerja bawahan di Seksi Statistik;
- 15) Menyusun laporan pelaksanaan tugas di Seksi Statistik; dan
- 16) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang.

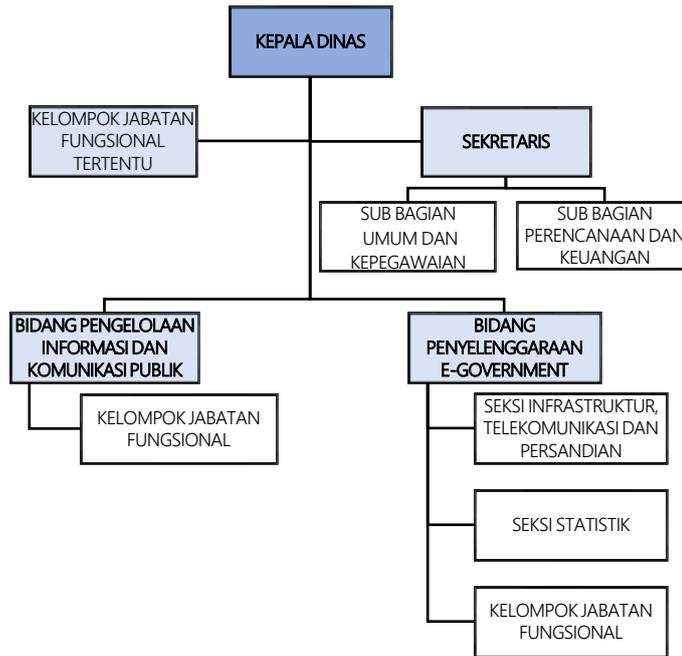
4.4. Jabatan Fungsional

Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan, melaksanakan dan mengoreksi pelaksanaan tugas di bidang komunikasi dan informatika sesuai dengan jabatan fungsional yang diberikan.

B. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna terdiri dari:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
3. Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, membawahi:
 1. Kelompok Jabatan Fungsional
4. Bidang Penyelenggaraan e-Government, membawahi:
 1. Seksi Infrastruktur, Telekomunikasi dan Persandian;
 2. Seksi Statistik;
 3. Kelompok Jabatan Fungsional
5. Kelompok Jabatan Fungsional



Gambar 2. 1
Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Natuna Tahun 2023

C. SUMBER DAYA MANUSIA

Dalam menunjang pelaksanaan kegiatan pada tahun 2023, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna memiliki pegawai sebanyak 50 orang. Dari jumlah pegawai sebanyak 50 orang tersebut, terdiri dari: Plt. Kepala Dinas (Eselon II b) sebanyak 1 orang, Sekretaris (Eselon III a) sebanyak 1 orang, Kepala Bidang (Eselon III b) sebanyak 2 orang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi (Eselon IV a) sebanyak 4 orang, Jabatan Fungsional sebanyak 4 Orang, pelaksana/staf sebanyak 38 orang yang terdiri dari PNS sebanyak 10 orang, PTT sebanyak 13 orang dan Outsourcing sebanyak 15 orang.

Tabel 2.1**Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Jabatan**

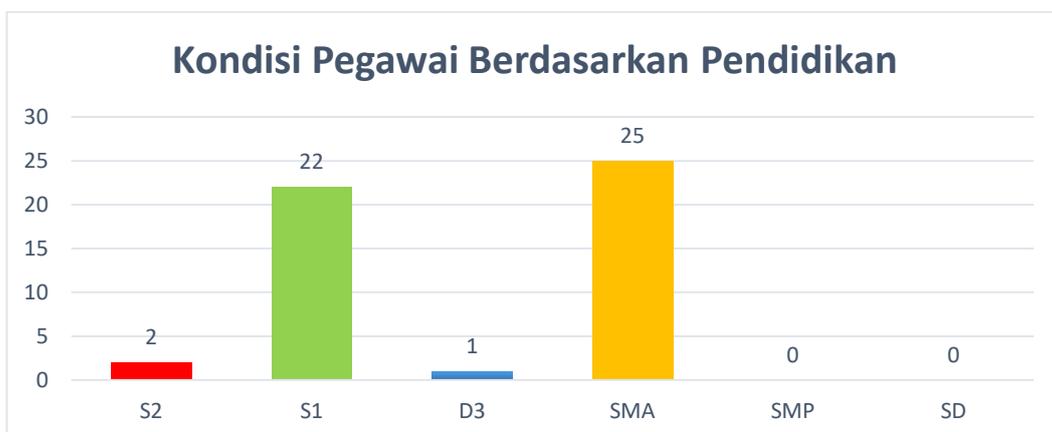
No	Uraian	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Pelaksana	Jumlah
1	Kepala Dinas	-	-	-	-	-
2	Sekretaris	-	1	-	-	1
3	Kepala Bidang	-	2	-	-	2
4	Kepala Sub Bagian/Seksi	-	-	4	-	4
5	Jabatan Fungsional	-	-	-	4	4
6	PPPK	-	-	-	2	2
7	Jabatan Pelaksana	-	-	-	11	11
8	Pegawai Tidak Tetap	-	-	-	12	12
9	Tenaga Kontrak/OS	-	-	-	14	14
JUMLAH 2023		-	3	4	43	50
JUMLAH 2022		1	3	5	41	50
JUMLAH 2021		1	3	8	33	45
JUMLAH 2020		1	3	8	31	43
JUMLAH 2019		1	3	8	29	41

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian (Desember 2023)

Tabel 2.2
Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan

No	Uraian	S2	S1	D3	SM	SM	SD	Jumlah
1	Kepala Dinas	-	-	-	-	-	-	-
2	Sekretaris	-	1	-	-	-	-	1
3	Kepala Bidang	1	1	-	-	-	-	2
4	Kepala Sub bagian/Seksi	-	4	-	-	-	-	4
5.	Fungsional	-	4	-	-	-	-	4
6.	PPPK	-	2	-	-	-	-	2
7	Pelaksana	-	4	1	6	-	-	11
8	PTT	-	2	-	10	-	-	12
9	Tenaga Kontrak/ OS	-	7	-	7	-	-	14
JUMLAH 2023		2	22	1	25	-	-	50
JUMLAH 2022		2	22	1	25	-	-	50
%		4	44	2	50	-	-	100
JUMLAH 2021		2	18	1	24	-	-	45
JUMLAH 2020		2	15	1	25	-	-	43
JUMLAH 2019		3	15	1	22	-	-	41

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian (Desember 2023)



Gambar 2.2

Grafik Pegawai Berdasarkan Pendidikan

Dari seluruh jumlah pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna, sebanyak 2 orang (4%) memiliki pendidikan S2, yang memiliki pendidikan S1 sebanyak 22 orang (44%), yang memiliki pendidikan D3 sebanyak 1 orang (2%), yang memiliki pendidikan SLTA sebanyak 25 orang (50%).

Tabel 2.3
Kondisi Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Berdasarkan Golongan Ruang dan Jenis Kelamin

Gol/ Ruang	Sekretariat		Bidang Pengelolaa n Informasi dan Komunikasi Publik		Bidang Penyelengg araan e- Government		Jumlah		Total
	L	P	L	P	L	P	L	P	
I/a	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I/b	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I/c	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I/d	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II/a	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II/b	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II/c	-	-	-	-	-	1	1	-	1
II/d	-	-	-	1	-	-	-	-	1
IX	-	-	2	-	-	-	2	-	2
III/a	2	1	1	-	2	1	5	2	7
III/b	1	-	1	-	-	-	2	1	2
III/c	-	2	-	-	1	-	1	2	3
III/d	-	-	2	-	2	1	4	1	5
IV/a	-	-	1	-	1	-	2	-	2
IV/b	-	1	-	-	-	-	-	1	1
IV/c	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV/d	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV/e	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2023	3	3	7	1	6	3	17	7	24
2022	2	5	5	0	7	3	14	8	22
2021	5	4	4	2	4	2	13	8	21
2020	5	4	4	2	4	2	13	8	21
2019	4	5	4	2	5	1	13	8	21

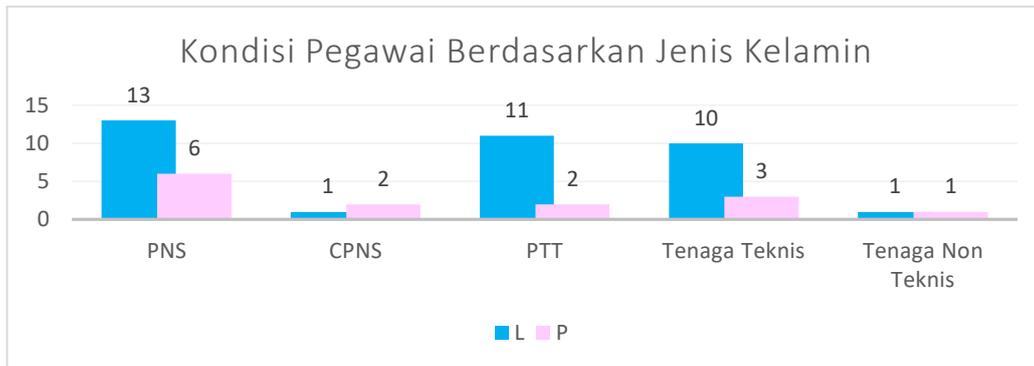
Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian (Desember 2023)

Tabel 2.4

Kondisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Pegawai	Sekretariat		E-Government		PIKP		JUMLAH		Total
	L	P	L	P	L	P	L	P	
PNS	3	4	6	3	6	0	15	7	22
PPPK	0	0	0	0	2	0	1	0	2
PTT	4	1	3	1	3	0	10	2	12
Tenaga Teknis	2	0	2	1	6	2	10	3	13
Tenaga Non Teknis	1	1	0	0	0	0	1	1	2
2022	10	7	12	5	14	2	36	14	50
2021	11	7	9	5	8	5	28	17	45
2020	11	7	8	5	7	5	26	17	43
2019	13	8	9	3	10	4	32	15	41

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian (Desember 2023)



Gambar 2.3
Grafik Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

D. SARANA PRASARANA PENUNJANG KEGIATAN RUTINITAS

Beberapa Pelaksanaan pengadaan barang Dinas komunikasi dan informatika telah terlaksana di tahun 2023, namun disebabkan terjadinya musibah kebakaran di kantor Dinas Komunikasi dan Informatika maka ada beberapa barang terbakar dan terselamatkan dikarenakan barang pesanan belum sampai ke dinas namun pencatatan keuangannya telah dilaksanakan,

Adapun rincian hasil pengadaan 2023 adalah sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 2.5
Hasil Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tahun 2023

No	Nama Barang	Jumlah			
		Banyaknya Barang	Harga Satuan	Jumlah Harga	
1	2	3	4	5	
1	Printer HP LaserJet Pro P1102	1	Unit	2.500.00	39.435.000
JUMLAH					39.435.000

VISI, MISI TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN

A. VISI MISI RPJMD 2022-2026

Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Natuna periode 2022-2026 adalah: **“Terwujudnya Kabupaten Natuna sebagai Kabupaten Maritim yang Unggul, Eksotis, Aman, dengan Kemandirian Ekonomi Berlandaskan Nilai Religius dan Kultural”**

Makna dari visi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Natuna tahun 2021-2026:

➔ Maritim yang Unggul

Maritim yang unggul memiliki makna bahwa Kabupaten Natuna harus diwujudkan sebagai poros aktivitas kemaritiman di Indonesia. Maritim sendiri adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan aktivitas kelautan. Sedangkan unggul dapat dimaknao sebagai keinginan untuk menjadikan Kabupaten Natuna memiliki keunggulan dari potensi maritim dan Sumber Daya Manusia yang memiliki kualitas terbaik

➔ Eksotis

Eksotis dapat dipahami sebagai unsur yang dekat dengan keindahan yang memanjakan mata. Potensi Maritim di Kabupaten Natuna bukan hanya memiliki sumber daya yang melimpah di dalam lautnya, namun juga keunikan dan keindahan yang menyertainya. Potensi tersebut dapat dikembangkan menjadi sebuah nilai jual Kabupaten Natuna sebagai garis pulau terluar di wilayah Indonesia dengan keindahan alamnya sebagai potensi pariwisata

➔ Aman

Aman dapat diartikan sebagai bebas dari ancaman yang mengganggu aktivitas perekonomian di wilayah Kabupaten Natuna. Wilayah perbatasan merupakan wilayah yang rawan dan Pemerintahan Kabupaten Natuna harus menjamin keamanan bagi seluruh kapal yang berlayar di perairan wilayah Indonesia.

➤ Kemandirian Ekonomi

Kemandirian Ekonomi dapat diartikan sebagai harapan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat di Kabupaten Natuna. Sebagai wilayah dengan potensi kelautan yang kaya, Kabupaten Natuna harus merdeka secara ekonomi dan tidak bergantung kepada pihak lain.

➤ Religius

Religius adalah peningkatan kondisi masyarakat Kabupaten Natuna yang menjunjung tinggi kaidah agama beserta nilai dan juga spirit religius yang menjadi pedoman dalam kehidupan, termasuk dalam pengelolaan pemerintahan dan pelayanan publik yang menjunjung tinggi toleransi serta kehangatan kehidupan antar umat beragama.

➤ Kultural

Kultural adalah Kondisi masyarakat Kabupaten Natuna yang memiliki semangat budaya melayu yang tinggi dan dijadikan jati diri bagi masyarakat Kabupaten Natuna yang harus terus tumbuh seiring dengan peningkatan pembangunan, serta menjadi dasar dalam merajut semangat nasionalisme dan kebhinekaan.

Dalam rangka mewujudkan visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Natuna, ada 7 (tujuh) misi yang harus ditempuh yaitu sebagai berikut:

- 1 Akselerasi Peningkatan Kualitas SDM
- 2 Mewujudkan kemandirian Ekonomi Berbasis Potensi Lokal
- 3 Menciptakan Kawasan Perbatasan yang Aman, Strategis dan Eksotis
- 4 Akselerasi Pembangunan Infrastruktur yang Tertib dan Teratur
- 5 Menciptakan Kualitas, Daya Tampung, dan Daya Dukung Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
- 6 Menciptakan Reformasi Birokrasi yang Cerdas (SMART)
- 7 Mengoptimalkan Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Misi yang terkait terhadap tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna adalah **misi ke-6 Menciptakan Reformasi Birokrasi yang Cerdas (SMART)** dan **misi ke-7 Mengoptimalkan Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi**. Pada era reformasi birokrasi saat ini, perwujudan pemerintah yang baik merupakan salah satu fokus dari reformasi birokrasi dan penggunaan informasi dan komunikasi sangat diperlukan dalam memberikan

kemudahan, baik disektor Pendidikan, Bisnis, Perbankan, Pemerintahan dan lain-lain.

Misi keenam ini menggambarkan kondisi pemerintahan mampu menciptakan reformasi birokrasi yang cerdas. Upaya yang dilakukan dalam mewujudkan misi ini adalah melalui peningkatan kolaborasi stakeholders dengan pemerintah, peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah, keterbukaan informasi publik, meningkatkan kualitas sumber daya aparatur, peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan publik

Misi ketujuh ini menggambarkan sebuah kondisi dimana penggunaan teknologi informasi dan komunikasi diterapkan secara optimal. Adapun misi ini diwujudkan dengan peningkatan konektivitas data digital antar pulau, penerapan teknologi dalam pelayanan publik, penggunaan aplikasi di seluruh kota. Sehingga teknologi digital dapat digunakan dan dimanfaatkan bagi semua sektor.

B. PROGRAM PEMERINTAH DAERAH PENDUKUNG VISI MISI YANG TERTUANG DALAM RPJMD 2022-2026

Dalam mewujudkan misi ke-6 “Menciptakan Reformasi Birokrasi yang Cerdas (SMART BUREAUCRACY)”. Pemerintah daerah melakukan berbagai upaya untuk mencapai tujuan “Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel”. Strategi pemerintah daerah untuk pencapaian sasaran tersebut adalah Reformasi Birokrasi dengan arah kebijakan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan masyarakat dan kinerja aparatur. Dalam mewujudkan misi ke-7 “Mengoptimalkan Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi”, pemerintah daerah melakukan berbagai upaya untuk mencapai tujuan “Meningkatkan kualitas birokrasi pemerintahan” dengan salah satu sasaran yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika yaitu “Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah”. Adapun program pemerintah daerah di Dinas Komunikasi dan Informatika (Program Prioritas) yang mendukung visi misi RPJMD Tahun 2022-2026 sebagaimana tabel 3.1. dibawah.

C. PROGRAM PERANGKAT DAERAH TERTUANG DALAM RPJMD 2022-2026

Program prioritas memuat program-program prioritas baik untuk mencapai visi misi kepala daerah, pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM), maupun penyelenggaraan urusan pemerintahan di Dinas Komunikasi dan Informatika dengan pagu indikatif yang tertuang di RPJMD 2022-2026 yang menjadi acuan dalam penyusunan Renstra OPD. Program Dinas Komunikasi dan Informatika yang tertuang dalam RPJMD 2021-2026 sebagaimana tabel 3.2. dibawah.

D. TUJUAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN PRIORITAS (RENSTRA 2022-2026)

Dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika maka dirumuskan tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna yang diharapkan dapat dicapai untuk 5 (lima) tahun mendatang yang tertera didalam Perubahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2021-2026 adalah:

Percepatan Implementasi SPBE, Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik serta Pengelolaan Data Statistik Sektoral

Tujuan yang akan dicapai dalam rencana strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna 2021 - 2026 sebagai berikut:

- 1 Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan;
- 2 Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel;
- 3 Mewujudkan pelayanan publik yang prima;
- 4 Meningkatkan kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah;
- 5 Meningkatkan kualitas pengelolaan statistik sektoral pemerintah daerah.

Sasaran

Dalam mewujudkan tujuan di atas, Dinas Komunikasi dan Informatika menetapkan sasaran strategis penyelenggaraan urusan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian untuk tahun 2021-2026 sebagai berikut:

- 1 Meningkatnya pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi;
- 2 Meningkatnya kinerja pemerintah daerah;
- 3 Meningkatnya kepuasan masyarakat;
- 4 Meningkatnya publikasi informasi dan komunikasi publik;
- 5 Meningkatnya ketersediaan data statistik sektoral yang berkualitas.

Tabel 3. 1
Program Pembangunan Daerah yang Disertai Pagu Indikatif Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026
Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode	Misi	Indikator Sasaran	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2021)	Tahun 1 (2022)		Tahun 2 (2023)		Tahun 3 (2024)		Tahun 4 (2025)		Tahun 5 (2026)		Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD	
				Target	Rp. (ribu)	Target	Rp. (ribu)								
MISI 6	Menciptakan Reformasi Birokrasi yang Cerdas (SMART BUREAUCRACY)				6.918.464.140		6.605.464.140		6.989.464.140		7.233.464.140		7.800.464.140		35.547.320.700
6.1	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (good governance)	Indeks Reformasi Birokrasi			6.918.464.140		6.605.464.140		6.989.464.140		7.233.464.140		7.800.464.140		35.547.320.700
6.1.1.	Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel				6.918.464.140		6.605.464.140		6.989.464.140		7.233.464.140		7.800.464.140		35.547.320.700
2.16.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				6.918.464.140		6.605.464.140		6.989.464.140		7.233.464.140		7.800.464.140		35.547.320.700
2.16.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKJIP	81,21	81,25	70.000.000	81,3	120.000.000	81,35	120.000.000	81,4	120.000.000	81,45	120.000.000	81,45	550.000.000
		Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	80	80	4.233.464.140	85	3.781.464.140	85	4.420.464.140	90	4.429.464.140	90	4.616.464.140	90	21.481.320.700
2.16.03.	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase perangkat daerah yang mengelola aplikasi informatika	17	19	2.615.000.000	21	2.704.000.000	23	2.449.000.000	26	2.684.000.000	28	3.064.000.000	28	13.516.000.000
Misi 7	Mengoptimalkan Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi				1.012.000.000		1.525.000.000		1.641.000.000		1.597.000.000		1.730.000.000		7.505.000.000

Kode	Misi	Indikator Sasaran	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2021)	Tahun 1 (2022)		Tahun 2 (2023)		Tahun 3 (2024)		Tahun 4 (2025)		Tahun 5 (2026)		Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD	
				Target	Rp. (ribu)	Target	Rp. (ribu)								
7.1.	Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Teknologi Digital bagi Semua Sektor	Nilai Keterbukaan Informasi Publik			1.012.000.000		1.525.000.000		1.641.000.000		1.597.000.000		1.730.000.000		7.505.000.000
7.1.1.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	Persentase Informasi Publik yang Disebarluaskan			1.012.000.000		1.525.000.000		1.641.000.000		1.597.000.000		1.730.000.000		7.505.000.000
2.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				1.012.000.000		1.525.000.000		1.641.000.000		1.597.000.000		1.730.000.000		7.505.000.000
2.16.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				812.000.000		1.135.000.000		1.101.000.000		1.137.000.000		1.150.000.000		5.335.000.000
2.16.02.	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik mengetahui kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah	64,59	71,21	812.000.000	74,77	1.135.000.000	78,51	1.101.000.000	82,44	1.137.000.000	86,56	1.150.000.000	86,56	5.335.000.000
2.20.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				200.000.000		390.000.000		540.000.000		460.000.000		580.000.000		2.170.000.000
2.20.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase OPD yang menyediakan data dan metadata statistik sektoral	80	80	200.000.000	81	390.000.000	82	540.000.000	83	460.000.000	84	580.000.000	84	2.170.000.000
JUMLAH					7.930.464.140		8.130.464.140		8.630.464.140		8.830.464.140		9.530.464.140		43.052.320.700

*dalam ribuan rupiah

Sumber : RPJMD Kabupaten Natuna 2021-2026

Tabel 3. 2

**Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaannya Kabupaten Natuna Tahun 2022-2026
Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika**

Kode	Urusan / Bidang / Program	Indikator Sasaran	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2021)	Tahun 1 (2022)		Tahun 2 (2023)		Tahun 3 (2024)		Tahun 4 (2025)		Tahun 5 (2026)		Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD		Satuan	Formulasi
				Target	Pagu	Target	Pagu										
2.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				6.029.500.000		5.518.500.000		5.389.500.000		5.703.500.000		6.144.500.000		28.185.500.000		
2.16.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				5.429.500.000		5.518.500.000		5.389.500.000		5.703.500.000		6.144.500.000		28.185.500.000		
2.16.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	NILAI LAPORAN LKJIP	81,21	81,25	70.000.000	81,30	120.000.000	81,35	120.000.000	81,4	120.000.000	81,45	120.000.000	81,45	550.000.000	Nilai	Nilai Laporan LKJIP
		PERSENTASE LAYANAN DUKUNGAN ADMINISTRASI KESEKRETARIATAN YANG SESUAI SOP	80	80	1.932.500.000	85	1.559.500.000	85	1.719.500.000	90	1.749.500.000	90	1.823.500.000	90	8.784.500.000	Persen	Jumlah layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP dibagi jumlah layanan dukungan administrasi kesekretariatan

Kode	Urusan / Bidang / Program	Indikator Sasaran	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2021)	Tahun 1 (2022)		Tahun 2 (2023)		Tahun 3 (2024)		Tahun 4 (2025)		Tahun 5 (2026)		Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD		Satuan	Formulasi
				Target	Pagu	Target	Pagu										
																	dikali 100
2.16.02.	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	PERSENTASE MASYARAKAT YANG MENJADI SASARAN PENYEBARAN INFORMASI PUBLIK, MENGETAHUI KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH	64,59	71,21	812.000.000	74,77	1.135.000.000	78,51	1.101.000.000	82,44	1.150.000.000	86,56	1.137.000.000	86,56	5.335.000.000	Persen	Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota / jumlah penduduk x 100%
2.16.03.	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	PERSENTASE PERANGKAT DAERAH YANG MENGELOLA APLIKASI INFORMATIKA	17	19	2.615.000.000	21	2.704.000.000	23	2.449.000.000	26	2.684.000.000	28	3.064.000.000	28	13.516.000.000	Persen	Jumlah perangkat daerah yang mengelola aplikasi informatika dibagi jumlah perangkat daerah
2.20.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				200.000.000		390.000.000		540.000.000		460.000.000		580.000.000		2.170.000.000		
2.20.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	PERSENTASE OPD YANG MENYEDIKAN	80	80	200.000.000	81	390.000.000	82	540.000.000	83	460.000.000	84	580.000.000	84	2.170.000.000	Persen	Jumlah OPD yang menyediakan data dan metadata

Kode	Urusan / Bidang / Program	Indikator Sasaran	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2021)	Tahun 1 (2022)		Tahun 2 (2023)		Tahun 3 (2024)		Tahun 4 (2025)		Tahun 5 (2026)		Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD		Satuan	Formulasi
				Target	Pagu	Target	Pagu										
		DATA DAN METADATA STATISTIK SEKTORAL															statistik sektoral/ jumlah OPD dikali 100%
2.21.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				400.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000		300.000.000		1.900.000.000		
2.21.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	PERSENTASE KEAMANAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH	0	5	400.000.000	25	400.000.000	50	400.000.000		400.000.000	90	300.000.000	90	1.900.000.000	Persen	Jumlah nilai per area keamanan informasi / jumlah area penilaian x 100%
JUMLAH					6.029.500.000		6.308.500.000		6.329.500.000		6.563.500.000		7.024.500.000		32.255.500.000		

**dalam ribuan rupiah*

Tabel 3.3.
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN NATUNA
TAHUN 2022 - 2026

**dalam ribuan rupiah*

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun	Tahun 1 (2022)		Tahun 2 (2023)		Tahun 3 (2024)		Tahun 4 (2025)		Tahun 5 (2026)		Kondisi Akhir		Unit Pelaksana Penanggung jawab
								Tar get	Rp.	Tar get	Rp.									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
6.1.1.1. MENINGKATKAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN	INDEKS SPBE	6.1.1.1.1. MENINGKATNYA PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI	PERSENTASE PENINGKATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI	6.1.1.1.1.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	PERSENTASE KEAMANAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH	0	5	400.000	25	400.000	50	400.000	75	400.000	90	300.000	90	1.900.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
				6.1.1.1.02.2.01.	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna	Jumlah OPD yang telah menerapkan prosedur pengamanan informasi dan persandian	0	9	400.000	18	400.000	27	400.000	36	300.000	46	300.000	46	1.800.000	
					6.1.1.1.02.2.01.01.	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Kemananan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	0	1	100.000	1	100.000	1	100.000	0	0	0	0	3	300.000

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun	Tahun 1 (2022)		Tahun 2 (2023)		Tahun 3 (2024)		Tahun 4 (2025)		Tahun 5 (2026)		Kondisi Akhir		Unit Pelaksana Penanggung jawab
								Tar get	Rp.	Tar get	Rp.									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				6.1.1.1 .1.02.2 .01.02.	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	0	1	100.000	1	100.000	1	100.000	1	100.000	1	100.000	5	500.000	
				6.1.1.1 .1.02.2 .01.03.	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	0	9	100.000	18	100.000	27	100.000	36	100.000	46	100.000	46	500.000	
				6.1.1.1 .1.02.2 .01.04.	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	0	1	100.000	1	100.000	1	100.000	1	100.000	1	100.000	5	500.000	
				6.1.1.1 .1.02.2 .02.	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pola Hubungan Komunikasi Sandi	0	0	0	0	0	0	0	1	100.000	0	0	1	100.000	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun	Tahun 1 (2022)		Tahun 2 (2023)		Tahun 3 (2024)		Tahun 4 (2025)		Tahun 5 (2026)		Kondisi Akhir		Unit Pelaksana Penanggung jawab
								Target	Rp.	Target	Rp.									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				6.1.1.1.02.2.02.01.	Operasional Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	0	0	0	0	0	0	0	1	100.000	0	0	1	100.000	
				6.1.1.1.1.03.	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	PERSENTASE PERANGKAT DAERAH YANG MENGELOLA APLIKASI INFORMATIKA	17	19	2.610.000	21	2.669.000	23	2.399.000	26	2.638.000	28	3.011.000	28	13.327.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
				6.1.1.1.03.2.01.	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat Daerah Yang Memiliki Portal dan Situs Web	48	50	200.000	55	210.000	60	220.000	65	230.000	70	240.000	70	1.100.000	
				6.1.1.1.03.2.01.01.	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	1	2	100.000	2	100.000	2	100.000	2	100.000	2	100.000	2	500.000	
				6.1.1.1.03.2.01.02.	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam	155	160	100.000	165	110.000	170	120.000	175	130.000	180	140.000	180	600.000	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun	Tahun 1 (2022)		Tahun 2 (2023)		Tahun 3 (2024)		Tahun 4 (2025)		Tahun 5 (2026)		Kondisi Akhir		Unit Pelaksana Penanggung jawab
								Target	Rp.	Target	Rp.									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
					Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota														
				6.1.1.1.03.2.01.	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat Daerah yang Terkoneksi Jaringan Intra Pemerintah atau Menggunakan Akses Internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas KOMINFO	37,04	56	1.495.000	72,2	1.265.000	83,33	1.150.000	92,6	1.354.000	100	1.347.000	100	6.611.000	
				6.1.1.1.03.2.01.03.	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	20	10	1.495.000	9	1.265.000	6	1.150.000	5	1.354.000	4	1.347.000	54	6.611.000	
				6.1.1.1.03.2.02.	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan SPBE yang diselenggarakan secara elektronik dan terintegrasi	56,50	60	915.000	63	1.194.000	66	1.029.000	69	1.054.000	72	1.424.000	72	5.616.000	
				6.1.1.1.03.2.02.02.	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan	1	1	100.000	1	120.000	1	140.000	1	150.000	1	500.000	5	1.010.000	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun	Tahun 1 (2022)		Tahun 2 (2023)		Tahun 3 (2024)		Tahun 4 (2025)		Tahun 5 (2026)		Kondisi Akhir		Unit Pelaksana Penanggung jawab
								Tar get	Rp.	Tar get	Rp.									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
					Pemerintahan Berbasis Elektronik	Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik														
				6.1.1.1 .1.03.2 .02.03.	Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintah Daerah yang Dikelola	2	1	100.000	1	105.000	1	110.000	1	115.000	1	120.000	7	550.000	
				6.1.1.1 .1.03.2 .02.04.	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	0	4	150.000	4	150.000	4	150.000	4	150.000	4	150.000	20	750.000	
				6.1.1.1 .1.03.2 .02.05.	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	0	2	100.000	5	100.000	10	100.000	15	100.000	20	100.000	20	500.000	
				6.1.1.1 .1.03.2 .02.06.	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	2	1	50.000	1	60.000	1	65.000	1	70.000	1	75.000	7	320.000	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun	Tahun 1 (2022)		Tahun 2 (2023)		Tahun 3 (2024)		Tahun 4 (2025)		Tahun 5 (2026)		Kondisi Akhir		Unit Pelaksana Penanggung jawab
								Target	Rp.	Target	Rp.									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				6.1.1.1 .1.03.2 .02.07.	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	16	1	100.000	1	120.000	1	120.000	1	120.000	1	125.000	21	585.000	
				6.1.1.1 .1.03.2 .02.08.	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	0	1	100.000	2	115.000	3	120.000	4	125.000	5	130.000	15	590.000	
				6.1.1.1 .1.03.2 .02.09.	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	0	0	0	1	200.000	0	0	0	0	0	0	1	200.000	
				6.1.1.1 .1.03.2 .02.10.	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	7	6	15.000	6	24.000	6	24.000	6	24.000	6	24.000	37	111.000	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun	Tahun 1 (2022)		Tahun 2 (2023)		Tahun 3 (2024)		Tahun 4 (2025)		Tahun 5 (2026)		Kondisi Akhir		Unit Pelaksana Penanggung jawab
								Tar get	Rp.	Tar get	Rp.									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				6.1.1.1 .1.03.2 .02.11.	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Jumlah Dokumen Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	1	1	100.000	1	100.000	1	100.000	1	100.000	1	100.000	6	500.000	
				6.1.1.1 .1.03.2 .02.12.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	2	1	100.000	1	100.000	1	100.000	1	100.000	1	100.000	7	500.000	
6.1.1.2. MENINGKATNYA BIROKRASI YANG BERSIH DAN AKUNTABEL	NILAI SAKIP	6.1.1.2.1 MENINGKATN YA KINERJA PEMERINTAH DAERAH	NILAI SAKIP	6.1.1. 2.101.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	NILAI LAPORAN LKJIP	81,21	81,25	70.000	81,3	120.000	81,35	120.000	81,4	120.000	81,45	120.000	81,45	550.000	
				6.1.1.2 .101.2. 01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	0	61	70.000	62,5	120.000	63	120.000	63,5	120.000	64	120.000	64	550.000	
				6.1.1.2 .101.2. 01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	0	0	1	50.000	1	50.000	1	50.000	1	50.000	5	200.000	
				6.1.1.2 .101.2. 01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan	2	2	70.000	2	70.000	2	70.000	2	70.000	2	70.000	12	350.000	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun	Tahun 1 (2022)		Tahun 2 (2023)		Tahun 3 (2024)		Tahun 4 (2025)		Tahun 5 (2026)		Kondisi Akhir		Unit Pelaksana Penanggung jawab
								Target	Rp.	Target	Rp.									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
					Kinerja SKPD	Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
6.1.1.3. TERWUJUDNYA PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA	INDEKS PELAYANAN PUBLIK	6.1.1.3.1. MENINGKATKAN KEPUASAN MASYARAKAT	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT	6.1.1.3.1.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE LAYANAN DUKUNGAN ADMINISTRASI KESEKRETARIATAN YANG SESUAI SOP	80	80	4.283.464	85	3.931.464	85	4.551.464	90	4.592.464	90	4.789.464	90	22.148.320	
				6.1.1.3.1.01.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	1	2.300.964	1	2.221.964	1	2.700.964	1	2.679.964	1	2.792.964	1	12.696.820	
				6.1.1.3.1.01.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21	26	2.300.964	26	2.221.964	26	2.700.964	26	2.679.964	26	2.792.964	26	12.696.820	
				6.1.1.3.1.01.02.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang bersertifikasi	95	95	100.000	96	120.000	96	120.000	97	120.000	97	120.000	97	580.000	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun	Tahun 1 (2022)		Tahun 2 (2023)		Tahun 3 (2024)		Tahun 4 (2025)		Tahun 5 (2026)		Kondisi Akhir		Unit Pelaksana Penanggung jawab
								Target	Rp.	Target	Rp.									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				6.1.1.3 .1.01.2 .05.09.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0	0	0	2	20.000	2	20.000	2	20.000	2	20.000	2	80.000	
				6.1.1.3 .1.01.2 .05.11.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	0	10	100.000	10	100.000	10	100.000	10	100.000	10	100.000	50	500.000	
				6.1.1.3 .01.2.0 5.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Kehadiran Pegawai	95	95	60.000	96	30.000	96	30.000	97	30.000	97	30.000	97	180.000	
				6.1.1.3 .01.2.0 5.02.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0	100	60.000	50	30.000	50	30.000	50	30.000	50	30.000	300	180.000	
				6.1.1.3 .1.01.2 .06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Sarana administrasi	75	76	625.000	77	616.000	78	626.000	79	661.000	80	661.000	80	3.189.000	
				6.1.1.3 .1.01.2	Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi	0	5	10.000	5	10.000	5	10.000	5	10.000	5	10.000	5	50.000	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun	Tahun 1 (2022)		Tahun 2 (2023)		Tahun 3 (2024)		Tahun 4 (2025)		Tahun 5 (2026)		Kondisi Akhir		Unit Pelaksana Penanggung jawab
								Tar get	Rp.	Tar get	Rp.									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				.06.01.	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan														
				6.1.1.3 .1.01.2 .06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0	4	200.000	2	200.000	6	200.000	5	200.000	4	200.000	21	1.000.000	
				6.1.1.3 .1.01.2 .06.03.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0	5	100.000	3	76.000	2	36.000	2	36.000	2	36.000	14	284.000	
				6.1.1.3 .1.01.2 .06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0	680	30.000	680	30.000	680	30.000	680	30.000	680	30.000	340	150.000	
				6.1.1.3 .1.01.2 .06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	0	580	45.000	580	50.000	580	50.000	580	55.000	580	55.000	290	255.000	
				6.1.1.3 .1.01.2 .06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang	0	15	20.000	15	25.000	15	25.000	15	30.000	15	30.000	75	130.000	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun	Tahun 1 (2022)		Tahun 2 (2023)		Tahun 3 (2024)		Tahun 4 (2025)		Tahun 5 (2026)		Kondisi Akhir		Unit Pelaksana Penanggung jawab
								Tar get	Rp.	Tar get	Rp.									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
						Disediakan														
				6.1.1.3 .1.01.2 .06.07.	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/ Material yang Disediakan	0	30	40.000	30	45.000	30	45.000	30	50.000	30	50.000	150	230.000	
				6.1.1.3 .1.01.2 .06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0	50	150.000	60	150.000	60	200.000	65	220.000	65	220.000	300	940.000	
				6.1.1.3 .1.01.2 .06.10.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	0	40	30.000	40	30.000	40	30.000	40	30.000	40	30.000	40	150.000	
				6.1.1.3 .1.01.2 .07.	Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Peningkatan Barang Milik Perangkat Daerah	0	0	100.000	30	215.000	40	225.000	60	235.000	90	245.000	90	1.020.000	
				6.1.1.3 .1.01.2 .07.02.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0	0	0	1	40.000	50	40.000	50	40.000	50	40.000	50	160.000	
				6.1.1.3 .1.01.2	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0	0	0	50	100.000	5	100.000	5	100.000	5	100.000	50	400.000	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun	Tahun 1 (2022)		Tahun 2 (2023)		Tahun 3 (2024)		Tahun 4 (2025)		Tahun 5 (2026)		Kondisi Akhir		Unit Pelaksana Penanggung jawab
								Target	Rp.	Target	Rp.									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				.07.02.																
				6.1.1.3 .1.01.2 .07.02.	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0	5	100.000	5	30.000	5	40.000	5	50.000	5	60.000	25	280.000	
				6.1.1.3 .1.01.2 .07.02.	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	0	0	0	3	5.000	6	5.000	9	5.000	10	5.000	10	20.000	
				6.1.1.3 .1.01.2 .07.02.	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	0	0	0	1	40.000	1	40.000	1	40.000	1	40.000	1	160.000	
				6.1.1.3 .1.01.2 .08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Sarana Penunjang Urusan Perkantoran	80	81	610.000	82	536.000	83	616.000	84	621.000	85	621.000	85	3.004.000	
				6.1.1.3 .1.01.2 .08.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0	1500	15.000	200	20.000	200	20.000	2500	25.000	250	25.000	105	105.000	
				6.1.1.3 .1.01.2 .08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2	2	15.000	2	16.000	2	16.000	2	16.000	2	16.000	2	79.000	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun	Tahun 1 (2022)		Tahun 2 (2023)		Tahun 3 (2024)		Tahun 4 (2025)		Tahun 5 (2026)		Kondisi Akhir		Unit Pelaksana Penanggung jawab
								Tar get	Rp.	Tar get	Rp.									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
						yang Disediakan														
				6.1.1.3 .1.01.2 .08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	26	26	580.000	26	500.000	26	580.000	26	580.000	26	580.000	2	2.820.000	
				6.1.1.3 .1.01.2 .09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penunjang Urusan Perkantoran	65	66	487.500	67	192.500	68	233.500	69	245.500	70	319.500	70	1.478.500	
				6.1.1.3 .1.01.2 .09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2	3	360.000	1	40.000	2	60.000	2	60.000	2	60.000	2	580.000	
				6.1.1.3 .1.01.2 .09.06.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0	0	0	2	5.000	4	6.000	6	8.000	10	8.000	10	27.000	
				6.1.1.3 .1.01.2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor dan	1	1	100.000	1	120.000	1	140.000	1	150.000	1	224.000	1	734.000	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun	Tahun 1 (2022)		Tahun 2 (2023)		Tahun 3 (2024)		Tahun 4 (2025)		Tahun 5 (2026)		Kondisi Akhir		Unit Pelaksana Penanggung jawab
								Tar get	Rp.	Tar get	Rp.	Tar get	Rp.	Tar get	Rp.	Tar get	Rp.	Tar get	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				.09.09.	dan Bangunan Lainnya	Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi														
				6.1.1.3 .1.01.2 .09.11.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	0	7	27.500	7	27.500	8	27.500	5	27.500	5	27.500	32	137.500	
7.1.1.1. MENINGKATKAN KUALITAS PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH	PERSENTASE PERANGKAT DAERAH YANG MENGELOLA INFORMASI DAN KOMUNIKASI	7.1.1.1. MENINGKATKAN PUBLIKASI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	CAKUPAN INFORMASI YANG DIPUBLIKASIKAN MELALUI BERBAGAI MEDIA	7.1.1.1.02.	PERSENTASE MASYARAKAT YANG MENJADI SASARAN PENYEBARAN INFORMASI PUBLIK, MENGETAHUI KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH	JUMLAH MASYARAKAT YANG MENJADI SASARAN PENYEBARAN INFORMASI PUBLIK, MENGETAHUI KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH	64,59	71	767.000	75	1.020.000	79	1.020.000	82	1.020.000	87	1.030.000	87	4.857.000	
				7.1.1.1.02.2.01.	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi	36925	40709	767.000	42744	1.020.000	44881	1.020.000	47125	1.020.000	49481	1.030.000	49481	4.857.000	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun	Tahun 1 (2022)		Tahun 2 (2023)		Tahun 3 (2024)		Tahun 4 (2025)		Tahun 5 (2026)		Kondisi Akhir		Unit Pelaksana Penanggung jawab
								Tar get	Rp.	Tar get	Rp.									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
					Kabupaten/Kota	dan Komunikasi Publik														
				7.1.1.1 .02.2.0 1.01.	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	0	0	50.000	1	50.000	1	50.000	1	50.000	1	50.000	4	250.000	
				7.1.1.1 .02.2.0 1.02.	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	57	60	130.000	60	130.000	60	130.000	60	130.000	60	130.000	357	650.000	
				7.1.1.1 .02.2.0 1.03.	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	0	0	0	1	50.000	1	50.000	1	50.000	1	50.000	8	200.000	
				7.1.1.1 .02.2.0 1.04.	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	400	400	100.000	400	110.000	400	110.000	400	110.000	400	110.000	200	540.000	
				7.1.1.1 .02.2.0 1.05.	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media	40	40	147.000	45	150.000	50	150.000	55	150.000	60	150.000	60	747.000	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun	Tahun 1 (2022)		Tahun 2 (2023)		Tahun 3 (2024)		Tahun 4 (2025)		Tahun 5 (2026)		Kondisi Akhir		Unit Pelaksana Penanggung jawab
								Target	Rp.	Target	Rp.									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
						Komunikasi Publik														
				7.1.1.1 .02.2.0 1.06.	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	0	8	100.000	9	110.000	9	110.000	10	110.000	10	110.000	46	540.000	
				7.1.1.1 .02.2.0 1.07.	Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	0	0	0	3	100.000	3	100.000	3	100.000	3	100.000	12	400.000	
				7.1.1.1 .02.2.0 1.08.	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	0	5	100.000	5	110.000	5	110.000	5	110.000	5	110.000	25	540.000	
				7.1.1.1 .02.2.0 1.09.	Manajemen Komunikasi Krisis	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Manajemen Komunikasi Krisis	0	0	0	1	50.000	1	50.000	1	50.000	1	50.000	1	200.000	
				7.1.1.1 .02.2.0 1.10.	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang meningkat Kapasitasnya	0	25	110.000	25	110.000	25	110.000	25	110.000	25	110.000	125	550.000	
				7.1.1.1 .02.2.0 1.13.	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan	0	2	30.000	3	50.000	3	50.000	3	50.000	3	60.000	14	240.000	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun	Tahun 1 (2022)		Tahun 2 (2023)		Tahun 3 (2024)		Tahun 4 (2025)		Tahun 5 (2026)		Kondisi Akhir		Unit Pelaksana Penanggung jawab
								Target	Rp.	Target	Rp.									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
					Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota														
7.1.1.2. MENINGKATKAN KUALITAS PENGELOLAAN STATISTIK SEKTORAL PEMERINTAH DAERAH	PERSENTASE RELEASE DATA STATISTIK SEKTORAL YANG AKURAT DAN TEPAT WAKTU	7.1.1.2.1. MENINGKATKAN KETERSEDIAAN DATA STATISTIK SEKTORAL YANG BERKUALITAS	PERSENTASE KETERSEDIAAN DATA STATISTIK SEKTORAL YANG TERUPDATE	7.1.1.2.1.02	PROGRAM PENYELNGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	PERSENTASE OPD YANG MENYEDIAKAN DATA DAN METADATA STATISTIK SEKTORAL	80	80	200.000	81	390.000	82	540.000	83	460.000	84	580.000	84	2.170.000	
				7.1.1.2.1.02.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Statistik Sektoral yang Dimiliki OPD	215	235	200.000	255	390.000	275	540.000	295	460.000	315	580.000	137	2.170.000	5
				7.1.1.2.1.02.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	0	2	50.000	2	60.000	2	120.000	2	130.000	2	140.000	10	500.000	
				7.1.1.2.1.02.01.02	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu	Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu	0	20	50.000	30	50.000	30	120.000	30	130.000	30	140.000	140	490.000	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun	Tahun 1 (2022)		Tahun 2 (2023)		Tahun 3 (2024)		Tahun 4 (2025)		Tahun 5 (2026)		Kondisi Akhir		Unit Pelaksana Penanggung jawab
								Tar get	Rp.	Tar get	Rp.									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
					Statistik Daerah yang Terintegrasi	Statistik Daerah yang Terintegrasi														
				7.1.1.2 .1.02.2 .01.03.	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	0	1	50.000	1	80.000	1	100.000	1	100.000	1	100.000	5	430.000	
				7.1.1.2 .1.02.2 .01.04.	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS	0	20	50.000	20	100.000	20	100.000	20	100.000	20	100.000	100	450.000	
				7.1.1.2 .1.02.2 .01.05.	Pengembangan Infrastruktur	Jumlah Infrastruktur Statistik	0	0	0	1	100.000	1	100.000	0	0	0	0	2	200.000	
				7.1.1.2 .1.02.2 .01.06.	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral yang Dihimpun	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100.000	1	100.000	
JUMLAH									8.330.464		8.530.464		9.030.464		9.230.464		9.830.464		44.952.320	

HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN

A. PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN TAHUN 2023

Pada tahun 2023 terdapat 4 (empat) Program dan 11 kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika antara lain: (Tabel 4.1.)

A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA

(1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, yang terdiri dari 1 kegiatan antara lain:

1. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

(2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, yang terdiri dari 1 kegiatan antara lain:

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

(3) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, yang terdiri dari 1 kegiatan antara lain :

- 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
- 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
- 3 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan ;
- 4 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultatasi SKPD;

(4) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, yang terdiri dari 1 kegiatan antara lain

1. Pengadaan Mebel

(5) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, yang terdiri dari 3 kegiatan antara lain :

- 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
- 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
- 3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;

(6) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, yang terdiri dari 2 kegiatan antara lain:

- 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- 2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

(7) Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri dari 4 kegiatan antara lain:

- 1 Monitoring Opini dan Aspirasi Publik
- 2 Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik
- 3 Pelayanan Informasi Publik
- 4 Penyediaan atau/ Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota

(8) Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, yang terdiri dari 3 kegiatan antara lain:

- 1 Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten
- 2 Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- 3 Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah

(9) Kegiatan Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, yang terdiri dari 1 kegiatan antara lain:

- 1 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE

(10) Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektor di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri dari 1 kegiatan antara lain:

- 1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektor

Adapun hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2023 adalah sebagai berikut:

➤ **Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

dengan kegiatan :

- a) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Input dana sebesar	Rp	11.157.418,00,-	
Realisasi sebesar	Rp	10.880.937,00,-	(97,52%)

Menghasilkan Output :

Jumlah bulan Laporan =

Tersedianya Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

➤ **Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** dengan kegiatan :

- a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Input dana sebesar	Rp	3.103.446.255,00,-	
Realisasi sebesar	Rp	2.986.010.108,00,-	(96,22 %)

Menghasilkan Output :

Jumlah bulan layanan administrasi perkantoran : 12 Bulan

Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN

➤ **Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah** dengan kegiatan :

- a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Input dana sebesar	Rp	43.112.920,00-	
Realisasi sebesar	Rp	41.934.000,00-	(97,26 %)

Menghasilkan Output :

Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan

- b) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Input dana sebesar	Rp	50.000.000,00-	
Realisasi sebesar	Rp	49.005.000,00-	(98,01 %)

Menghasilkan Output :

Jumlah Jenis Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

c) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Input dana sebesar	Rp	30.000.000,00-	
Realisasi sebesar	Rp	29.865.000,00-	(99,55 %)

Menghasilkan Output :

Jumlah penyediaan barang cetak dan penggandaan kantor

d) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Input dana sebesar	Rp	281.890.894,00-	
Realisasi sebesar	Rp	203.026.231,00-	(72,02 %)

Menghasilkan Output :

Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

➔ **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** dengan kegiatan :

a) Pengadaan Mebel

Input dana sebesar	Rp	16.400.000,00-	
Realisasi sebesar	Rp	16.400.000,00-	(100 %)

Menghasilkan Output :

Jumlah bulan Pengadaan Mebel:

b) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Input dana sebesar	Rp	98.379.000,00-	
Realisasi sebesar	Rp	95.875.438,00-	(97.46 %)

Menghasilkan Output :

Jumlah bulan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya:

➔ **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** dengan kegiatan :

c) Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Input dana sebesar	Rp	43.196.000,00-	
Realisasi sebesar	Rp	42.929.000,00-	(99.38 %)

Menghasilkan Output :

Jumlah bulan Penyediaan Materai Kantor :

d) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Input dana sebesar	Rp	38.950.000,00-	
Realisasi sebesar	Rp	37.135.000,00-	(95.34 %)

Menghasilkan Output :

Jumlah penyediaan tagihan internet, air dan listrik kantor

e) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Input dana sebesar	Rp	708,168.520,00-	
Realisasi sebesar	Rp	684.835.170,00-	(96.71 %)

Menghasilkan Output :

Jumlah tenaga honorer/PTT :

➔ **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** dengan kegiatan :

a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Input dana sebesar	R	69.970.000,00-	
	p		
Realisasi sebesar	R	51.256.511,00-	(77.06 %)
	p		

Menghasilkan Output :

Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya

b) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Input dana sebesar	Rp	15.000.000,00,-	
Realisasi sebesar	Rp	14.220.000,00,-	(94.80%)

Menghasilkan Output :

Jumlah pemeliharaan/ rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya

⇒ **Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** dengan kegiatan:

a) **Monitoring Opini dan Aspirasi Publik**

Latar Belakang

Informasi pembangunan merupakan sarana penting bagi pembangunan nasional untuk masyarakat kota dan desa. Membangun dimulai dari ide dan pemikiran yang dilengkapi dengan informasi yang relevan dan perlu disebarluaskan dan diyakini oleh seluruh lapisan masyarakat, karena itu terlebih dahulu pesan dan kebijakan pemerintah harus disebarluaskan guna membangkitkan semangat serta partisipasi masyarakat. bahwa lembaga informasi dan komunikasi daerah berbeda nama dan tingkat jenjang struktur tetapi tetap proaktif untuk menghimpun informasi publik khususnya yang diproduksi oleh pemerintah daerah seperti peraturan daerah, kebijakan pemerintah daerah, perizinan, perpajakan, dan distribusi menjadi sangat penting untuk dihimpun karena informasi tersebut sangat penting untuk pengembangan dan kemajuan daerah.

Komunikasi merupakan pertukaran informasi, gagasan dan perasaan, baik disampaikan secara verbal maupun non verbal. Membuka akses informasi merupakan kewajiban bagi pemerintah dan badan publik. Secara fundamental, sebuah informasi adalah milik publik, bukan milik pemerintah atau badan publik. Akan tetapi pemerintah memang harus menjaga keseimbangan antara menutup informasi dan kepentingan publik.

Dalam berkomunikasi, beberapa hal akan menjadi perbincangan di tengah publik, yang sering kita sebut dengan aspirasi atau opini. Opini adalah suatu sikap atau pendapat seseorang mengenai sebuah persoalan ataupun keadaan yang pernah maupun sedang terjadi. Opini antara satu orang dengan orang lainnya cenderung tidak sama sebab dipengaruhi pola pikir, pengetahuan, serta lingkungannya dalam menanggapi situasi ataupun persoalan tersebut. Opini publik terdiri atas dua kata, opini dan publik.

Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai salah satu alat negara dan menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam hal keterbukaan informasi mempunyai kewajiban untuk mengakomodir aspirasi dan opini yang berkembang di masyarakat kedalam sebuah wadah dan jika memungkinkan untuk di carikan solusinya. Dalam pelaksanaannya, opini tersebut ditampung dan diakomodir untuk kemudian dipilah dan dibahas menjadi sesuatu informasi yang benar dan bermanfaat bagi masyarakat dan

juga Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan, Pelayanan Informasi Publik dan Pengelolaan Media Komunikasi Publik.

Maksud

- a. Maksud dilakukannya sub kegiatan monitoring dan Aspirasi Publik dalam hal ini kegiatan Kopi Pagi dan Ngobrol Bareng Kominfo adalah untuk memberikan pembelajaran kepada masyarakat tentang bagaimana cara memberikan pendapat atau saran melalui media terhadap suatu persoalan atau kejadian yang sedang menjadi topik pembicaraan (viral);
- b. Ruang berpendapat dan ruang berpartisipasi dalam mengasah kepedulian masyarakat terhadap kejadian/peristiwa yang lagi hangat menjadi topic pembicaraan.

Tujuan

Tujuan kegiatan Kopi Pagi dan Ngobrol Bareng Kominfo adalah untuk mendapatkan informasi dan masukan/saran terhadap kejadian/peristiwa yang sedang terjadi dan yang sedang menjadi topik pembicaraan masyarakat (viral) dan memberikan informasi kepada masyarakat tentang kejadian di masyarakat.

Pelaksanaan Kegiatan

1. Pelaksanaan Dialog Interaktif Kancah Opini Pagi Hari (Kopi Pagi) dalam studio Tahun 2023 yang terlaksana adalah sebanyak 11 kali dari bertempat di Ruang Penyiaran RRI Ranai.

Monitoring Opini dan Aspirasi Publik

Input dana sebesar	Rp	76.082.000,00-	
Realisasi sebesar	Rp	71.049.600,00-	(93,39 %)

Menghasilkan Output :

Jumlah Opini Publik yang Dikelola : 11 Opini Publik

- b) Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik

Latar Belakang

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting Negara demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) pada 30 April 2010 merupakan momentum penting dalam mendorong keterbukaan di Indonesia, khususnya di Kabupaten Natuna. UU ini telah memberikan landasan hukum terhadap

hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik dimana setiap badan publik mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana. Dengan adanya Undang – Undang ini, diharapkan partisipasi publik terhadap penyelenggaraan Negara akan semakin optimal, yang pada akhirnya dapat terwujudnya penyelenggaraan Negara yang transparan, efektif, efisien, akuntabel dan dapat di pertanggungjawabkan.

Selain hak mendapatkan informasi, hak memperoleh pelayanan bagi Warga Negara dan penduduk juga merupakan kewajiban Negara untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik yang berkualitas, wajar dan adil maka perlu membentuk sarana pengaduan publik yang berkualitas, wajar dan adil maka perlu membentuk sarana pengaduan dan penugasan kepada pengelola pengaduan pelayanan publik sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 tahun 2015 tentang Road Map Pengembangan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional.

Berdasarkan aturan-aturan tersebut, sehingga perlu dibangun infrastruktur pendukung pelaksanaannya. Maka setiap Badan Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tersebut wajib untuk membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang bertanggungjawab dibidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan/atau pelayanan informasi sesuai dengan amanat Undang-Undang KIP.

Selain PPID, setiap badan Publik juga harus membangun Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N), Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) sebagai layanan penyampaian semua aspirasi dan pengaduan masyarakat Indonesia.

Selain itu, juga perlu adanya bimbingan teknis maupun sosialisasi terkait pelaksanaan pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi secara terus menerus yang dilakukan oleh PPID dan bimbingan teknis maupun sosialisasi terkait pelaksanaan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional SP4N-LAPOR oleh Lembaga pengelola SP4N Laporan dengan tujuan agar seluruh PPID dan SP4N-LAPOR di Kabupaten Natuna dapat memahami dan mengetahui tata cara maupun proses

pelaksanaan pelayanan informasi dan pelayanan publik kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Maksud

Adapun maksud dari sub kegiatan Pelayanan Informasi Publik adalah Terwujudnya transparansi dalam penyelenggaraan pemerintah/Badan Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Tujuan

- a. Membangun kesepahaman tentang keterbukaan informasi publik kepada para Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkup Pemerintah Kabupaten Natuna;
- b. Mewujudkan PPID Utama dan PPID Pembantu yang berkompeten dalam rangka mengimplementasikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik secara efektif;
- c. Meningkatkan pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Perangkat Daerah untuk menghasilkan layanan Informasi Publik yang berkualitas;
- d. Terpenuhinya kebutuhan masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik yang berkualitas, wajar dan adil dengan adanya SP4N-LAPOR.

Pelaksanaan Kegiatan

Metode yang digunakan dalam sub kegiatan ini adalah :

1. Koordinasi kepada Badan Publik Pemerintah dan Non Pemerintah;]
2. Melaksanakan pembinaan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Publik Pemerintah dan Non Pemerintah;
3. Melaksanakan rapat koordinasi dengan anggota PPID se Kabupaten Natuna.

Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik

Kegiatan Pembuatan artikel oleh Tim Jurnalis Warta Kominfo Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna. Dimana dengan Jumlah Berita/Informasi Tahun 2023 dengan jumlah artikel 608 artikel dengan rincian Tim Diskominfo 58 Artikel dan yang melaksanakan kerjasama media dengan pemerintah Natuna 550 Artikel.

Input dana sebesar	R	6.066.026.000,00,-	
	p		
Realisasi sebesar	R	6.028.378.734,00,-	(99.38 %)
	p		

Menghasilkan Output :

Jumlah Konten Informasi terkait program dan kebijakan pemerintah

c) Pelayanan Informasi Publik

Kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan karena adanya refofusing anggaran yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Tetapi kegiatan ini tetap dilaksanakan tetapi merupakan kegiatan rapat koordinasi PPID yang dilaksanakan oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna.

Input dana sebesar	Rp	248.758.000,00-	
Realisasi sebesar	Rp	196.772.224,00-	(79.10 %)

Menghasilkan Output :

Jumlah OPD yang menyelenggarakan Layanan Informasi dan dokumentasi yang dapat diakses Masyarakat

d) Penyediaan/ Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota

Input dana sebesar	Rp	26.249.000,00,-	
Realisasi sebesar	Rp	25.800.000,,00,-	(98.29 %)

Menghasilkan Output :

Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota

e) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral

Input dana sebesar	Rp	57.649.585,00-	
Realisasi sebesar	Rp	42.845.669,00-	(74,32 %)

Menghasilkan Output :

Jumlah e-book data statistik sectoral

➔ **Program Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** dengan kegiatan:

a) Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota

Input dana sebesar	R	106.749.292,00-	
	p		
Realisasi sebesar	R	104.636.194,00-	(98.02 %)
	p		

Menghasilkan Output :

Jumlah pendaftaran nama domain pemerintah Kabupaten/Kota

b) Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Latar Belakang

Instansi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik wajib memiliki nama domain dan sub domain sebagai alamat elektronik instansi. Nama domain adalah alamat internet penyelenggara negara, orang, badan usaha dan/atau masyarakat, yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet. Pemerintah Kabupaten Natuna melakukan perpanjangan nama domain go.id setiap tahun sehingga nama domain selalu dalam status aktif. Sesuai undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, nama domain termasuk dalam urusan yang dilimpahkan kepada pemerintah daerah. Pemerintah daerah dapat mengatur nama domain instansinya, termasuk mengatur domain desa.id pada wilayahnya. Pemerintah Daerah menempatkan hosting domain di wilayah NKRI. Nama domain ditujukan pada nama domain yang dibiayai oleh APBN, APBD, dan atau anggaran lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam sehubungan dengan hal tersebut, perlu sub kegiatan untuk melakukan penatalaksanaan dan pengawasan nama domain dan sub domain dalam penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten, terutam perpanjangan nama domain utama dan domain desa.

Input dana sebesar	R	74.474.000,-	
	p		
Realisasi sebesar	R	72.659.194,-	(97.56 %)
	p		

Menghasilkan Output :

Jumlah Pengawasan nama domain dan sub domain dalam penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten Natuna

c) Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah

Latar Belakang

Sistem jaringan intra pemerintah daerah atau yang biasa disebut dengan jaringan komputer pemerintah daerah, merupakan suatu infrastruktur teknologi informasi yang menghubungkan semua unit kerja pemerintah di suatu daerah dalam satu jaringan yang terintegrasi. Latar belakang penyelenggaraan sistem jaringan intra pemerintah daerah dapat dikaitkan dengan beberapa faktor, antara lain:

1. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik

Dengan adanya sistem jaringan intra pemerintah daerah, komunikasi dan koordinasi antar unit kerja pemerintah di suatu daerah dapat dilakukan dengan lebih mudah dan efisien. Hal ini dapat mempercepat proses pengambilan keputusan, pemberian pelayanan publik, dan penyelesaian permasalahan di daerah tersebut.

2. Mempermudah akses informasi

Sistem jaringan intra pemerintah daerah dapat memudahkan akses informasi terkait kebijakan dan program pemerintah daerah kepada masyarakat. Selain itu, dengan adanya sistem jaringan ini, informasi dapat disimpan dan diolah dengan lebih mudah dan efisien, sehingga dapat membantu dalam pengambilan keputusan dan perencanaan kebijakan di daerah.

3. Meningkatkan koordinasi antar unit kerja pemerintah

Sistem jaringan intra pemerintah daerah dapat memperkuat koordinasi dan kolaborasi antar unit kerja pemerintah di suatu daerah. Dalam suatu proyek atau program, unit kerja yang terlibat dapat saling berbagi informasi dan saling mendukung untuk mencapai tujuan bersama.

4. Memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik

Dengan adanya sistem jaringan intra pemerintah daerah, proses pengambilan keputusan di daerah dapat lebih transparan, akuntabel, dan partisipatif. Selain itu, sistem jaringan ini juga dapat membantu memperkuat pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan program dan kebijakan pemerintah di suatu daerah.

Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Natuna adalah semua perangkat keras, perangkat lunak dan fasilitas lain yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sebuah system, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, serta perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.

Sebagai penunjang itu semua, dalam menjalankan sebuah roda pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna agar lebih efektif, efisien. Serta cepat dan transparan untuk pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah Kabupaten Natuna melalui Diskominfo sebagai Dinas Teknis yang menangani hal ini, menyediakan layanan intranet Pemerintah yang sudah dibangun secara bertahap sejak tahun 2019.

Layanan intranet ini didukung dengan akses internet dari ISP (Internet Service Provider) dengan konsep dedicated. Sejak tahun 2019, dedicated bandwidth yang disediakan untuk beberapa kantor/OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang sudah terhubung mulai dari 100Mbps pada tahun 2019, 300Mbps pada Tahun 2020 dan terakhir 450Mbps pada Tahun 2021, dengan konsep jaringan menggunakan FO dan Wireless.

Optimalisasi layanan kepada masyarakat dengan pemanfaatan infrastruktur TIK ini, belum sepenuhnya dirasakan oleh seluruh kantor/OPD di lingkungan Pemerintah Kab. Natuna. Oleh karena itu, dalam rangka memenuhi kebutuhan tersebut Diskominfo Kab. Natuna pada tahun anggaran 2023 ini akan tetap melanjutkan program kegiatan yang sudah berjalan, mulai dari penyediaan bandwidth yang lebih besar dan lebih stabil, serta melanjutkan pembangunan dan pengembangan infrastruktur jaringan intranet, guna pemenuhan kebutuhan akses internet untuk kantor/OPD yang belum terhubung

Disamping itu, terhadap infrastruktur yang sudah dibangun akan dilakukan pemeliharaan serta perbaikan yang dianggap perlu. Hal ini merupakan kebutuhan mutlak yang harus direncanakan secara matang dan menyeluruh. Karena semua perangkat keras yang digunakan, baik yang sifatnya indoor (di dalam ruangan) maupun outdoor (diluar ruangan), tentu membutuhkan perawatan yang rutin. Agar usia pakai dapat terjaga dan terpelihara secara baik, sehingga diharapkan dapat membantu kinerja pemerintah daerah dalam mengimplementasikan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) di Lingkungan Pemkab Natuna.

Ruang Lingkup kegiatan ini yaitu penyediaan akses internet untuk kantor/OPD yang sudah terhubung di dalam jaringan intranet Pemkab. Natuna, serta rencana lanjutan pembangunan dan pengembangan infrastruktur jaringan intranet Pemkab. Natuna untuk kantor/OPD yang belum terhubung, antara lain dengan melakukan : Belanja Akses Internet Pemkab. Natuna, Belanja Peralatan Pemeliharaan dan Peralatan Jaringan, guna mendukung rencana pembangunan dan pengembangan infrastruktur jaringan intranet Pemkab. Natuna yang sudah ada. Serta pengelolaan server secara fisik dan non fisik

berikut konten yang ada, terkait Domain dan Sub Domain Pemkab. Natuna yang sudah ada sebelumnya.

Maksud

Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Kabupaten/Kota

Tujuan

Tujuan dari Kegiatan ini diantaranya :

- a. Terlaksananya Sub Kegiatan Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota
- b. Terlaksananya Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; dan
- c. Terlaksananya Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah.

Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan ini dilaksanakan dengan beberapa metode, antara lain :

1. Swakelola
2. E- Catalog
3. Pengadaan Langsung ; dan
4. Tender

Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah

Input dana sebesar	R		
	p	1.624.048.124,00-	
Realisasi sebesar	R	1.609.183.434,00-	(99.08 %)
	p		

Menghasilkan Output :

Jumlah Perangkat daerah yang terkoneksi jaringan intra pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo : 10 OPD

Tabel 4. 1**Data OPD yang tersedia Layanan Akses Internet/ Masuk dalam Jaringan Intra Pemerintah Kabupaten Natuna, serta OPD yang Mengelola Domain dan Sub Domain Tahun 2023**

NO	NAMA OPD	KETERSEDIAAN AKSES INTERNET	DOMAIN/SUB DOMAIN
1.	INSPEKTORAT	Jaringan Intra dengan Infras Pemkab Natuna	https://inspektorat.natunakab.go.id/
2.	SEKRETARIAT DPRD	Jaringan Intra dengan Infras ISP	https://setwan.natunakab.go.id/
3.	SEKRETARIAT DAERAH	Jaringan Intra dengan Infras Pemkab Natuna	https://setda.natunakab.go.id/
4.	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jaringan Intra dengan Infras Pemkab Natuna	https://dpupr.natunakab.go.id/
5.	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Jaringan Intra dengan Infras ISP	https://dpmpstsp.natunakab.go.id/
6.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Jaringan Intra dengan Infras Pemkab Natuna	https://dlh.natunakab.go.id/
7.	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	Jaringan Intra dengan Infras ISP	https://dispora.natunakab.go.id/
8.	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Jaringan Intra dengan Infras Pemkab Natuna	https://disdik.natunakab.go.id/
9.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Jaringan Intra dengan Infras ISP	http://disdukcapil.natunakab.go.id/
10.	DINAS SOSIAL	Jaringan Intra dengan Infras ISP	https://dinsos.natunakab.go.id/
11.	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Jaringan Intra dengan Infras Pemkab Natuna	https://diskominfo.natunakab.go.id/
12.	DINAS PARIWISATA	Jaringan Intra dengan Infras Pemkab Natuna	https://dinaspariwisata.natunakab.go.id/
13.	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO	Jaringan Intra dengan Infras Pemkab Natuna	http://disperindagkopum.natunakab.go.id/
14.	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Jaringan Intra dengan Infras ISP	https://dpad.natunakab.go.id/
15.	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	Jaringan Intra dengan Infras ISP	https://disdamkar.natunakab.go.id/
16.	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	Jaringan Intra dengan Infras Pemkab Natuna	https://dkpp.natunakab.go.id/
17.	DINAS PEMBERDAYAAN	Jaringan Intra dengan Infras Pemkab Natuna	https://dpmd.natunakab.go.id/

	MASYARAKAT DAN DESA		
18.	DINAS PERHUBUNGAN	Jaringan Intra dengan Infrasp ISP	https://dishub.natunakab.go.id/
19	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Jaringan Intra dengan Infrasp Pemkab Natuna	http://dp3ap2kb.natunakab.go.id/
20	DINAS PERIKANAN	Jaringan Intra dengan Infrasp ISP	http://diskan.natunakab.go.id/
21	DINAS KESEHATAN	Jaringan Intra dengan Infrasp Pemkab Natuna	https://dinkes.natunakab.go.id/
22	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Jaringan Intra dengan Infrasp Pemkab Natuna	https://dprkpp.natunakab.go.id/
23	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	Jaringan Intra dengan Infrasp ISP	http://disnakertrans.natunakab.go.id/
24	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Jaringan Intra dengan Infrasp Pemkab Natuna	http://kesbangpol.natunakab.go.id/
25	BADAN PENGELOLA KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	Jaringan Intra dengan Infrasp Pemkab Natuna	http://bpkad.natunakab.go.id/
26	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Jaringan Intra dengan Infrasp Pemkab Natuna	https://bpbd.natunakab.go.id/
27	BADAN PENGELOLA PERBATASAN	Jaringan Intra dengan Infrasp Pemkab Natuna	https://bpp.natunakab.go.id/
28	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Jaringan Intra dengan Infrasp Pemkab Natuna	https://www.bp3d.natunakab.go.id/
29	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Jaringan Intra dengan Infrasp Pemkab Natuna	https://bkpsdm.natunakab.go.id/
30	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Jaringan Intra dengan Infrasp ISP	https://kecpulaulaut.natunakab.go.id/
31	KECAMATAN PULAU LAUT		https://kecpulaulaut.natunakab.go.id/
32	KECAMATAN MIDAI		https://kecmidai.natunakab.go.id/
33	KECAMATAN BUNGURAN BATUBI		https://kecbatubi.natunakab.go.id/
34	KECAMATAN SERASAN TIMUR		http://kecserasantimur.natunakab.go.id/
35	KECAMATAN BUNGURAN TENGAH	Jaringan Intra dengan Infrasp Pemkab Natuna	http://kecbungtengah.natunakab.go.id/

36	KECAMATAN PULAU TIGA BARAT		https://kecpulautigabarar.natunakab.go.id/
37	KECAMATAN BUNGURAN BARAT	Jaringan Intra dengan Infras Pemkab Natuna	https://kecbungbarat.natunakab.go.id/
38	KECAMATAN SUBI		https://kecsubi.natunakab.go.id/
39	KECAMATAN SELUAN		https://kecseluan.natunakab.go.id/
40	KECAMATAN BUNGURAN SELATAN	Jaringan Intra dengan Infras Pemkab Natuna	http://kecbungselatan.natunakab.go.id/
41	KECAMATAN SUAK MIDAI		https://kecsuakmidai.natunakab.go.id/
42	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR LAUT	Jaringan Intra dengan Infras Pemkab Natuna	http://kecbungtimla.natunakab.go.id/
43	KECAMATAN SERASAN		https://kecserasan.natunakab.go.id/
44	KECAMATAN BUNGURAN UTARA		https://kecbungut.natunakab.go.id/
45	KECAMATAN PULAU TIGA		https://kecpulautiga.natunakab.go.id/
46	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR	Jaringan Intra dengan Infras Pemkab Natuna	https://kecbungtim.natunakab.go.id/
47			

Tabel 4. 2

Data Website Pemerintah Kabupaten Natuna

NO.	NAMA OPD	NAMA DOMAIN / SUB DOMAIN
1.	Pemerintah Kabupaten Natuna	https://natunakab.go.id/
2.	Inspektorat	https://inspektorat.natunakab.go.id/
3.	Sekretariat Daerah	https://setda.natunakab.go.id/
4.	Sekretariat DPRD	https://setwan.natunakab.go.id/
5.	Dinas Pemadam Kebakaran	https://disdamkar.natunakab.go.id/
6.	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	https://dkpp.natunakab.go.id/
7.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	https://dpmd.natunakab.go.id/
8.	Dinas Perhubungan	https://dishub.natunakab.go.id/
9.	Dinas Pemberdayaan	https://dp3ap2kb.natunakab.go.id/

NO.	NAMA OPD	NAMA DOMAIN / SUB DOMAIN
	Perempuan Perlindungan Anak	
10.	Dinas Perikanan	https://diskan.natunakab.go.id/
11.	Dinas Kesehatan	https://dinkes.natunakab.go.id/
12.	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	https://dprkpp.natunakab.go.id/
13.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	https://disnakertrans.natunakab.go.id/
14.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	https://dpupr.natunakab.go.id/
15.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	https://dpmpstsp.natunakab.go.id/
16.	Dinas Lingkungan Hidup	https://dlh.natunakab.go.id/
17.	Dinas Pemuda dan Olah Raga	https://dispورا.natunakab.go.id/
18.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	https://disdik.natunakab.go.id/
19.	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	https://disdukcapil.natunakab.go.id/
20.	Dinas Sosial	https://dinsos.natunakab.go.id/
21.	Dinas Komunikasi dan Informatika	https://diskominfo.natunakab.go.id/
22.	Dinas Pariwisata	https://dinaspariwisata.natunakab.go.id/
23.	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	https://disperindagkopum.natunakab.go.id/
24.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	https://dpad.natunakab.go.id/
25.	Badan Pengelola Perbatasan	https://bpps.natunakab.go.id/
26.	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	https://bp3d.natunakab.go.id/
27.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	https://bkpsdm.natunakab.go.id/
28.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah	https://kesbangpol.natunakab.go.id/
29.	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	http://bpkad.natunakab.go.id/
30.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	http://bpbda.natunakab.go.id/
31.	SATPOL PP	http://polpp.natunakab.go.id/
32.	KECAMATAN BUNGURAN SELATAN	http://kecbungselatan.natunakab.go.id/
33.	KECAMATAN SUAK MIDAI	https://kecsuakmidai.natunakab.go.id/
34.	KECAMATAN BUNGURAN	http://kecbungtimla.natunakab.go.id/

NO.	NAMA OPD	NAMA DOMAIN / SUB DOMAIN
	TIMUR LAUT	
35.	KECAMATAN SERASAN	https://kecserasan.natunakab.go.id/
36.	KECAMATAN BUNGURAN UTARA	https://kecbungut.natunakab.go.id/
37.	KECAMATAN PULAU TIGA	https://kecpulautiga.natunakab.go.id/
38.	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR	https://kecbungtim.natunakab.go.id/
39.	KECAMATAN PULAU PANJANG	https://kecpulaupanjang.natunakab.go.id/
40.	KECAMATAN PULAU LAUT	https://kecpulaulaut.natunakab.go.id/
41.	KECAMATAN MIDAI	https://kecmidai.natunakab.go.id/
42.	KECAMATAN SERASAN TIMUR	http://kecserasantimur.natunakab.go.id/
43.	KECAMATAN BUNGURAN TENGAH	http://kecbungtengah.natunakab.go.id/
44.	KECAMATAN PULAU TIGA BARAT	https://kecpulautigabaratanatunakab.go.id/
45.	KECAMATAN BUNGURAN BARAT	https://kecbungbaratanatunakab.go.id/
46.	KECAMATAN SUBI	https://kecsubi.natunakab.go.id/
47.	KECAMATAN SELUAN	https://kecsoluan.natunakab.go.id/
48.	Unit Layanan Pengadaan	http://ulp.natunakab.go.id/
49.	UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Natuna	http://rsud.natunakab.go.id/
50.	Layanan Pengadaan Secara Elektronik	http://lpse.natunakab.go.id/eproc4
51.	JDIH	http://jdih.natunakab.go.id/
52.	SIPETARUNG	http://sipetarung.natunakab.go.id/
53.	STATISTIK	http://satudata.natunakab.go.id/
54.	UNIT KERJA PENGADAAN BARANG & JASA	https://ukpbj.natunakab.go.id/
55.	Kelurahan Ranai Kota	https://ranaikota.natunakab.go.id/
56.	Desa Teluk Labuh	https://teluklabuh.website.desa.id/
57.	Desa Teluk Buton	https://telukbuton.desa.natunakab.go.id/
58.	Desa Tapau	https://tapau.desa.natunakab.go.id/
59.	Desa Tanjung Kumbik Utara	https://tanjungkumbikutara.desa.natunakab.go.id/
60.	Desa Tanjung Batang	https://tanjungbatang.desa.natunakab.go.id/
61.	Desa Tanjung Balau	https://tanjungbalau.desa.natunakab.go.id/
62.	Desa Setumuk	https://setumuk.desa.natunakab.go.id/
63.	Desa Selemam	https://selemam.desa.natunakab.go.id/
64.	Desa Selaut	https://selaut.desa.natunakab.go.id/
65.	Desa Selading	https://selading.desa.natunakab.go.id/
66.	Kelurahan Sedanau	https://sedanau.website.desa.id/
67.	Desa Sebadai Ulu	https://sebadaihulu.desa.natunakab.go.id/

NO.	NAMA OPD	NAMA DOMAIN / SUB DOMAIN
68.	Desa Sabang Mawang Barat	https://sabangmawangbarat.desa.natunakab.go.id/
69.	Desa Sabang Mawang	https://sabangmawang.website.desa.id/
70.	Desa Payak	https://payak.website.desa.id/
71.	Desa Pangkalan	https://pangkalan.website.desa.id/
72.	Desa Limau Manis	https://limaumanis-natuna.desa.id/
73.	Desa Kelanga	https://kelanga.desa.natunakab.go.id/
74.	Desa Gunung Putri	https://gunungputri.website.desa.id/
75.	Desa Gunung Jambat	https://gunungjambat.desa.natunakab.go.id/
76.	Desa Tanjung Setelung	https://desatanjungsetelung.natunakab.go.id/
77.	Desa Tanjung Pala	https://desatanjungpala.natunakab.go.id/
78.	Desa Tanjung	https://desatanjung.natunakab.go.id/
79.	Desa Subi Besar Timur	https://desasubibesartimur.natunakab.go.id/
80.	Desa Subi Besar	https://desasubibesar.natunakab.go.id/
81.	Desa Sepempang	https://desasepempang.natunakab.go.id/
82.	Desa Semedang	https://desasemedang.natunakab.go.id/
83.	Desa Seluan Barat	https://desaseluanbarat.natunakab.go.id/
84.	Desa Sededap	https://desasededap.natunakab.go.id/
85.	Desa Pulau Tiga	https://desapulautiga.natunakab.go.id/
86.	Desa Pulau Kerdau	https://desapulaukerdau.natunakab.go.id/
87.	Desa Pengadah	https://desapengadah.natunakab.go.id/
88.	Desa Meliah Selatan	https://desameliahselatan.natunakab.go.id/
89.	Desa Mekar Jaya	https://desamekarjaya.natunakab.go.id/
90.	Desa Kelarik Barat	https://desakelarikbarat.natunakab.go.id/
91.	Desa Kelarik Air Mali	https://desakelarikairmali.natunakab.go.id/
92.	Desa Kampung Hilir	https://desakampunghilir.natunakab.go.id/
93.	Desa Harapan Jaya	https://desaharapanjaya.natunakab.go.id/
94.	Desa Ceruk	https://desaceruk.natunakab.go.id/
95.	Desa Cemaga Utara	https://desacemagautara.natunakab.go.id/
96.	Desa Cemaga Selatan	https://desacemagaselatan.natunakab.go.id/
97.	Desa Binjai	https://desabinjai.natunakab.go.id/
98.	Desa Arung Ayam	https://desaarungayam.natunakab.go.id/
99.	Desa Air Ringau	https://desaairringau.natunakab.go.id/
100.	Desa Air Payang	https://desaairpayang.natunakab.go.id/
101.	Desa Air Kumpai	https://desaairkumpai.natunakab.go.id/
102.	Desa Cemaga	https://cemaga.website.desa.id/
103.	Desa Batu Gajah	https://batugajah.website.desa.id/
104.	Desa Batu Berian	https://batuberian.desa.natunakab.go.id/
105.	Desa Air Nusa	https://airnusa.website.desa.id/
106.	Desa Air Lengit	https://airlengit.desa.natunakab.go.id/
107.	Desa Pulau Panjang	http://desapulaupanjang.natunakab.go.id/
108.	Desa Kelarik	http://desakelarik.natunakab.go.id/
109.	Desa Kadur	http://desakadur.natunakab.go.id/
110.	Desa Gunung Durian	http://desagunungdurian.natunakab.go.id/
111.	Desa Cemaga Tengah	http://desacemagatengah.natunakab.go.id/
112.	PUSKESMAS KELARIK	http://puskesmas-kelarik.natunakab.go.id/
113.	PUSKESMAS RANAI	http://puskesmasranai.natunakab.go.id/

NO.	NAMA OPD	NAMA DOMAIN / SUB DOMAIN
114.	PUSKESMAS SERASAN TIMUR	http://puskesmasserasantimur.natunakab.go.id/
115.	Badan Amil Zakat Nasional	http://baznas.natunakab.go.id/
116.	DEKRANASDA	http://dekranasda.natunakab.go.id/
117.	INFORMASI LAYAK ANAK	http://ila.natunakab.go.id/
118.	LAPOR	http://lapor.natunakab.go.id/

Tabel 4. 3
Daftar sub domain yang terdaftar

NO	Sub Domain	IP	Pembuatan	Kapasitas	Terpakai
1	apps.natunakab.go.id	103.150.22.242	27/06/2019 09.11	5000 MB	19 MB
2	baznas.natunakab.go.id	103.150.22.242	03/12/2018 10.15	5000 MB	819 MB
3	bkpsdm.natunakab.go.id	103.150.22.242	28/02/2020 16.45	8000 MB	2138 MB
4	bp2rd.natunakab.go.id	103.150.22.242	30/01/2019 07.28	5000 MB	1492 MB
5	bp3d.natunakab.go.id	103.150.22.242	18/05/2017 00.00	5000 MB	974 MB
6	bpbd.natunakab.go.id	103.150.22.242	10/01/2022 06.42	5000 MB	113 MB
7	bpkad.natunakab.go.id	103.150.22.242	07/05/2019 10.07	5000 MB	3750 MB
8	bppd.natunakab.go.id	103.150.22.242	04/12/2021 07.32	5000 MB	257 MB
9	bps.natunakab.go.id	103.150.22.242	18/05/2017 00.00	5000 MB	17 MB
10	covid19.natunakab.go.id	103.150.22.242	23/03/2020 12.54	5000 MB	2456 MB
11	data.natunakab.go.id	103.150.22.242	18/05/2017 00.00	5000 MB	188 MB
12	datadesa.natunakab.go.id	103.150.22.242	18/06/2020 10.05	10240 MB	7 MB
13	dekranasda.natunakab.go.id	103.150.22.242	12/12/2018 07.13	5000 MB	142 MB
14	desa.natunakab.go.id	103.150.22.242	10/05/2022 09.25	5000 MB	661 MB
15	desaairkumpai.natunakab.go.id	103.150.22.242	09/10/2020 09.20	5000 MB	93 MB

NO	Sub Domain	IP	Pembuatan	Kapasitas	Terpakai
16	desaairnusa.natunakab.go.id	103.150.22.242	24/10/2019 15.14	5000 MB	248 MB
17	desaairpayang.natunakab.go.id	103.150.22.242	27/01/2022 20.25	5000 MB	150 MB
18	desaairputih.natunakab.go.id	103.150.22.242	29/10/2019 08.00	5000 MB	149 MB
19	desaairringau.natunakab.go.id	103.150.22.242	02/11/2019 11.16	5000 MB	215 MB
20	desaarungayam.natunakab.go.id	103.150.22.242	15/11/2019 05.50	5000 MB	299 MB
21	desabatubelanak.natunakab.go.id	103.150.22.242	02/11/2019 10.59	5000 MB	266 MB
22	desabatuberian.natunakab.go.id	103.150.22.242	29/10/2019 16.42	5000 MB	600 MB
23	desabelakanggunung.natunakab.go.id	103.150.22.242	29/10/2019 09.42	5000 MB	207 MB
24	desabinjai.natunakab.go.id	103.150.22.242	24/10/2019 16.53	5000 MB	156 MB
25	desacemaga.natunakab.go.id	103.150.22.242	21/06/2019 07.14	5000 MB	843 MB
26	desacemagaselatan.natunakab.go.id	103.150.22.242	06/11/2020 10.28	5000 MB	147 MB
27	desacemagatengah.natunakab.go.id	103.150.22.242	03/09/2019 17.00	5000 MB	172 MB
28	desacemagautara.natunakab.go.id	103.150.22.242	24/10/2019 16.13	5000 MB	172 MB
29	desaceruk.natunakab.go.id	103.150.22.242	14/04/2020 13.44	5000 MB	412 MB
30	desagunungdurian.natunakab.go.id	103.150.22.242	08/03/2019 15.20	5000 MB	121 MB
31	desagunungjambat.natunakab.go.id	103.150.22.242	02/11/2019 11.17	5000 MB	159 MB
32	desagunungputri.natunakab.go.id	103.150.22.242	02/10/2020 09.46	5000 MB	442 MB
33	desaharapanjaya.natunakab.go.id	103.150.22.242	03/09/2019 16.35	5000 MB	117 MB
34	desakadur.natunakab.go.id	103.150.22.242	05/08/2020 10.00	5000 MB	122 MB
35	desakampunghilir.natunakab.go.id	103.150.22.242	29/10/2019 16.15	5000 MB	331 MB
36	desakelanga.natunakab.go.id	103.150.22.242	22/02/2022 12.55	5000 MB	143 MB

NO	Sub Domain	IP	Pembuatan	Kapasitas	Terpakai
37	desakelarik.natunakab.go.id	103.150.22.242	27/03/2019 05.50	5000 MB	314 MB
38	desakelarikairmali.natunakab.go.id	103.150.22.242	09/04/2019 17.09	5000 MB	440 MB
39	desakelarikbarat.natunakab.go.id	103.150.22.242	04/05/2021 18.45	5000 MB	82 MB
40	desakelarikutara.natunakab.go.id	103.150.22.242	28/07/2019 06.40	5000 MB	211 MB
41	desalimaumanis.natunakab.go.id	103.150.22.242	29/10/2019 16.23	5000 MB	192 MB
42	desamekarjaya.natunakab.go.id	103.150.22.242	12/08/2018 12;26	50000 MB	704 MB
43	desameliah.natunakab.go.id	103.150.22.242	02/11/2019 10.56	5000 MB	178 MB
44	desameliahselatan.natunakab.go.id	103.150.22.242	29/10/2019 14.48	5000 MB	182 MB
45	desapayak.natunakab.go.id	103.150.22.242	22/10/2019 06.46	5000 MB	245 MB
46	desapengadah.natunakab.go.id	103.150.22.242	23/07/2018 08.20	5000 MB	5001 MB
47	desapiantengah.natunakab.go.id	103.150.22.242	02/11/2019 10.52	5000 MB	204 MB
48	desapulaukerdau.natunakab.go.id	103.150.22.242	02/11/2019 11.01	5000 MB	167 MB
49	desapulaupanjang.natunakab.go.id	103.150.22.242	06/11/2019 13.45	5000 MB	223 MB
50	desapulautiga.natunakab.go.id	103.150.22.242	03/09/2020 16.14	5000 MB	825 MB
51	desasabangmawang.natunakab.go.id	103.150.22.242	03/09/2019 18.30	5000 MB	88 MB
52	desasabangmawangbarat.natunakab.go.id	103.150.22.242	29/10/2019 14.33	5000 MB	145 MB
53	desasebadaihulu.natunakab.go.id	103.150.22.242	02/11/2019 11.05	5000 MB	794 MB
54	desasedaratbaru.natunakab.go.id	103.150.22.242	29/10/2019 09.02	5000 MB	144 MB
55	desasededap.natunakab.go.id	103.150.22.242	02/11/2019 10.54	5000 MB	207 MB
56	desaselading.natunakab.go.id	103.150.22.242	29/10/2019 15.17	5000 MB	217 MB
57	desaselaut.natunakab.go.id	103.150.22.242	02/11/2019 09.07	5000 MB	377 MB

NO	Sub Domain	IP	Pembuatan	Kapasitas	Terpakai
58	desaselemam.natunakab.go.id	103.150.22.242	02/11/2019 11.06	5000 MB	157 MB
59	desaseluanbarat.natunakab.go.id	103.150.22.242	20/03/2020 10.08	5000 MB	234 MB
60	desasemedang.natunakab.go.id	103.150.22.242	02/11/2019 11.11	5000 MB	193 MB
61	desasepempang.natunakab.go.id	103.150.22.242	22/01/2018 11.19	5000 MB	606 MB
62	desasetumuk.natunakab.go.id	103.150.22.242	29/10/2019 16.32	5000 MB	176 MB
63	desasubi.natunakab.go.id	103.150.22.242	02/11/2019 10.57	5000 MB	186 MB
64	desasubibesar.natunakab.go.id	103.150.22.242	02/11/2019 09.38	5000 MB	301 MB
65	desasubibesartimur.natunakab.go.id	103.150.22.242	29/10/2019 08.23	5000 MB	187 MB
66	desasungaiulu.natunakab.go.id	103.150.22.242	02/11/2019 11.00	5000 MB	152 MB
67	desatanjung.natunakab.go.id	103.150.22.242	17/04/2018 21.12	5000 MB	929 MB
68	desatanjungbalau.natunakab.go.id	103.150.22.242	02/11/2019 10.53	5000 MB	198 MB
69	desatanjungbatang.natunakab.go.id	103.150.22.242	29/10/2019 15.03	5000 MB	187 MB
70	desatanjungkumbikutarana.natunakab.go.id	103.150.22.242	02/11/2019 11.12	5000 MB	187 MB
71	desatanjungpala.natunakab.go.id	103.150.22.242	25/03/2020 10.49	5000 MB	4037 MB
72	desatanjungsetelung.natunakab.go.id	103.150.22.242	02/11/2019 08.15	5000 MB	255 MB
73	desatapau.natunakab.go.id	103.150.22.242	02/11/2019 11.03	5000 MB	182 MB
74	desatelukbuton.natunakab.go.id	103.150.22.242	03/10/2019 13.50	5000 MB	383 MB
75	desaterayak.natunakab.go.id	103.150.22.242	02/11/2019 11.16	5000 MB	145 MB
76	dinaspariwisata.natunakab.go.id	103.150.22.242	18/05/2017 00.00	5000 MB	2306 MB
78	dinsos.natunakab.go.id	103.150.22.242	18/02/2020 10.52	5000 MB	282 MB
79	disdamkar.natunakab.go.id	103.150.22.242	14/05/2018 20.55	5000 MB	1341 MB

NO	Sub Domain	IP	Pembuatan	Kapasitas	Terpakai
80	disdik.natunakab.go.id	103.150.22.242	28/08/2020 08.52	5000 MB	1121 MB
82	disdukcapil.natunakab.go.id	103.150.22.242	18/05/2017 00.00	5000 MB	896 MB
83	dishub.natunakab.go.id	103.150.22.242	18/05/2017 00.00	5000 MB	963 MB
84	diskominfo.natunakab.go.id	103.150.22.242	18/05/2017 00.00	5000 MB	2548 MB
86	disnakertrans.natunakab.go.id	103.150.22.242	18/05/2017 00.00	5000 MB	862 MB
87	disperindagkopum.natunakab.go.id	103.150.22.242	14/04/2021 10.22	5000 MB	172 MB
88	dispورا.natunakab.go.id	103.150.22.242	12/02/2020 08.25	5000 MB	214 MB
91	dkpp.natunakab.go.id	103.150.22.242	16/02/2022 21.14	5000 MB	244 MB
92	dlh.natunakab.go.id	103.150.22.242	18/05/2017 00.00	5000 MB	195 MB
93	dp3ap2kb.natunakab.go.id	103.150.22.242	26/02/2020 15.04	5000 MB	742 MB
94	dpad.natunakab.go.id	103.150.22.242	18/05/2017 00.00	5000 MB	484 MB
95	dppdni.natunakab.go.id	103.150.22.242	03/09/2020 16.47	5000 MB	99 MB
96	dpmd.natunakab.go.id	103.150.22.242	18/05/2017 00.00	5000 MB	481 MB
97	dpmptsp.natunakab.go.id	103.150.22.242	18/05/2017 00.00	5000 MB	1948 MB
98	dprkpp.natunakab.go.id	103.150.22.242	30/09/2020 12.17	5000 MB	504 MB
99	dpupr.natunakab.go.id	103.150.22.242	18/05/2017 00.00	5000 MB	1517 MB
100	geopark.natunakab.go.id	103.150.22.242	12/12/2018 07.44	5000 MB	410 MB
101	ila.natunakab.go.id	103.150.22.242	21/02/2022 06.28	5000 MB	119 MB
102	infis.natunakab.go.id	103.150.22.242	15/11/2017 17.16	10240 MB	2937 MB
103	infisapps.natunakab.go.id	103.150.22.242	10/02/2022 12.48	5000 MB	2 MB
104	inspektorat.natunakab.go.id	103.150.22.242	25/09/2018 07.58	5000 MB	255 MB

NO	Sub Domain	IP	Pembuatan	Kapasitas	Terpakai
105	jdi.h.natunakab.go.id	103.150.22.242	18/05/2017 00.00	20000 MB	4963 MB
106	kecbungselatan.natunakab.go.id	103.150.22.242	07/08/2019 09.15	5000 MB	473 MB
107	kecbungtim.natunakab.go.id	103.150.22.242	25/05/2019 13.00	5000 MB	2547 MB
108	kecbungtimla.natunakab.go.id	103.150.22.242	07/08/2019 05.54	5000 MB	172 MB
109	kecbungut.natunakab.go.id	103.150.22.242	05/05/2020 11.41	5000 MB	137 MB
110	kecmidai.natunakab.go.id	103.150.22.242	07/08/2019 08.25	5000 MB	300 MB
111	kecpulaulaut.natunakab.go.id	103.150.22.242	07/08/2019 08.04	5000 MB	215 MB
112	kecpulautiga.natunakab.go.id	103.150.22.242	07/08/2019 07.33	5000 MB	572 MB
113	kecpulautigabaratanatunakab.go.id	103.150.22.242	29/09/2019 12.14	5000 MB	490 MB
114	kecserasan.natunakab.go.id	103.150.22.242	15/01/2021 07.20	5000 MB	184 MB
115	kecserasantimuranatunakab.go.id	103.150.22.242	02/05/2020 05.43	5000 MB	486 MB
116	kecsuakmidai.natunakab.go.id	103.150.22.242	09/08/2019 07.25	5000 MB	124 MB
117	kecsubi.natunakab.go.id	103.150.22.242	13/05/2020 11.06	5000 MB	103 MB
118	kelurahansedanau.natunakab.go.id	103.150.22.242	16/11/2017 10.05	5000 MB	121 MB
119	kesbangpol.natunakab.go.id	103.150.22.242	23/01/2019 11.26	5000 MB	217 MB
120	kesra.natunakab.go.id	103.150.22.242	26/02/2021 07.40	5000 MB	5008 MB
121	kpptpm.natunakab.go.id	103.150.22.242	18/05/2017 00.00	5000 MB	561 MB
122	lapor.natunakab.go.id	103.150.22.242	08/08/2019 19.54	5000 MB	9 MB
123	mediacenterdesa.natunakab.go.id	103.150.22.242	03/07/2020 09.41	10240 MB	1045 MB
124	natunakab.go.id	103.150.22.242	18/05/2017 00.00	20000 MB	9561 MB
125	ngadu.natunakab.go.id	103.150.22.242	08/08/2017 16.55	5000 MB	31 MB

NO	Sub Domain	IP	Pembuatan	Kapasitas	Terpakai
126	opd.natunakab.go.id	103.150.22.242	24/05/2017 15.32	5000 MB	981 MB
127	pamsimas.natunakab.go.id	103.150.22.242	13/10/2020 20.23	5000 MB	107 MB
128	pkk.natunakab.go.id	103.150.22.242	18/05/2017 00.00	5000 MB	204 MB
129	pkmbungsel.natunakab.go.id	103.150.22.242	22/06/2021 16.11	5000 MB	468 MB
130	polpp.natunakab.go.id	103.150.22.242	03/03/2020 07.16	5000 MB	123 MB
131	ppid.natunakab.go.id	103.150.22.242	09/04/2019 13.05	5000 MB	5 MB
132	puskesmas-kelarik.natunakab.go.id	103.150.22.242	06/11/2019 12.23	5000 MB	1732 MB
133	puskesmasranai.natunakab.go.id	103.150.22.242	26/03/2020 20.10	5000 MB	635 MB
134	puskesmasserasantimur.natunakab.go.id	103.150.22.242	22/04/2020 05.44	5000 MB	131 MB
135	ranaikota.natunakab.go.id	103.150.22.242	11/06/2021 21.09	5000 MB	130 MB
136	rsud-old.natunakab.go.id	103.150.22.242	18/05/2017 00.00	5000 MB	753 MB
137	setda.natunakab.go.id	103.150.22.242	18/05/2017 00.00	5000 MB	1983 MB
138	setwan.natunakab.go.id	103.150.22.242	29/10/2018 08.04	5000 MB	3719 MB
139	sipetarung.natunakab.go.id	103.150.22.242	03/01/2022 10.15	5000 MB	40 MB
140	sipp.natunakab.go.id	103.150.22.242	25/06/2019 21.12	5000 MB	12 MB
141	smansa.natunakab.go.id	103.150.22.242	19/04/2018 00.46	5000 MB	258 MB
142	smpnsatappengadah.natunakab.go.id	103.150.22.242	28/09/2020 08.21	5000 MB	175 MB
143	statistik.natunakab.go.id	103.150.22.242	10/10/2017 09.04	5000 MB	580 MB
144	tnt.natunakab.go.id	103.150.22.242	17/11/2017 13.45	10240 MB	256 MB
145	training.natunakab.go.id	103.150.22.242	15/10/2018 08.11	5000 MB	1014 MB
146	ukpbj.natunakab.go.id	103.150.22.242	07/08/2019 11.32	5000 MB	410 MB

NO	Sub Domain	IP	Pembuatan	Kapasitas	Terpakai
147	untuktesting.com	103.150.22.242	18/05/2017 00.00	5000 MB	24 MB
148	web.natunakab.go.id	103.150.22.242	18/05/2017 00.00	5000 MB	288 MB

Tabel. 4. 4
Daftar Aplikasi Layanan Publik Tahun 2023

No	Nama Aplikasi	OPD Pengelola	Pengembang (Nama OPD/K/L/pihak ketiga)	OPD Pengguna	Penggunaan	Basis Aplikasi	Terdaftar KEMENDIKOMINFO
1	APLIKASI SIMNAKER	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Layanan Data Ketenagakerjaan	Web Application	
2	APLIKASI AYOKERJA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Kementerian Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Layanan Kartu Kuning (AK/1)	Web Application	
3	e-DMC	KEMENDES	KEMENDES	BPMPD	Memonitor proses dan hasil penginputan data sekaligus mengetahui kondisi desa	Android	
4	e-HDW	KEMENDES	KEMENDES	BPMPD	Kader Pembangunan Manusia untuk mendukung Desa dalam fasilitasi	Android	

No	Nama Aplikasi	OPD Pengelola	Pengembang (Nama OPD/K/L/pihak ketiga)	OPD Pengguna	Penggunaan	Basis Aplikasi	Terdaftar KEMENKOMINFO
					konvergensi pencegahan stunting		
5	Kampung KB https://kampungkb.bkkbn.go.id	BKKBN	BKKBN	DP3AP2KB Kabupaten Natuna	Untuk mengetahui Peningkatan Kualitas Hidup	Web Application	
6	LKPM Online https://lkponline.bkkbn.go.id	DPMPTSP	Badan Koordinasi Penanaman Modal	DPMPTSP	Aplikasi Laporan Kegiatan Penanaman Modal Secara online	Web Application	
7	Pamsimas https://pamsimas.natunakab.go.id	BP3D	BP3D	BP3d	Informasi dalam peningkatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat di Kepulauan Riau dan Kabupaten Natuna pada khususnya.	Web	
8	OSS (Online Single Submission)	DPMPTSP	Badan Koordinasi Penanaman Modal	DPMPTSP	Aplikasi Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Web Application	Terdaftar

No	Nama Aplikasi	OPD Pengelola	Pengembang (Nama OPD/K/L/pihak ketiga)	OPD Pengguna	Penggunaan	Basis Aplikasi	Terdaftar KEMENKOMINFO
9	SICANTIK CLOUD	DPMPPTSP	Kemenkominfo RI	DPMPPTSP	Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terpadu untuk Publik	Web Application	Terdaftar
10	BCARD (Manajemen Aplikasi Pencetakan)	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Kementerian Dalam Negeri	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Aplikasi Pencetakan KTP elektronik	Web Application	
11	Benroller (e-KTP)	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Kementerian Dalam Negeri	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Aplikasi Perekaman Biometrics Penduduk	Web Application	
12	KIA (Kartu Identitas Anak)	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Kementerian Dalam Negeri	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Kartu Identitas Anak	Bukan Aplikasi	
13	KTP-el (Bukan Aplikasi)	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Kementerian Dalam Negeri	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Kartu Identitas Penduduk	Bukan Aplikasi	
14	MBIET	Dinas Kependudukan dan Catatan	Kementerian Dalam Negeri	Dinas Kependudukan dan Catatan	Aplikasi Ekspor Data Perekaman Biometrics	Desktop Application	

No	Nama Aplikasi	OPD Pengelola	Pengembang (Nama OPD/K/L/pihak ketiga)	OPD Pengguna	Penggunaan	Basis Aplikasi	Terdaftar KEMENDIKOMINFO
		Sipil		Sipil			
15	NID Scheduler	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Kementerian Dalam Negeri	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Aplikasi Pengiriman Perekaman Biometricis	Web Application	
16	PAK MALAW	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Program Inovasi Pelayanan (Bukan Aplikasi)	Menggunakan Aplikasi Whatsapp	
17	SIAK Konsolidasi Pusat	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Kementerian Dalam Negeri	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Data Kependudukan	Web Application	
18	Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Kementerian Dalam Negeri	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Data Kependudukan	Web Application	
19	SISLAP HAR-COVID19 https://s.id/laporharia	Dinas Kesehatan	Kementerian Kesehatan	Ditjen P2P Kemenkes RI	Sistem Laporan Harian-Covid 19	Web	

No	Nama Aplikasi	OPD Pengelola	Pengembang (Nama OPD/K/L/pihak ketiga)	OPD Pengguna	Penggunaan	Basis Aplikasi	Terdaftar KEMENKOMINFO
	ncovid						
20	Online Data System	Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah	Kementerian Koperasi Dan Usaha	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	Untuk pengiriman data Koperasi	Web Application	
21	JDIH https://jdih.natunakab.go.id	KEMENKUMHAM	KEMENKUMHAM	Setda Bagian Hukum	Data Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Web	
22	PPID https://ppid.natunakab.go.id	KEMENDAGRI	KEMENDAGRI	Setda Bagian Prokopim	Layanan Informasi Publik	Web	
23	Pusake https://pusake.natunakab.go.id	Dinas Pariwisata	Dinas Pariwisata	Dinas Pariwisata	Data Pariwisata	Desktop dan web application VB 6	
24	PIP SD (Program Indonesia Pintar) https://pipsd.kemdikbud.go.id	Dinas Pendidikan	Kemendikbud	Dinas Pendidikan	Data penerima PIP tingkat SD	Web Application	

No	Nama Aplikasi	OPD Pengelola	Pengembang (Nama OPD/K/L/pihak ketiga)	OPD Pengguna	Penggunaan	Basis Aplikasi	Terdaftar KEMERKONOMINFO
25	PIP SMP (Program Indonesia Pintar) https://pip.kemdikbud.go.id	Dinas Pendidikan	Kemendikbud	Dinas Pendidikan	Data penerima PIP tingkat SMP	Web Application	
26	SISPENA (Sistem Penilaian Akreditasi Nasional) PAUD dan PNF	Dinas Pendidikan	Kemendikbud	Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna	Melakukan pendataan sekolah/madrasah yang hendak diakreditasi, melakukan pengiriman berkas-berkas / dokumen persyaratan akreditasi	Web Application	
27	Cek Dare	Provinsi Kepri	Provinsi Kepri	DP3AP2KB	dengan cara online	Web Application	Terdaftar
28	SP4N Laporan	KEMENPAN RB	KEMEN PAN RB	Semua OPD dan Penyedia	Pengaduan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Pengaduan masyarakat	Web Application	
29	Kusuka	Kementerian Kelautan dan	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Kementerian Kelautan dan	Kartu Pelaku Usaha Bidang Kelautan dan	Web Application	

No	Nama Aplikasi	OPD Pengelola	Pengembang (Nama OPD/K/L/pihak ketiga)	OPD Pengguna	Penggunaan	Basis Aplikasi	Terdaftar KEMENDIKOMINFO
		Perikanan		Perikanan	Perikanan		

Tabel 4.5
Daftar Sistem Elektronik Tahun 2023

No	Nama Aplikasi	OPD Pengelola	Pengembang (Nama OPD/K/L/ pihak ketiga)	OPD Pengguna	Kegunaan	Basis Aplikasi	Terdaftar Kemenkominfo
1	Aplikasi E-MONEV KESLING	Dinas Kesehatan	Kementerian Kesehatan	Ditjen Kesmas Kemenkes RI	Data Kesling	Web	
2	e-Monev	BP3D	BP3D	BP3D	Dokumentasi hasil monitoring dan realisasi fisik kegiatan pembangunan	Desktop application Web Application VB6 VB.Net	
3	e-Sakip Reviu	KEMENPAN RB	KEMENPAN RB	Semua OPD dan Penyedia Jasa	RPJMD, Renstra, PK, IKU, LKj, RKT, Rencana Aksi, Renja, Cascading	Web Application	
4	e-SPM	Dinas Kesehatan	Kementerian Kesehatan	Dinas Kesehatan	Laporan capaian kinerja berdasarkan indikator SPM bidang Kesehatan	Web Application	
5	Infis Sakip	Bagian Organisasi	BPKAD	Semua OPD dan Penyedia Jasa	Renstra, Sasaran Program, Sasaran Kegiatan, Realisasi Kegiatan dan Kinerja	Desktop application	
6	PMPRB	Inspektorat	KEMENPAN RB	Semua OPD dan Penyedia Jasa	Data evaluasi RB	Web Application	

No	Nama Aplikasi	OPD Pengelola	Pengembang (Nama OPD/K/L/ pihak ketiga)	OPD Pengguna	Kegunaan	Basis Aplikasi	Terdaftar Kemenkominfo
7	AP4G	Dinas Pendidikan	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Dinas Pendidikan	Penetapan peserta PPG	Web Application	
8	Aplikasi SiSDMK	Dinas Kesehatan	Kementerian Kesehatan	Ditjen PPSDM Kemenkes RI	Data SDM Kesehatan	Web	
9	NUPTK (Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan)	Dinas Pendidikan	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Dinas Pendidikan	Pelayanan Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK)	Web Application	
10	Persuratan/Administrasi (e-FORMASI III) url https://formasi.menpan.go.id/	BKPSDM	KEMENPAN RB	BKPSDM	Input data Bezzeting dan Usulan Formasi PNS	Web Application	
11	SIKEKAH (Sistem Informasi Kinerja Kepegawaian Daerah)	BKPSDM	BKPSDM	Seluruh OPD	Pencatatan aktivitas/kinerja pegawai	Web Application	
12	SIMONA	Bagian Organisasi	Kementerian Dalam Negeri	Bagian Organisasi	Anjab, ABK, Evjab, TPP, Nama Jabatan	Web Application	
13	SIM-PKB (Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan)	Dinas Pendidikan	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Dinas Pendidikan	Fasilitasi guru dalam melaksanakan PKB (Pengembangan Keprofesian yang Berkelanjutan)	Web Application	

No	Nama Aplikasi	OPD Pengelola	Pengembang (Nama OPD/K/L/ pihak ketiga)	OPD Pengguna	Kegunaan	Basis Aplikasi	Terdaftar Kemenkominfo
14	SIMTENDIK	Dinas Pendidikan	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Dinas Pendidikan	Pelayanan Diklat Calon Kepala Sekolah(CAKEP), Diklat Calon Pengawas Sekolah(CAWAS),Daftar Tenaga Administrasi Sekolah(TAS), Daftar Tenaga Laboratorium Sekolah, Daftar Tenaga PerpustakaanSekolah.	Web Application	
15	Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) Url https://sapk.bkn.go.id	BKPSDM	BKN	BKPSDM Kabupaten Natuna	Usulan Kenaikan Pangkat, Pensiun, Mutasi Pindah Instansi danPemberhentian PNS	Web Application	
16	Sistem Informasi Jabatan Pimpinan Tinggi (SIJAPTI) url http://sijapti.kasn.go.id/	BKPSDM	KASN	BKPSDM Kabupaten Natuna	Input Data Usul Seleksi Terbuka JPT Pratama dan Unggah	Web Application	
17	BOS	Dinas Pendidikan	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Dinas Pendidikan	Data rencana dan realisasi penggunaan Dana BOS	Web Application	
18	Income Point PBB-P2	BP2RD	BP2RD	BP2RD	Data pajak daerah pbb p2	Web Application	
19	Income Point Simapada	BP2RD	BP2RD	BP2RD	Data Pajak Daerah selain pbb dan bphbtb	Desktop application	

No	Nama Aplikasi	OPD Pengelola	Pengembang (Nama OPD/K/L/ pihak ketiga)	OPD Pengguna	Kegunaan	Basis Aplikasi	Terdaftar Kemenkominfo
20	iNFIS Desa	BPKAD	BPKAD	BPKAD	Data Transfer serta APBDes dan Laporan Desa	Web Application	
21	INFIS Perbendaharaan	BPKAD	BPKAD	Semua OPD	Data anggaran, data pendapatan, data belanja	Desktop application VB6 SQL Server	
22	iNFIS Sistem Akuntansi Pemerintahan	BPKAD	BPKAD	Semua OPD	Data anggaran, data pendapatan, data belanja, data penyesuaian, data BMD	Desktop application VB6 Database SQL Server	
23	Realisasi Simapada	BP2RD	BP2RD	BP2RD	Data Pajak Daerah selain pbb dan bphtb	Desktop application	
24	SIM Aneka Tunjangan Guru Dikdas	Dinas Pendidikan	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Dinas Pendidikan	Penetapan tunjangan guru tingkat Dikdas	Web Application	
25	SIM Aneka Tunjangan Guru Paudni	Dinas Pendidikan	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Dinas Pendidikan	Penetapan tunjangan guru tingkat Paud	Web Application	

No	Nama Aplikasi	OPD Pengelola	Pengembang (Nama OPD/K/L/ pihak ketiga)	OPD Pengguna	Kegunaan	Basis Aplikasi	Terdaftar Kemenkominfo
26	Simatun Dikdas	Dinas Pendidikan	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Dinas Pendidikan	Usulan tunjangan profesi guru tingkat Dikdas	Web Application	
27	Simatun Paud	Dinas Pendidikan	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Dinas Pendidikan	Usulan tunjangan profesi guru tingkat PAUD	Web Application	
28	Simbar	Dinas Pendidikan	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Dinas Pendidikan	Data untuk Verifikasi Pembayaran	Web Application	
29	iNFIS RUP/Tepra	Sekretariat Daerah Bagian Pembangunan	Sekretariat Daerah Bagian Pembangunan	Sekretariat Daerah Bagian Pembangunan	Data paket pengadaan barang dan jasa	Web Application	
30	SPSE 4.3	Sekretariat Daerah Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	LKPP RI	Semua OPD dan Penyedia Jasa	Proses Pengadaan Barang/Jasa (Tender, Non Tender, Swakelola dan Pencatatan)	Web application	Terdaftar

No	Nama Aplikasi	OPD Pengelola	Pengembang (Nama OPD/K/L/ pihak ketiga)	OPD Pengguna	Kegunaan	Basis Aplikasi	Terdaftar Kemenkominfo
31	SIMHP PEMDA (Sistem Informasi Manajemen Hasil Pengawasan Pemerintah Daerah)	Inspektorat	BPKP	Inspektorat	Data Tim Audit, Nomor LHP, Tanggal LHP, Nama Auditan, Temuan Audit, Penyebab Permasalahan, Saran-saran/Rekomendasi, Tindak Lanjut Rekomendasi, Perkembangan tindak lanjut dan Status Tindak Lanjut	Desktop application	
32	SIPTL (Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut)	Inspektorat	BPK	Inspektorat	Nomor LHP, Tanggal LHP, Tahun Audit, Temuan Audit, Saran-saran/Rekomendasi, Tindak Lanjut, perkembangan tindak lanjut dan Status Tindak Lanjut	Web Application	
33	Aplikasi ASPAK	Dinas Kesehatan	Kementerian Kesehatan	Ditjen Penunjang Medik Kemenkes RI	Data Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan	Web	
34	iNFIS Barang Milik Daerah	BPKAD	BPKAD	Semua OPD	Penyusunan RKBMD dan KIB	Desktop application VB6 Database SQL Server	

No	Nama Aplikasi	OPD Pengelola	Pengembang (Nama OPD/K/L/ pihak ketiga)	OPD Pengguna	Kegunaan	Basis Aplikasi	Terdaftar Kemenkominfo
35	SIMADA (Sistem Informasi Manajmen Data Kefarmasian)	Dinas Kesehatan	Kementerian Kesehatan	Ditjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kemenkes RI	Data Sarana Farmasi, Instalasi Farmasi, DAK Farmasi, Tenaga Farmasi	Web	
36	e-KRISNA	BP3D	Kementerian PPN/Bappenas dan BP3D	BP3D dan Dinas Kesehatan	Usulan Kegiatan OPD, Data Kualitatif dan Kuantitatif	Web Application	
37	e-Proposal	Dinas Pertanian	Kementerian Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Dinas Pertanian	Proposal usulan kegiatan	Web Application	
38	e-Renggar	Biro Perencanaan dan anggaran kemenkes RI	Biro Perencanaan dan anggaran kemenkes RI	Dinas Kesehatan	Entry usulan kegiatan dan laporan realisasi anggaran sumber DAK bidang kesehatan, data kualitatif dan kuantitatif	Web Application	
39	e-RKAS	Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Dinas Pendidikan		Web Application	
40	INFIS Anggaran	BPKAD	BPKAD	Semua OPD	Penyusunan KUA/PPAS sampai dengan Perda dan Perkada APBD	Desktop application VB6 Database SQL Server	
41	Infis Perencanaan	BP3D	BP3D	Seluruh OPD, Desa, dan	Entry usulan program dan kegiatan dari tahap Musrenbang sampai	Desktop dan web	

No	Nama Aplikasi	OPD Pengelola	Pengembang (Nama OPD/K/L/ pihak ketiga)	OPD Pengguna	Kegunaan	Basis Aplikasi	Terdaftar Kemenkominfo
				Anggota DPRD	dengan RKPD dan Renja OPD	application ; VB 6	
42	Morena	Pemerintah Pusat	BKKBN	DP3AP2KB Kabupaten Natuna	Pengajuan Dana DAK	Web Application	
43	PASTI (Permohonan Akses Telekomunikasi dan Informasi)/e- USO	BAKTI KEMENKOMINF O	KEMENKOMINFO	Diskominfo	Permohonan usulan akses telekomunikasi dan informasi pada program Penyediaan BTS/AI	Web Application	
44	Perencanaan Berbasis Elektronik (PBE)	Dinas Kesehatan	Kementerian Kesehatan	Dinas Kesehatan	Usulan Kegiatan dan Realisasi, OPD, Data Kualitatif dan Kuantitatif	Web Application	
45	SDGs	BP3D	BP3D	BP3D	Data SDGs (Sustainable Development Goals) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kabupaten Natuna	Desktop dan web application VB 6	
46	SIGA	BKKBN	BKKBN	DP3AP2KB	Sebagai alat monitoring dan dasar perencanaan, pengukuran kinerja dan peta kerja	Web Application	
47	SIM RS	RSUD	RSUD	RSUD	Data perencanaan dan keuangan BLUD	Desktop application	

No	Nama Aplikasi	OPD Pengelola	Pengembang (Nama OPD/K/L/ pihak ketiga)	OPD Pengguna	Kegunaan	Basis Aplikasi	Terdaftar Kemenkominfo
48	SIMDAK (Sistem Informasi Manajemen DAK) BOP PAUD	Dinas Pendidikan	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Dinas Pendidikan	Informasi Manajemen DAK	Web Application	
49	APLIKASI GIZI TERPADU https://sigiziterpadu.gizi.ke-menkes.go.id	Dinas Kesehatan	Kementerian Kesehatan	Dinas Kesehatan	Data Gizi Terpadu	Web Application	
50	APLIKASI PKH https://epkh.kemensos.go.id	Dinas Sosial	Kementerian Sosial	Dinas Sosial	Data Program Keluarga Harapan	Web application	
51	APLIKASI SIKS-NG https://siks-ng.kemensos.go.id	Dinas Sosial	Kementerian Sosial	Dinas Sosial	Data Terpadu Kesejahteraan Sosial	Web application	
52	Aplikasi SIPTM https://p2ptm.kemkes.go.id	Dinas Kesehatan	Kementerian Kesehatan	Ditjen P2P Kemenkes RI	Data Penyakit Tidak Menular	Web	
53	Aplikasi Siskohatkes https://siskohatkes.kemkes.go.id	Dinas Kesehatan	Kementerian Kesehatan	Dinas Kesehatan	Pengelolaan kesehatan jamaah haji Indonesia	Web application	
54	Aplikasi SISMaI Online https://sismal.malaria.id	Dinas Kesehatan	Kementerian Kesehatan	Dinas Kesehatan	Pengolahan program malaria/sistem pencatatan dan pelaporan surveilans malaria	Web application	
55	BIOUN KESETARAAN (Paket A,	Dinas Pendidikan	Kemendikbud	Dinas Pendidikan	Sarana untuk upload data peserta UN	Web	

No	Nama Aplikasi	OPD Pengelola	Pengembang (Nama OPD/K/L/ pihak ketiga)	OPD Pengguna	Kegunaan	Basis Aplikasi	Terdaftar Kemenkominfo
	B, C)					Application	
56	BIOUN SD/MI https://biosd.kemdikbud.go.id/akm2021/	Dinas Pendidikan	Kemendikbud	Dinas Pendidikan	Sarana untuk upload data peserta UN SD/MI	Web Application	
57	BIOUN SMP/MTS https://biounsmp.kemdikbud.go.id	Dinas Pendidikan	Kemendikbud	Dinas Pendidikan	Sarana untuk upload data peserta UN SMP/MTs	Web Application	
58	BPHTB	BP2RD	BP2RD	BP2RD	Data Pajak bphtb. integrasi hist to host dengan BPN	Web Application	
59	DAPODIK (Data Pokok Pendidikan) PAUD dan DIKMAS https://dapo.paud-dikmas.kemdikbud.go.id	Dinas Pendidikan	Kemendikbud	Dinas Pendidikan	Data Pokok Pendidikan PAUD dan DIKMAS	Web Application	
60	DAPODIK (Data Pokok Pendidikan) SD dan SMP https://sp.datadik.kemdikbud.go.id	Dinas Pendidikan	Kemendikbud	Dinas Pendidikan	Data Pokok Pendidikan SD, SMP	Web Application	
61	Database Perikanan	Dinas Perikanan	Dinas Perikanan	Dinas Perikanan	Data Perikanan akses ke Kementerian	Web	
62	Datacenter	BPMPD	BPMPD	BPMPD	Data Desa	Web	

No	Nama Aplikasi	OPD Pengelola	Pengembang (Nama OPD/K/L/ pihak ketiga)	OPD Pengguna	Kegunaan	Basis Aplikasi	Terdaftar Kemenkominfo
63	eKusta	Kementerian Kesehatan RI	Kementerian Kesehatan	Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna	Data laporan kejadian kusta yang diperoleh dari laporan puskesmas	Web Application	
64	epcare https://ep-care.com	Dinas Kesehatan	BPJS Kesehatan	Dinas Kesehatan	Informasi tentang pelayanan pasien terkait skrining atau riwayat kesehatan pasien yang meliputi kolom pendaftaran pasien, terapi pengobatan, diagnosa dan pelayanan laboratorium.	Web Application	
65	e-Profil Promkes https://promkes.kemkes.go.id	Dinas Kesehatan	Kementerian Kesehatan	Dinas Kesehatan	Laporan cakupan indikator promosi kesehatan skala tahunan	Web Application	
66	eRDKK https://erdkk.pertanian.go.id	Dinas Pertanian	Kementerian Pertanian	Dinas Pertanian	Pengajuan usulan pupuk subsidi	Web Application	
67	e-Siknas https://komdat.kemkes.go.id	Dinas Kesehatan	Kementerian Kesehatan	Dinas Kesehatan	Laporan Data Kesehatan Bulanan dan Tahunan	Web Application	
68	e-SITT https://sitt.kemkes.go.id	Dinas Kesehatan	Kementerian Kesehatan	Dinas Kesehatan	Laporan Data Kasus TB	Web Application	
69	evisum https://evisum.bkkbn.go.id	BKKBN	BKKBN	DP3AP2KB	Penyuluhan tentang KB	Web Application	

No	Nama Aplikasi	OPD Pengelola	Pengembang (Nama OPD/K/L/ pihak ketiga)	OPD Pengguna	Kegunaan	Basis Aplikasi	Terdaftar Kemenkominfo
70	eWars https://skdr.surveilans.org	Kmentrian Kesehatan RI	Kementerian Kesehatan	Dinas Kesehatan	Data Penyakit menular yang diperoleh dari pasien yang berkunjung ke puskesmas setiap hari	Web Application	
71	GIS-PBB	BP2RD	BP2RD	BP2RD	Data Peta tanah	Desktop application	
72	PMP (Pemetaan Mutu Pendidikan) DIKDAS <a href="https://pmp.dikdasmen.ke
mdikbud.go.id/">https://pmp.dikdasmen.ke mdikbud.go.id/	Dinas Pendidikan	Kemendikbud	Dinas Pendidikan	Isian Kuisisioner Raport Mutu Sekolah	Web Application	
73	Profil Desa	BPMPD	BPMPD	BPMPD	Informasi data desa	Web	
74	Satu Data https://satudata.kkp.go.id	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Dinas Perikanan	Data Perikanan akses ke Kementerian	Desktop	
75	SIBAKSO https://sibakso.natunakab. go.id	Dinas Sosial	Dinas Sosial	Dinas Sosial	Data Penerima Bantuan Sosial	Web Application	
76	SiGa https://siga.bkkbn.go.id	BKKBN	BKKBN	DP3AP2KB	Data Informasi Keluarga	Web Application	
77	SIMEP https://simepkpai.com	Kementerian PPA	Kementerian PPA	DP3AP2KB	Evaluasi Keseriusan dalam Perlindungan Anak	Web Application	

No	Nama Aplikasi	OPD Pengelola	Pengembang (Nama OPD/K/L/ pihak ketiga)	OPD Pengguna	Kegunaan	Basis Aplikasi	Terdaftar Kemenkominfo
78	Simfoni PPPA https://kekerasan.kemenpppa.go.id	Kementerian PPA	Kementerian PPA	DP3AP2KB	Pencatatan dan Pelaporan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	Web Application	
79	SIMLUHTAN https://simluhtan.aplikasi.clinick	Dinas Pertanian	Kementerian Pertanian	Dinas Pertanian	Data Kelompok Tani dan Penyuluh	Web Application	
80	SINOVIK https://sinovik.menpan.go.id	KEMENPAN RB	KEMENPAN RB	Semua OPD dan Penyedia Jasa	Proposal inovasi, video inovasi	Web Application	
81	SIPEDIK (Sistem Informasi Pemerintahan Desa se-Kabupaten Natuna)	BPMPD	BPMPD	BPMPD	Informasi pemerintahan desa se-Kabupaten Natuna	Web Application	
82	UBK (Ujian Berbasis Komputer Daring) https://ubk.kemdikbud.go.id/ubkd/	Dinas Pendidikan	Kemendikbud	Dinas Pendidikan	Manajemen Ujian Berbasis Komputer Daring	Web Application	
83	SIPP https://sipp.menpan.go.id	KEMENPAN RB	KEMENPAN RB	Semua OPD dan Penyedia Jasa	SP, Maklumat Pelayanan, IKM	Web Application	
84	Sistem Informasi Kabupaten Natuna Sehat https://natunasehat.natunakab.go.id	BP3D	BP3D	- Tim Pembina Kabupaten Kota Sehat	Kegiatan Kabupaten Sehat yang dilaksanakan dari Pokja Desa/Kelurahan Sehat, Forum Kecamatan Sehat, Forum Kabupaten	Web Application	

No	Nama Aplikasi	OPD Pengelola	Pengembang (Nama OPD/K/L/ pihak ketiga)	OPD Pengguna	Kegunaan	Basis Aplikasi	Terdaftar Kemenkominfo
					Sehat dan Kegiatan Tim Pembina Kota Sehat yang berhubungan dengan Tataan yang dipilih		
85	APLIKASI SIMNAKER	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Layanan Data Ketenagakerjaan	Web Application	
86	APLIKASI AYOKERJA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Kementerian Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Layanan Kartu Kuning (AK/1)	Web Application	
87	e-DMC	KEMENDES	KEMENDES	BPMPD	Memonitor proses dan hasil penginputan data sekaligus mengetahui kondisi desa	Android	
88	e-HDW	KEMENDES	KEMENDES	BPMPD	Kader Pembangunan Manusia untuk mendukung Desa dalam fasilitasi konvergensi pencegahan stunting	Android	
89	Kampung KB https://kampungkb.bkkbn.go.id	BKKBN	BKKBN	DP3AP2KB Kabupaten Natuna	Untuk mengetahui Peningkatan Kualitas Hidup	Web Application	

No	Nama Aplikasi	OPD Pengelola	Pengembang (Nama OPD/K/L/ pihak ketiga)	OPD Pengguna	Kegunaan	Basis Aplikasi	Terdaftar Kemenkominfo
90	LKPM Online https://lkpmonline.bkkbn.go.id	DPMPTSP	Badan Koordinasi Penanaman Modal	DPMPTSP	Aplikasi Laporan Kegiatan Penanaman Modal Secara online	Web Application	
91	Pamsimas https://pamsimas.natunakab.go.id	BP3D	BP3D	BP3d	Informasi dalam peningkatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat di Kepulauan Riau dan Kabupaten Natuna pada khususnya.	Web	
92	OSS (Online Single Submission)	DPMPTSP	Badan Koordinasi Penanaman Modal	DPMPTSP	Aplikasi Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Web Application	
93	SICANTIK CLOUD	DPMPTSP	Kemenkominfo RI	DPMPTSP	Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terpadu untuk Publik	Web Application	Terdaftar
94	BCARD (Manajemen Aplikasi Pencetakan)	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Kementerian Dalam Negeri	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Aplikasi Pencetakan KTP elektronik	Web Application	
95	Benroller (e-KTP)	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Kementerian Dalam Negeri	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Aplikasi Perekaman Biometrics Penduduk	Web Application	

No	Nama Aplikasi	OPD Pengelola	Pengembang (Nama OPD/K/L/ pihak ketiga)	OPD Pengguna	Kegunaan	Basis Aplikasi	Terdaftar Kemenkominfo
96	MBIET	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Kementerian Dalam Negeri	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Aplikasi Ekspor Data Perekaman Biometrics	Desktop Application	
97	NID Scheduler	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Kementerian Dalam Negeri	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Aplikasi Pengiriman Perekaman Biometrics	Web Application	
98	SIK Konsolidasi Pusat	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Kementerian Dalam Negeri	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Data Kependudukan	Web Application	
99	Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Kementerian Dalam Negeri	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Data Kependudukan	Web Application	
100	SISLAPHAR-COVID19 https://s.id/laporhariancovid	Dinas Kesehatan	Kementerian Kesehatan	Ditjen P2P Kemenkes RI	Sistem Laporan Harian-Covid 19	Web	
101	Online Data System	Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah	Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	Untuk pengiriman data Koperasi	Web Application	

No	Nama Aplikasi	OPD Pengelola	Pengembang (Nama OPD/K/L/ pihak ketiga)	OPD Pengguna	Kegunaan	Basis Aplikasi	Terdaftar Kemendikbud
				Kabupaten Natuna			
102	JDIH https://jdih.natunakab.go.id	KEMENKUMHAM	KEMENKUMHAM	Setda Bagian Hukum	Data Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Web	Terdaftar
103	PPID https://ppid.natunakab.go.id	KEMENDAGRI	KEMENDAGRI	Setda Bagian Prokopim	Layanan Informasi Publik	Web	Terdaftar
104	Pusake https://pusake.natunakab.go.id	Dinas Pariwisata	Dinas Pariwisata	Dinas Pariwisata	Data Pariwisata	Desktop dan web application VB 6	
105	PIP SD (Program Indonesia Pintar) https://pipsd.kemdikbud.go.id	Dinas Pendidikan	Kemendikbud	Dinas Pendidikan	Data penerima PIP tingkat SD	Web Application	
106	PIP SMP (Program Indonesia Pintar) https://pip.kemdikbud.go.id	Dinas Pendidikan	Kemendikbud	Dinas Pendidikan	Data penerima PIP tingkat SMP	Web Application	

No	Nama Aplikasi	OPD Pengelola	Pengembang (Nama OPD/K/L/ pihak ketiga)	OPD Pengguna	Kegunaan	Basis Aplikasi	Terdaftar Kemenkominfo
107	SISPENA (Sistem Penilaian Akreditasi Nasional) PAUD dan PNF	Dinas Pendidikan	Kemendikbud	Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna	Melakukan pendataan sekolah/madrasah yang hendak diakreditasi, melakukan pengiriman berkas-berkas / dokumen persyaratan akreditasi dengan cara online	Web Application	
108	Cek Dare	Provinsi Kepri	Provinsi Kepri	DP3AP2KB	Pengaduan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	Web Application	
109	SP4N Lapor	KEMENPAN RB	KEMENPAN RB	Semua OPD dan Penyedia Jasa dan masyarakat	Pengaduan masyarakat	Web Application	Terdaftar
110	SIPD	Kementerian Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri	Semua OPD	Perencanaan dan Penganggaran	Web Application	Terdaftar
111	Kusuka	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Kartu Pelaku Usaha Bidang Kelautan dan Perikanan	Web Application	
112	Siepuan	Siepuan	Dinas Pemberdaya Perempuan Perlindungan Anak dan KB	Dinas Pemberdaya Perempuan Perlindungan Anak dan KB	Pelaku Usaha dan Jenis Usaha yang di Jual Beli Usaha	Web	

No	Nama Aplikasi	OPD Pengelola	Pengembang (Nama OPD/K/L/ pihak ketiga)	OPD Pengguna	Kegunaan	Basis Aplikasi	Terdaftar Kemenkominfo
113	Satistik Natuna	Satistik Natuna	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	Data Statistik Sektoral	Web	

➔ **Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** dengan kegiatan :

a) Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Input dana sebesar	Rp	1.970.955, 00-	
Realisasi sebesar	Rp	1.970.955, 00-	(100.00%)

Menghasilkan Output :

Jumlah Laporan : 1 Dokumen

b) Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintah Berbasis Elektronik

Input dana sebesar	Rp	399.457.000, 00-	
Realisasi sebesar	Rp	365.987. 479, 98-	(91.62%)

Menghasilkan Output :

Jumlah dokumen hasil sinkronisasi pengelolaan rencana induk dan anggaran pemerintah berbasis elektronik

c) Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah

Input dana sebesar	Rp	63.676.000,00-	
Realisasi sebesar	Rp	20.100.100 ,00-	(31,57%)

Menghasilkan Output :

Jumlah pusat data pemerintahan daerah yang dikelola

d) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE

Input dana sebesar	Rp	127.358.000,00-	
Realisasi sebesar	Rp	114.733.240, 00-	(90,09%)

Menghasilkan Output :

Jumlah Laporan Monitoring, evaluasi dan pelaporan pengembangan ekosistem SPBE

Hasil pelaksanaan capaian kinerja outcome/output program/kegiatan APBD Kabupaten Natuna Tahun 2017 – 2020 dapat dilihat pada table 4.5.

B. HASIL CAPAIAN PROGRAM RPJMD 2021-2025 TAHUN 2022 - 2026

Hasil capaian program RPJMD 2021-2026 melalui pelaksana RKPD tahun 2017 - 2020 dapat dilihat pada tabel 4.6.

C. HASIL CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2022 - 2026

Indikator kinerja daerah sebagai alat untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif merupakan gambaran yang mencerminkan capaian indikator kinerja program (*outcomes*/hasil) dari kegiatan (*output*/keluaran). Selain itu, indikator kinerja program merupakan cerminan sebuah fungsi dari keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung) dimana pengukuran indikator “hasil” lebih utama daripada sekedar “keluaran” karena “hasil” (*outcomes*) menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Indikator kinerja akan dapat dijadikan sebagai media perantara untuk memberi gambaran tentang pencapaian dari perencanaan suatu organisasi yang diharapkan di masa mendatang.

Hasil capaian indikator kinerja pembangunan daerah tahun 2017 – 2021 dapat dilihat pada tabel 4.7.

D. PELAKSANA PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

Program/Kegiatan dan target kinerja Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan pada Tahun 2023 (Berdasarkan APBD 2023/DPA 2023) dapat dilihat pada tabel 4.8.

E. PELAKSANAAN KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA

Pelaksanaan kerjasama dengan pihak ketiga pada tahun 2023 adalah:

- a. Kerja sama antara Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna dengan Balai Sertifikat Elektronik dan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor : PKS-SE/DISKOMINFO-EGOV/NATUNA/VIII/2021/01 dan Nomor : PERJ.86/BSSN/BS/KH.02.01/08/2021 , dalam kerja sama ini bertujuan diantaranya adalah :
 1. Penyediaan infrastruktur teknologi informasi yang mendukung penerapan Sertifikat Elektronik
 2. Penerbitan Sertifikat Elektronik
 3. Pemanfaatan Sertifikat Elektronik dalam Sistem Elektronik
 4. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia dalam pemanfaatan Sertifikat Elektronik.

- b. Kerjasama Lembaga Penyiaran Publik RRI Ranai dengan Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Natuna tentang Siaran Dialog Dan Spot Iklan “ Kopi Pagi ”. Nomor: 001/PKS/DISKOMINFO-PIKP/I/2022 dan Nomor : 03/RRI.RN/LPU.PKS/1/2019. Dalam kerjasama ini bertujuan mengoptimalkan penyampaian informasi publik melalui konsep penyajian yang menarik.
- c. Kerjasama antara Dinas Komunikasi dan Informatika dengan PT Telekomunikasi Indonesia Nomor : SP/Inet Pemkab Natuna-IP Transit/Kominfo Natuna/III/2024/01 diantara tujuannya adalah penyediaan IP Transit dan Penyediaan Akses Internet untuk Pemerintah Kabupaten Natuna

F. PELAKSANAAN INOVASI PERANGKAT DAERAH

“Ngobrol Bareng Kominfo (NBK)” merupakan program inovasi daerah dari Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Natuna,

“NBK” adalah sebuah Inovasi pemerintah daerah dalam hal Pengelolaan Apsirasi dan Opini Publik. “NBK” hadir sebagai salah satu bentuk pelayanan publik dalam mengakomodir opini, isu dan aspirasi yang sedang menjadi perbincangan hangat di masyarakat Kabupaten Natuna, atau isu yang sedang viral di media sosial. Mengikuti kemajuan teknologi dengan memanfaatkan media penyiaran visual dikombinasikan dengan media sosial.

“NBK” merupakan sebuah wadah diskusi untuk membahas isu atau topik hangat yang sedang berkembang di tengah masyarakat Natuna dan menghadirkan narasumber yang tepat dengan harapan dapat memberikan solusi atau jalan keluar dari sebuah permasalahan dan bermanfaat di masyarakat.



Gambar 4. 1
Dokumentasi acara Ngobrol Bareng Kominfo



Gambar 4. 2
Leaflet Ngobrol bareng Kominfo



Gambar 4. 3
Leaflet Kopi Pagi

G. REKOMENDASI RENCANA PEMBANGUNAN TAHUN 2023

Rekomendasi dan tindak lanjut untuk Rencana Pembangunan tahun 2023 berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan Pembangunan 2022 dapat dilihat pada tabel4.9.

Tabel 4.6

LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 – 2023

No	Nama Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	REALISASI																	Permasalahan	Permasalahan/ Tindak Lanjut									
			2021			2022			2023			2021			2022			2023												
			Output/ Outcome	Anggaran (Rp)		Output/ Outcome	Anggaran (Rp)		Output/ Outcome	Anggaran (Rp)		Output/ Outcome	Anggaran (Rp)		Output/ Outcome	Anggaran (Rp)		Output/ Outcome	Anggaran (Rp)											
6	7		8	9		10	11		14	15		16	17		18	19		24	25		26	27		28	29		34	35		
I	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Predikat/Nilai Akuntabilitas	80 %	75.086.254		86 %	30.611.300				12 Bulan	347.424.800		81,01 %	10.138.543				15	462,70	94	33,12								
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan SKPD	2 Dokumen	11.360.000							0 Dokumen	6.050.000							0	53,26										
2	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Kinerja SKPD	2 Laporan	9.000.000							3 Laporan	7.450.000							150	82,78										
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan				2 Laporan	30.611.300							2 Laporan	10.138.543						100	33,12								
II	Administrasi Pemanfaatan Barang Milik Daerah	Jumlah Bulan Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	27.363.127							12 Bulan	27.355.000							100	99,97										
1	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Bulan Penyediaan Alat Tulis Kantor	12 Bulan	27.363.127							12 Bulan	27.355.000							100	99,97										
III	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				12 Bulan	2.534.262.533							9 Bulan	2.093.285.909						75	82,60								
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai				26 Orang	2.534.262.533							23 %	2.093.285.909						88	82,60								
IV	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Kehadiran Pegawai	75 %	-		95 Persen	20.500.000				76,19 %	-		98 %	50.750.000				102	-	103	247,56								
1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Bimbingan Teknis	3 Orang	-		4 Orang	20.500.000				0 Orang	-		0 Orang	1.163.174				0	-	-	5,67								
V	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Sarana Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	411.464.215		75 %	375.210.363				12 Bulan	160.034.900		12 Bulan	206.475.170				100	38,89	16	55,03								
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				1 Paket	67.624.283							3 Paket	21.135.500						300	31,25								
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4 Jenis	200.000.000		1 Paket	-				4 Jenis	-		0 Paket	19.800.000				100	0,00	-	-								
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 Bulan	6.000.000		2 Paket	10.000.000				12 Bulan	4.436.000		2 Paket	4.224.000				100	73,93	100	42,24								
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Kantor	Jumlah Penyediaan Penggandaan Kantor	12 Bulan	31.000.000		9000 Paket	20.250.000				12 Bulan	30.984.000		9500 Paket	11.725.000				100	99,95	106	57,90								

No	Nama Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	REALISASI																		Permasalahan	Permasalahan/ Tindak Lanjut						
			2021		2022		2023		2021		2022		2023		2021		2022		2023									
			Output/ Outcome	Anggaran (Rp)	Output/ Outcome	Anggaran (Rp)	Output/ Outcome	Anggaran (Rp)	Output/ Outcome	Anggaran (Rp)	Output/ Outcome	Anggaran (Rp)	Output/ Outcome	Anggaran (Rp)	Output/ Outcome	Anggaran	Output/ Outcome	Anggaran	Output/ Outcome	Anggaran								
1	2	3	6	7	8	9	10	11	14	15	16	17	18	19	24	25	26	27	28	29	34	35						
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 Bulan	10.000.000	120 Dokumen	-				12 Bulan	7.200.000	0 Paket	-							100	72,00	-	-					
6	Penyediaan Bahan / Material	Jumlah Jenis Penyediaan Bahan/Material			10 Paket	27.000.000						3 Paket	16.927.000								30	62,69						
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	57 OK	164.464.215	50 Laporan	250.336.080				76 OK	117.414.900	62 Laporan	132.663.670							133	71,39	124	52,99					
8	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Arsip Dinamis yang Disusun			0 Dokumen	-						0 Dokumen	-								-	-						
VI	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	12 Bulan	660.598.039	85 %	715.055.070				12 Bulan	626.030.893	119 %	539.946.901							100	94,77	140	75,51					
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Materai Kantor	12 Bulan	9.600.000	830 Laporan	72.372.232				12 Bulan	9.600.000	1000 Laporan	23.263.250							100	100,00	120	32,14					
2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jenis Tagihan Internet, Air dan Listrik Kantor	12 Bulan	17.000.000	2 Laporan	63.500.000				12 Bulan	10.276.993	12 Laporan	22.501.419							100	60,45	600	35,44					
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Honorir/PTT	22 Orang	633.998.039	26 Laporan	579.182.838				25 Orang	606.153.900	26 Laporan	494.182.232							114	95,61	100	85,32					
VII	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Aparatur yang Bersertifikasi	75 %	45.000.000	75 %	93.775.000				73 %	2.950.000	42,03 %	4.500.000							97	6,56	56	4,80					
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Lapangan yang Dipelihara	2 Unit	37.500.000	2 Unit	71.775.000				2 Unit	24.544.800	14 Unit	39.095.125							100	65,45	700	54,47					
2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor yang Dipelihara	12 Bulan	7.500.000	1 Gedung	22.000.000				12 Bulan	2.950.000	0 Gedung	4.500.000							100	39,33	-	20,45					
VII 1	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Masyarakat yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan dan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah	69,77 %	205.062.600	49481	3.598.160.567				45,65 %	168.098.600	36176	2.769.176.550							65	81,97	73	76,96					
1	Monitoring dan Aspirasi Publik	Jumlah opini publik yang di kelola	20 Aspirasi/ Opini Publik	109.162.600	60 Dokumen	130.382.000				57 Aspirasi/ Opini Publik	89.541.850	30 Dokumen	39.181.550							285	82,03	50	30,05					
2	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah berita/informasi yang dipublikasikan	360 Artikel	67.080.000	600 Dokumen	3.363.086.567				333 Artikel	50.681.350	409 Dokumen	2.718.106.000							93	75,55	68	80,82					
3	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah OPD yang Menyenggarakan Layanan Informasi dan Dokumentasi yang dapat diakses Masyarakat	12 Laporan	-	10 Dokumen	59.948.000				0 Laporan	-	10 Dokumen	11.889.000							0	-	100	19,83					
4	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Komunitas Masyarakat/ Mitra Strategi Pemerintah	1 Kelompok	28.820.000	6 Dokumen	44.744.000				1 Kelompok	27.875.400	0 Dokumen	-							100	96,72	-	0,00					

Kurang tersedianya jurnalis sehingga berita/artikel yang dihasilkan tidak sesuai dengan target yang diharapkan

- Menambah tenaga jurnalis
- Perlu nya pelatihan/diklat jurnalis
- Memberikan target kepada jurnalis yang dibina oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dengan mutu pemberitaan yang lebih baik dan menambah jurnalis di luar Diskominfo (KIM dan Wartawan Senior)

No	Nama Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	REALISASI								CAPAIAN (%)								Permasalahan	Permasalahan/ Tindak Lanjut			
			2021		2022		2023		2021		2022		2023		2021		2022				2023		
			Output/ Outcome	Anggaran (Rp)	Output/ Outcome	Anggaran (Rp)	Output/ Outcome	Anggaran (Rp)	Output/ Outcome	Anggaran (Rp)	Output/ Outcome	Anggaran (Rp)	Output/ Outcome	Anggaran (Rp)	Output/ Outcome	Anggaran	Output/ Outcome	Anggaran			Output/ Outcome	Anggaran	
1	2	3	6	7	8	9	10	11	14	15	16	17	18	19	24	25	26	27	28	29	34	35	
		Daerah yang Menyebarkan Informasi dan Kebijakan Pemerintah																					
IX	Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat Daerah yang Terkoneksi Jaringan Intra Pemerintah atau Menggunakan Akses Internet yang Diamankan oleh Dinas Kominfo	55,46 %	2.673.828.000	50 %	118.365.000			77,24 %		34,02 %	542.700.482			139	0,00	68	458,50					
1	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/ Kota	Jumlah Layanan			2 Jumlah Pendaftaran	118.365.000					3 Jumlah Pendaftaran	25.282.760					150	21,36					
2	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna			160 Dokumen	47.683.000					291 Dokumen	28.854.463					182	60,51					
3	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Terkoneksi Jaringan Intra Pemerintah atau Menggunakan Akses Internet yang Diamankan oleh Dinas Kominfo	2 OPD	2.673.828.000	3 Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	2.272.292.000			2 OPD	2.046.175.022	38 Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	488.563.259			100	76,53	1.267	21,50					
X	Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan SPBE (Layanan Publik dan Layanan Administrasi Pemerintahan) yang Tercantum Dalam Dokumen Proses Bisnis yang Telah Diimplementasikan Secara Elektronik	46,51 %	242.363.272	60 %	677.277.000			100 %	230.816.506	104 %	362.195.220			215	95,24	173	53,48					
1	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan e-Government	9 Layanan	127.050.000							12 Layanan	118.395.506			133	93,19							
2	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Akses Internet Perkantoran dan Publik	1 Titik	115.313.272							1 Titik	112.421.000			100	97,49							
3	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Laporan			1 Dokumen	465.297.000					1 Dokumen	332.361.880					100	71,43					
4	Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan			1 Jumlah Pusat Data Pemerintah Daerah yang Dikelola	73.676.000					1 Jumlah Pusat Data Pemerintah Daerah yang Dikelola	15.100.100					100	20,50					

Tabel 4.8
HASIL CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2017 – 2021

NO.	FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD 2016	KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD 2021	TARGET					REALISASI					CAPAIAN (%)					CAPAIAN TERHADAP RPJMD (%)	KETERANGAN (TERCAPAI/ BELUM TERCAPAI)
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
ASPEK PELAYANAN UMUM																					
II. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar																					
2.10. Komunikasi dan Informatika																					
2.10.1	Jumlah jaringan komunikasi	jaringan	57	67	59	61	63	65	67	68	79	97	97	114	115,25	129,51	153,97	149,23	170,14	144,78	
2.10.2	Rasio wartel/warnet terhadap penduduk		6	0	0	0	0	0	0	3	1	1	1	0	300	100	100	100	0	100	
2.10.3	Jumlah surat kabar nasional/lokal	jenis	54	56	54	55	55	56	56	59	59	62	58	66	109,26	107,27	112,73	103,57	100	110,71	
2.10.4	Jumlah penyiaran radio/TV lokal	jenis	9	10	9	9	10	10	10	9	2	2	2	2	100	22,22	20,00	20,00	20	20,00	RRI & Radio STAI
2.10.5	Web site perangkat daerah	web	16	40	18	20	24	32	40	18	29	32	41	44	100	145	133,33	128,13	110	80,00	
2.10.6	Sistem Informasi Manajemen Pemda	sistem	28	110	33	40	50	80	110	75	65	86	125	0	227,27	162,50	172,00	156,25	0	78,18	
2.10.7	Pameran/Expo	kali	7	7	7	7	7	7	7	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	14,29	
2.10.8	Sistem informasi Pelayanan Perijinan		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	100	100	100	100	100	100	
2.14. Statistik																					
2.14.2	Buku "kabupaten dalam angka"	Ada/tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	100	100	100	100	100	100	
2.14.3	Buku "PDRB kabupaten"	Ada/tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	100	100	100	100	100	100	
2.15. Persandian																					
2.15.1	PD yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi PD	PD	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100	100	
ASPEK DAYA SAING DAERAH																					
II. Fasilitas Wilayah/Infrastruktur																					
5. Komunikasi dan Informatika																					
5.3.	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon	%	78,68	94,03	81,75	84,82	87,89	90,96	94,03	-	58,3	67,12	67,12	95	-	68,73	76,37	73,79	101,00	71	

Tabel 4.9
PELAKSANA PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

No.	Nama Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja		Ket
			Output/Outcome	Anggaran (Rp)	
1	2	3	4	5	6
01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	NILAI LAPORAN LKJIP	81,21	Nilai	4.378.475.603
01.2.01.	Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	A/82	Nilai/ Predikat	22.882.383,00
<i>01.2.01.06</i>	<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	<i>Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD</i>	<i>2</i>	<i>laporan</i>	<i>22.882.383,00</i>
01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	Tepat Waktu	2.970.438.713,00
<i>01.2.02.01</i>	<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	<i>Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN</i>	<i>22</i>	<i>Orang</i>	<i>2.970.438.713,00</i>
01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	95	%	1.762.448,00
<i>01.2.05.11</i>	<i>Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>	<i>Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan</i>	<i>4</i>	<i>Orang</i>	<i>1.762.448,00</i>
01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Sarana dan Prasarana Administrasi Umum Perkantoran	75	%	531.828.725,00
<i>01.2.06.01</i>	<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	<i>Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan</i>	<i>1</i>	<i>Gedung</i>	<i>44.448.920,00</i>

01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4 Paket	198.035.000,00	
01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 Bulan	4.256.000,00	
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Penggandaan Kantor	58000 Lembar	16.250.000,00	
01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	15 Dokumen	800.000,00	
01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Jenis Penyediaan Bahan/Material	30 Paket	34.100.000,00	
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 laporan	233.938.805,00	
01.2.08.	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	PERSENTASE PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PENUNJANG URUSAN PERKANTORAN	80 %	752.531.838,00	
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Materai Kantor	1500 Lembar	39.649.000,00	
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan tagihan internet, air dan listrik kantor	2 Tagihan	40.000.000,00	
01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			0,00	
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Honorer/PTT	26 Orang	672.882.838,00	
01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penunjang Urusan Perkantoran	75 %	99.031.496,00	
01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	80.481.496,00	

01.2.09.09	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				0,00
01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana da Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor yang dipelihara	1	Unit	4.550.000,00
01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana da Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor yang dipelihara	7	Jenis	14.000.000,00
02.	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	JUMLAH MASYARAKAT YANG MENJADI SASARAN PENYEBARAN INFORMASI PUBLIK, MENGETAHUI KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH	4070	Orang	5.194.656.255,00
02.2.01.	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	32	Opini Publik	5.194.656.255,00
02.2.01.02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Opini Publik yang Dikelola	60	Dokumen	120.429.337,00
02.2.01.04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Konten Informasi Terkait Program dan Kebijakan Pemerintah	400	Dokumen	5.016.475.568,00
02.2.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	40	Dokumen	1.931.350,00
02.2.01.06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah OPD yang menyelenggarakan Layanan Informasi dan dokumentasi yang dapat diakses masyarakat	8	Dokumen	55.820.000,00
02.2.01.08	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Komunitas Masyarakat/Mitra strategi pemerintah daerah yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah	5	Dokumen	0,00
03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	PERSENTASE PERANGKAT DAERAH YANG MEMILIKI PORTAL DAN SITUS WEB	50	%	2.068.183.901,00
03.2.01.	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat Daerah yang Memiliki Portal dan Situs Web	2	Domain/ Subdomain	1.965.922.384 ,00

03.2.01.01	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	2	Domain/ Subdomain	139.482.000,00	
03.2.01.02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengawasan Nama Domain dan Sub domain dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna	136	Layanan/SU b Domai	136.934.936,00	
03.2.01.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang terkoneksi jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan Akses Internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	10	OPD	1.689.505.448,00	
03.2.02.	Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan SPBE yang diselenggarakan secara elektronik dan terintegrasi	56,5	%	102.261.517,00	
03.2.02.12	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan SPBE	2	Dokumen	102.261.517,00	
02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	JUMLAH DATA STATISTIK SEKTORAL YANG DIMILIKI OPD	235	Data	57.649.585,00	
02.2.01.	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	2	e-book	57.649.585,00	
02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah e-book data statistik sektoral	2	e-book	57.649.585,00	
02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	PERSENTASE KEAMANAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH	1	Regulasi	63.103.566,00	
02.2.01.	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang telah menerapkan prosedur pengamanan informasi dan persandian	5	%	63.103.566,00	
02.2.01.01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kebijakan tata kelola keamanan informasi dan jaring komunikasi sandi pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang ditetapkan	1	OPD	63.103.566,00	
TOTAL					2.023.571.969,00	

Tabel 4.9.
REKOMENDASI KEGIATAN PEMBANGUNAN TAHUN 2021/2022
DARI HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN TAHUN 2020

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	HASIL KEGIATAN PEMBANGUNAN TAHUN 2020	REKOMENDASI KEGIATAN PEMBANGUNAN TAHUN 2021/2022	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	<p>Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Pembangunan Infrastruktur e-Government</p>	<p>Perencanaan Pembangunan Infrastruktur e-Government Pemkab. Natuna Tahap I Lanjutan telah dilaksanakan pada tahun 2019, pada tahun 2020 pekerjaan Pembangunan Infrastruktur e-Government Pemkab. Natuna Tahap I Lanjutan telah dilelang, namun dikarenakan rasionalisasi anggaran sebagai dampak Covid-19, dibatalkan pelaksanaannya.</p>	<p>Penyambungan akses intranet & internet yang terintegrasi pada infrastruktur e-government untuk 2 (dua) gedung perkantoran baru di Komplek Perkantoran Bukit Arai. Sedangkan Pembangunan Infrastruktur e-Government Pemkab. Natuna Tahap I Lanjutan diusulkan kembali pada rencana program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2022.</p>	<p>Anggaran kegiatan Pembangunan Infrastruktur e-Government tahun 2020 dirasionalisasi sebagai dampak Covid-19, sedangkan tahun 2021 telah diusulkan kembali namun dikarenakan keterbatasan anggaran tidak disetujui.</p>
2	<p>Program Fasilitasi Peningkatan SDM bidang Komunikasi dan Informasi Pembinaan dan Pengembangan Kelompok Informasi Masyarakat</p>	<p>Terbentuknya Kelompok Informasi Masyarakat di Kecamatan Bunguran Utara</p>	<p>Pembinaan KIM yang belum dilaksanakan tahun 2020 dikarenakan rasionalisasi anggaran dampak Covid-19, pelaksanaan pembinaan KIM akan dilaksanakan pada tahun 2022 mengundang perwakilan KIM yang telah terbentuk di beberapa kecamatan</p>	<p>Pembentukan KIM di Kecamatan Subi tidak dilaksanakan dan pembinaan untuk perwakilan KIM yang telah terbentuk tidak dilaksanakan dikarenakan rasionalisasi anggaran sebagai dampak Covid-19.</p>
	<p>Pelatihan Pembuatan Website</p>	<p>Telah dilaksanakan pengadaan pakaian kegiatan</p>	<p>Pelaksanaan pelatihan pengelolaan website diusulkan kembali pada rencana program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2022</p>	<p>Pelaksanaan pelatihan website tidak dilaksanakan dikarenakan rasionalisasi anggaran sebagai dampak Covid-19 dan pelaksanaan pelatihan website tidak dapat dilakukan secara daring.</p>

Tabel 4.10.

**REKOMENDASI KEGIATAN PEMBANGUNAN TAHUN 2023/2024
DARI HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN TAHUN 2022**

NO	PROGRAM/KEGIATAN	HASIL KEGIATAN PEMBANGUNAN TAHUN 2022	REKOMENDASI KEGIATAN PEMBANGUNAN TAHUN 2023/2024	KETERANGAN
1	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			
	- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengelolaan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Koordinasi dan sinkronisasi penyusunan dan pengumpulan data statistic sektoral pembangunan daerah dan penggunaan data dengan metode pengumpulan data, validasi data dan sinkronisasi data dari produsen data (OPD Terkait) serta penyajiannya menerapkan website berbentuk buku elektronik (E-Book) yang telah tervalidasi dan terupdate	Penyelenggaraan statistik sektoral dilingkup daerah kabupaten/kota setelah melakukan pengumpulan dan pengelolaan dilakukan analisis untuk penyebaran informasi yang ditujukan kepada kelompok target atau individu agar memperoleh informasi, timbul kesadaran, menerima, mengubah perilaku sasaran, dan akhirnya mampu memanfaatkan informasi data statistik	Anggaran
2	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			
	- Kemitraan Dengan Pemangku Kepentingan	Terbentuknya Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) diKecamatan Subi	Pelaksanaan Pembinaan KIM yang dilaksanakan di tahun 2020	

Hasil Pelaksanaan Kegiatan RUTINITAS SKPD BERDASARKAN TUPOKSI

Keberadaan teknologi informasi dan komunikasi dewasa ini sudah menjadi hal yang sangat penting dan mendesak keberadaannya. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna memiliki cita-cita menjadikan pemerintah yang *Smart* dengan mewujudkan mulai dengan *Smart Office*, *Smart City* dan *Smart Islands*, oleh karena itu saat ini Kabupaten Natuna saat ini sedang melaksanakan proses transformasi menuju e-Government yang lebih baik. Untuk mendukung e-Government yang baik Pemerintah Kabupaten Natuna mau tidak mau harus memanfaatkan kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk meningkatkan kemampuan mengolah, mengelola, menyalurkan, dan mendistribusikan informasi dan pelayanan publik. Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Statistik dan bidang Persandian melalui tahapan demi tahapan pelaksanaan kegiatan yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika berupaya untuk mewujudkan pemanfaatan TIK dalam penyelenggaraan pemerintah.

Secara bertahap sudah mulai bekerja baik melalui pelaksanaan program dan kegiatan maupun diluar program dan kegiatan. Hal ini mengingat keterbatasan anggaran daerah (APBD) Kabupaten Natuna.

Sebagai gambaran apa yang telah dilakukan Dinas Komunikasi dan Informatika pada tahun 2023 tidak terlepas pula dari kinerja yang telah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya. Kegiatan rutinitas antara lain dijabarkan pada kegiatan Kepala Dinas, Sekretariat, Bidang Penyelenggaraan e-Government dan Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik diluar kegiatan yang tertuang pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran secara garis besar.

A. SEKRETARIAT

Salah satu aktivitas administrasi dinas adalah kegiatan surat menyurat, pada tahun 2023 terdapat 404 surat masuk dan 539 surat keluar, secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel 5.1. dan tabel 5.2. di bawah ini. Untuk proses administrasi kendala yang dihadapi adalah karena kurangnya kemampuan pegawai mengenai tata naskah dinas sehingga perlu pelatihan mengenai surat menyurat dan kearsipan. Selain itu,

data pengarsipan surat masih belum terdigitalisasi sehingga data arsip masih rentan hilang dan rusak dari bencana alam ataupun lainnya serta kerjasama antara pegawai yang menangani tata persuratan. Pengurusan kenaikan gaji berkala maupun kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil juga menjadi salah satu tugas di sub bagian umum dan kepegawaian. Ada 1 (satu) orang PNS yang naik pangkat golongan pada periode April 2023 dan Oktober 2023 (Tabel 5.3.)

Tabel 5.1
SURAT MASUK/ SURAT KELUAR

TAHUN	SURAT MASUK		SURAT KELUAR	
2023	404	Surat	539	Surat
2022	638	Surat	242	Surat
2021	503	Surat	301	Surat
2020	450	Surat	257	Surat

Sumber: Subbag. Umum dan Kepegawaian (Desember 2023)

Tabel 5.2
SK MASUK/ SK KELUAR

TAHUN	SK MASUK		SK KELUAR	
2023	20	SK	23	SK
2022	30	SK	48	SK
2021	14	SK	25	SK
2020	13	SK	26	SK

Sumber: Subbag. Umum dan Kepegawaian (Desember 2023)

Proses perencanaan dimulai dengan penyusunan rencana kerja (Renja) 2023 berdasarkan usulan dan koordinasi dari bidang, baik anggaran yang bersumber dari APBD, APBD Propinsi maupun APBN berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) 2021-2026 yang dijabarkan pada detail kegiatan.

Jumlah anggaran belanja tahun 2023 pada DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) murni sebesar Rp10.206.699,064.-00 terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp9.696.918.064,00 dan Belanja Modal sebesar Rp 509.781.000,00 , setelah perubahan pada DPPA (Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) sebesar Rp12.506.686.498,00 terdiri dari Belanja Belanja Operasi sebesar Rp12.274.186.313,00 dan Belanja Modal sebesar Rp517.781.000,00 yang terealisasi sebesar Rp 12.506.686.498,00, Sisa anggaran yang tidak terealisasi dikarenakan belanja umum yang ada tidak diajukan dan menyisakan anggaran yang telah

terpenuhi namun kegiatan yang di direncanakan dan segala belanja untuk keperluan telah terealisasi sepenuhnya.

Tabel 5.3
DAFTAR PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG NAIK PANGKAT GOLONGAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2023

NO.	NAMA	NIP	JABATAN	PANGKAT/GOL		PERIODE
				LAMA	BARU	
1	R. Putra Rupawan	19820101 200701 1 021	Pengadministrasi Kepegawaian	Pengatur Tk. I/II.d	Penata Muda/III.a	1 April 2023

Sumber: Subbag. Umum dan Kepegawaian (Desember 2023)

B. BIDANG PENYELENGGARAAN E-GOVERNMENT

Selain pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari APBD, Dinas Komunikasi dan Informatika juga mengajukan usulan Program/Kegiatan ke Kementerian Komunikasi dan Informatika Cq. Badan Akselerasi Telekomunikasi Indonesia (BAKTI), dan meminta peran aktif stakeholder (khususnya penyelenggara telekomunikasi) untuk melakukan pembangunan infrastruktur jaringan dan akses telekomunikasi di Kabupaten Natuna.

1. Sektor Telekomunikasi

Walaupun sektor telekomunikasi bukan masuk dalam urusan yang menjadi tugas Dinas Komunikasi dan Informatika namun sampai kondisi saat ini untuk urusan telekomunikasi di daerah, menjadi salah satu urusan yang ditangani oleh Bidang Penyelenggaraan e-Government.

Tabel 5.4
Rekapan Jumlah Menara OPSEL/BTS Menurut Kecamatan di
Kabupaten Natuna

Kecamatan	TOWER/ MENARA BTS / OPERATOR SELULER (OPSEL)						Jumlah
	TSEL	Indosat	XL	Smartfren	POI	Repeater	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(12)
Midai	3	1	1	-	-	-	5
Bunguran Barat	7	2	5	1	-	1	16
Serasan	6	1	2	-	-	1	10
Bunguran Timur	20	2	7	13	1	1	44
Bunguran Utara	6	-	2	-	-	-	8

Subi	2	1	1	-	-	1	5
Pulau Laut	3	2	-	-	1	1	7
Pulau Tiga	6	-	1	-	-	1	8
Bunguran Timur Laut	5	1	5	1	-	-	12
Bunguran Tengah	4	-	3	2	-	-	9
Bunguran Selatan	3	-	1	2	-	-	6
Serasan Timur	2	-	2	-	-	-	4
Bunguran Batubi	3	-	2	1	-	-	6
Pulau Tiga Barat	2	2	1	-	-	-	5
Suak Midai	4	-	-	-	-	-	4
Pulau Seluan	1	-	1	-	-	-	2
Pulau Panjang	1	-	1	-	-	-	2
Tahun 2023	78	12	35	20	2	6	153
Tahun 2022	73	12	32	20	1	5	143

Tabel 26 Data Kualitas Layanan BTS/OPSEL Menurut Kecamatan di Kabupaten Natuna

Kecamatan	Layanan				POI	Repeater	Non Aktif	Keterangan
	4G	3G	2G	G				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Midai	4	-	-	-	-	-	1	1. Indosat Reguler (di Sebelat OFF)
Bunguran Barat	12	-	-	-	-	1	2	1. Indosat Reguler OFF, 2. Repeater XL Reguler, 3. Tsel USO Bakti OFF, Propose Upgrate atau relokasi
Serasan	6	-	-	-	-	1	2	1. Indosat Reguler OFF & Repeater IPLH 2. TSEL USO Bakti OFF Propose relokasi
Bunguran Timur	40	-	-	-	1	1	-	1. Repeater XL USO BAKTI 2. POI XL USO BAKTI

Bunguran Utara	7	-	-	-	-	-	1	1. TSEI Reguler 2. TSEL USO Reguler (eks BAKTI OFF)
Subi	2	-	-	-	-	1	1	1. Indosat Reguler OFF 2. Repeater IPLH
Pulau Laut	4	-	-	-	-	1	1	1. Indosat Reguler OFF
Pulau Tiga	6	-	-	-	-	1	-	1. Repeater IPH
Bunguran Timur Laut	11	-	-	-	-	-	1	1. Indosat Reguler OFF
Bunguran Tengah	8	-	-	-	-	-	1	1. TSEI USO Bakti OFF
Bunguran Selatan	6	-	-	-	-	-	-	
Serasan Timur	3	-	-	-	-	-	-	
Bunguran Batubi	6	-	-	-	-	-	-	
Pulau Tiga Barat	4	-	-	-	-	-	1	1. Indosat Reguler OFF
Suak Midai	4	-	-	-	-	-	-	
Pulau Seluan	2	-	-	-	-	-	-	
Pulau Panjang	2	-	-	-	-	-	-	
Tahun 2023	127	0	0	0	1	6	11	
Tahun 2022	125	0	0	0	1	5	7	

BTS (Base Transceiver Station) adalah bagian yang paling krusial dan membatasi dalam sebuah sistem, sehingga sangat menentukan kapasitas dan kualitas sistem secara menyeluruh. Kapasitas dan kualitas sistem umumnya bergantung pada BTS, sehingga kekuatan utama operator terletak pada kapasitas mereka untuk menyediakan jumlah BTS yang cukup, termasuk penempatan yang efisien dan sesuai dengan karakteristik area layanan.

Ditahun 2022 Terdapat peningkatan jumlah tower/BTS sebanyak 143 dengan bertambahnya sebanyak 10 Tower/BTS, diakhir tahun 2023 berjumlah 153 tower/BTS dengan rincian penambahan Telkomsel (Reguler) 5, XL (reguler) 3, Smartfren (reguler) 1, XL USO 1, Pada tahun 2023, terdapat peningkatan kualitas sinyal menjadi 4G 127 dari yang sebelumnya sebanyak 2 Peningkatan ini berlanjut di tahun 2022 menjadi 125 layanan 4G dan tahun 2023 sebanyak 127 layanan 4G

Sedangkan untuk kualitas layanan BTS/OPSEL ada beberapa layanan yang nonaktif Tahun 2023 ini kabupaten Natuna yang sudah menerima program bantuan pembangunan tower/BTS dari Bakti Kemkominfo RI berjumlah 43 unit yang menyebar di 15 Kecamatan dan dilayani 4 operator seluler, Namun dari semua tower /BTS tersebut, 50% lebih masih menggunakan VSAT (satelit) yang dirasa kualitasnya masih sangat rendah dibanding dengan tower /BTS yang sudah menggunakan transmisi Radiolink maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna melakukan permohonan Peningkatan Tower/BTS USO Bakti Kemkominfo RI melalui solusi teresterialisasi melalui existing tower terdekat.

Untuk tahun 2023 perubahan dan peningkatan layanan BTS/Opsel lebih meniti beratkan kepada pelayanan kekuatan sinyal 4G di beberapa daerah yang terasa kurang pada sinyal jaringan dimana ad beberapa operator seluler (OPSEL) melaksanakan relokasi dan upgrade dan mendata beberapa BTS/Opsel yang aktif dimana total Tower (BTS, Repeater & POI) masih dalam kondisi aktif adalah 134, antara lain : 74 Tower TSEL, 5 Tower Indosat, 35 Tower XL dan 20 Tower Smartfren

Berikut penjabarannya :

- Dari Tower BTS dengan Opsel TSEL ada 78 : **Aktif 74** & Tidak Aktif (OFF) 44 Tower BTS yang sudah tidak aktif (OFF) antara lain :
 - 1 Tower BTS TSEL Reguler (eks USO BAKTI Kemkominfo RI) di Teluk Buton; dan
 - 3 Tower BTS TSEL USO BAKTI Kemkominfo RI, sedang dalam propose upgrade dan atau relokasi, dikarenakan sudah ada Tower BTS Reguler di lokasi (Kelurahan/Desa) yang sama. Yaitu di Kelurahan/Desa : Selaut, Tanjung Setelung dan Air Lengit
- Dari Tower BTS dengan Opsel Indosat 12 : **Aktif 5**, Tidak Aktif (OFF) 77 Tower BTS yang sudah tidak aktif (OFF) adalah milik swasta (reguler), antara lain di Kelurahan/Desa :
 - Kel. Sedanau, Kec. Bung. Barat;
 - Desa Subi, Kec. Subi;
 - Desa Limau Manis, Kec. Bung. Timur Laut;
 - Desa Kadur, Kec. Pulau Laut;
 - Kel. Serasan, Kec. Serasan;
 - Desa Tanjung Kumbik Utara, Kec. Pulau Tiga Barat.

- Desa Sebelat, Kec. Midai;

- Dari Tower BTS dengan Opsel **XL 35**, semuanya masih dalam kondisi aktif.
- Dari Tower BTS dengan Opsel **Smartfren 20**, semuanya masih dalam kondisi aktif.

Dengan Peningkatan dan pemanfaatan infrastruktur operator dengan baik dan melaksanakan pemantauan titik-titik yang terindikasi lemah dalam penerimaan sinyal diharapkan mewujudkan system pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE untuk kabupaten Natuna Semakin Baik.

Tabel 27

Desa dan Kelurahan yang dapat Mengakses Internet

Kecamatan	Kel/Desa	OPSEL				Layanan 4G	P OI	Repeat er	Keterangan
		TS EL	Ind osat	XL	Smartfr en				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Midai	Kelurahan Sabang barat	2	0	0	0	2	0	0	
	Sebelat	1	1	1	0	2	0	0	Indosat reguler OFF
	Air putih	0	0	0	0	0	0	0	
Total		3	1	1	0	4	0	0	Indosat reguler (di Sebelat) "OFF"
Bunguran Barat	Kelurahan Sedanau	3	1	3	0	6	0	0	Indosat reguler OFF
	Mekar Jaya	1	0	1	0	2	0	0	
	Binjai	1	1	1	1	3	0	1	Repeater XL regular
	Pian Tengah	1	0	0	0	1	0	0	
	Selaut	1	0	0	0	0	0	0	TSEL USO BAKTI OFF , propose upgrade dan atau relokasi
Total		7	2	5	1	12	0	1	Indosat reguler (di Kelurahan Sedanau) & Tsel USO BAKTI (di Selaut) "OFF"
Serasan	Kelurahan	2	1	0	0	1	0	1	Indosat reguler OFF

Kecamatan	Kel/Desa	OPSEL				Smartfr en	Laya nan 4G	P OI	Repeat er	Keterangan
		TS EL	Ind osat	XL						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
	Serasan								& Repeater IPLH	
	Kampung Hilir	0	0	0	0	0	0	0		
	Batu Berian	0	0	1	0	1	0	0		
	Tanjung Setelung	2	0	0	0	1	0	0	TSEL USO BAKTI OFF , propose relokasi	
	Tanjung Balau	1	0	0	0	1	0	0		
	Pangkalan Jermalik	1	0	0	0	1	0	0		
	Total	6	1	2	0	6	0	1	Indosat reguler (di Kelurahan Serasan) & TSEL USO BAKTI (di Tanjung Setelung) "OFF"	
Bunguran Batubi	Batubi Jaya	1	0	0	0	1	0	0		
	Gunung Putri	1	0	0	0	1	0	0		
	Sedarat Baru	0	0	1	1	2	0	0		
	Sedanau Timur	1	0	1	0	2	0	0		
	Semedang	0	0	0	0	0	0	0		
	Total	3	0	2	1	6	0	0		
Bunguran Timur	Kelurahan Ranai Kota	6	1	3	4	13	0	1	Repeater XL USO BAKTI	
	Kelurahan Ranai Darat	2	0	0	2	4	0	0		
	Kelurahan Bandarsya h	3	0	1	2	6	0	0		
	Kelurahan Batu Hitam	3	0	0	2	5	0	0		
	Sungai Ulu	3	1	2	1	6	1	0	POI XL USO BAKTI	
	Sepempan	2	0	1	1	4	0	0		

Kecamatan	Kel/Desa	OPSEL				Smartfr en	Laya nan 4G	P OI	Repeat er	Keterangan
		TS EL	Ind osat	XL						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
	g									
	Batu Gajah	1	0	0	1	2	0	0		
	Total	20	2	7	13	40	1	1		
Bunguran Utara	Kelarik Utara	1	0	0	0	1	0	0		
	Kelarik	1	0	1	0	2	0	0		
	Kelarik Air Mali	1	0	0	0	1	0	0		
	Teluk Buton	2	0	0	0	1	0	0	TSEL Reguler (menggunak an Tower TNI)	
	Belakang Gunung	0	0	1	0	1	0	0	TSEL USO reguler (eks BAKTI) OFF	
	Gunung Durian	1	0	0	0	1	0	0		
Total		6	0	2	0	7	0	0	TSEL Reguler "Teluk Buton" (menggunak an Tower TNI)	
									TSEL USO reguler (eks BAKTI) di Teluk Buton "OFF"	
Subi	Subi	1	1	0	0	1	0	0	Indosat reguler OFF	
	Subi besar	0	0	0	0	0	0	0		
	Meliah	1	0	1	0	1	0	1	Repeater IPLH	
	Terayak	0	0	0	0	0	0	0		
	Subi Besar Timur	0	0	0	0	0	0	0		
	Meliah Selatan	0	0	0	0	0	0	0		
Total		2	1	1	0	2	0	1	Indosat reguler (di Subi) OFF & Repeater	

Kecamatan	Kel/Desa	OPSEL				Smartfr en	Laya nan 4G	P OI	Repeat er	Keterangan
		TS EL	Ind osat	XL						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
									IPLH (di Subi Besar)	
Pulau Laut	Tanjung Pala	1	1	0	0	2	0	0		
	Air Payang	1	0	0	0	1	0	0		
	Kadur	1	1	0	0	1	0	0	Indosat reguler OFF	
Total		3	2	0	0	4	0	0	Indosat reguler (di Kadur) "OFF"	
Pulau Tiga	Sabang Mawang	2	0	0	0	1	0	1	Repeater IPLH	
	Sededap	1	0	0	0	1	0	0		
	Tanjung Batang	1	0	0	0	1	0	0		
	Serantas	1	0	0	0	1	0	0		
	Sabang Mawang Barat	1	0	0	0	1	0	0		
	Teluk Labuh	0	0	1	0	1	0	0		
Total		6	0	1	0	6	0	1	Repeater IPLH (di Sabang Mawang)	
Bunguran Timur Laut	Tanjung	1	0	0	0	1	0	0		
	Ceruk	1	0	1	1	3	0	0		
	Kelanga	1	0	1	0	2	0	0		
	Pengadah	1	0	1	0	2	0	0		
	Sebadai Hulu	1	0	0	0	1	0	0		
	Limau Manis	0	1	1	0	1	0	0	Indosat reguler OFF	
	Selemam	0	0	1	0	1	0	0		
Total		5	1	5	1	11	0	0	Indosat reguler (di Limau Manis) "OFF"	
Bunguran Tengah	Harapan Jaya	1	0	1	0	2	0	0		
	Tapau	1	0	1	1	3	0	0		
	Air Lengit	2	0	1	1	3	0	0	Tsel USO BAKTI OFF	
Total		4	0	3	2	8	0	0	Tsel USO BAKTI (di	

Kecamatan	Kel/Desa	OPSEL				Smartfr en	Laya nan 4G	P OI	Repeat er	Keterangan
		TS EL	Ind osat	XL						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
									Air Lengit "OFF"	
Bunguran Selatan	Cemaga	1	0	0	1	2	0	0		
	Cemaga Selatan	2	0	0	1	3	0	0		
	Cemaga Utara	0	0	1	0	1	0	0		
	Cemaga Tengah	0	0	0	0	0	0	0		
Total		3	0	1	2	6	0	0		
Serasan Timur	Arung Ayam	0	0	0	0	0	0	0		
	Air Nusa	0	0	1	0	1	0	0		
	Air Ringau	1	0	0	0	1	0	0		
	Payak	1	0	1	0	1	0	0		
Total		2	0	2	0	3	0	0		
Pulau Tiga Barat	Pulau Tiga	0	0	0	0	0	0	0		
	Tg. Kumbik Utara	1	1	1	0	2	0	0	Indosat reguler OFF	
	Setumuk	0	0	0	0	0	0	0		
	Selading	1	1	0	0	2	0	0		
Total		2	2	1	0	4	0	0	Indosat reguler (di Tg. Kumbik Utara) "OFF"	
Suak Midai	Air Kumpai	2	0	0	0	2	0	0		
	Batu Belanak	1	0	0	0	1	0	0		
	Gunung Jambat	1	0	0	0	1	0	0		
Total		4	0	0	0	4	0	0		
Pulau Seluan	Seluan Barat	1	0	0	0	1	0	0		
	Kelarik Barat	0	0	1	0	1	0	0		
Total		1	0	1	0	2	0	0		
Pulau Panjang	Pulau Panjang	1	0	0	0	1	0	0		
	Pulau Kerdau	0	0	1	0	1	0	0		
Total		1	0	1	0	2	0	0		
Total se Kecamatan 2023		78	12	35	20	128	1	5		
Total Se Kecamatan 2022		73	12	32	20	125	1	5		

Sumber : Bidang Penyelenggaraan e-Government (Desember 2023)

a. PD (Perangkat Daerah) terkoneksi Jaringan Intra Pemerintah Daerah

Dalam Optimalisasi Pelaksanaan layanan kepada masyarakat Dinas Komunikasi dan Informatika telah melaksanakan bentuk nyata dengan menghubungkan beberapa Gedung OPD, Kecamatan, kelurahan, puskesmas di wilayah kabupaten Natuna melalui jaringan intranet dan internet untuk peningkatan kinerja pelayanan publik.

Berikut ini adalah ringkasan perkembangan pembangunan infrastruktur e-Government di Kabupaten Natuna oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Komunikasi dan Informatika sejak tahun 2019 hingga 2023. Pada tahun 2019, telah berhasil dilakukan pemasangan infrastruktur e-Government di 19 OPD/Kantor dalam jaringan intra pemkab Natuna. Namun, pada tahun 2020, pembelanjaan infrastruktur tidak terlaksana karena adanya rasionalisasi anggaran akibat pandemi COVID-19. Meskipun demikian, dengan bantuan Diskominfo Kabupaten Natuna, 3 OPD/Kantor berhasil melakukan penyambungan jaringan secara mandiri, dan ini berlanjut dengan penambahan 4 OPD/Kantor pada tahun berikutnya. Sehingga, hingga diakhir tahun 2021, jumlah OPD/Kantor yang terhubung dalam jaringan intra pemkab Natuna mencapai 27. Pada tahun 2022, upaya penyediaan akses internet terintegrasi pada jaringan infrastruktur e-Government berlanjut, menghasilkan 20 titik akses baru, sehingga totalnya menjadi 47 OPD di lingkungan pemkab Natuna yang telah terpasang.

Optimalisasi pelayanan terhadap masyarakat melalui kegiatan penggunaan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) telah berhasil mencakup 47 Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Dua kecamatan baru, Seluan dan Pulau Panjang telah ditambahkan, meningkatkan jumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menjadi 49 namun 1 Kecamatan saja yang baru terpasang jaringan intra pemerintah. Dari jumlah tersebut, 12 OPD masih mengandalkan jaringan V-SAT, sedangkan sisanya telah terkoneksi ke jaringan intranet menggunakan infrastruktur ISP dan infrastruktur pemerintah daerah.

Ini merupakan suatu proses yang harus terus dijalankan sebagai penunjang efisiensi kerja perkantoran, terutama dalam menyediakan layanan akses internet hingga akhir tahun 2023. Ke depannya, diharapkan akan ada kelanjutan dalam hal pemeliharaan, pembelanjaan untuk akses internet, peralatan jaringan, serta melanjutkan proses pembangunan dan pengembangan infrastruktur jaringan

intranet. Hal ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan akses internet di kantor/OPD yang belum memiliki instalasi, termasuk untuk OPD yang berpindah kantor atau yang mengalami masalah dalam jaringan mereka

1. Data kualitas layanan BTS/OPSEL 15 Kecamatan di Kabupaten Natuna memiliki 130 tower dengan layanan 4G
2. Kec. bunguran timur memiliki akses data 40 ditambah dengan 1 tower POI(Point Of Interesif), 1 repeater
3. Kec. bunguran Barat, Serasan, Subi, dan Pulau Tiga memiliki penambahan 1 repeater setiap masing2 kecamatan.
4. Akses layanan tambahan yang belum diaktifkan meliputi kec. Midai 1, Bunguran barat 1, Serasan 1, Subi 1, pulau laut 1, bunguran timur laut 1, dan pulau tiga barat 1. jadi total tower yang Non Aktip berjumlah 7 tower
5. Jumlah penambahan di tahun 2021 memiliki penambahan 1 buah Tower POI di Kec. Bunguran Timur. 5 Repeater di Kec. Bunguran Barat, Serasan, Bunguran Timur, Subi, dan Pulau Laut. Serta Akses tower yang memiliki status Non Aktip berjumlah 7 buah yang berada di Kec. Midai, Bunguran Barat, Serasan, Subi, Pulau Laut, Bunguran Timur Laut, dan Pulau Tiga Barat.

2. Persandian

Selain menjalankan urusan komunikasi dan informatika, serta statistik, Diskominfo Kabupaten Natuna juga melaksanakan urusan persandian. Secara umum, urusan persandian meliputi kegiatan pengamanan atau melindungi informasi. Dalam struktur Diskominfo Kabupaten Natuna, Kegiatan Persandian berada di bawah Bidang Layanan E-Government. Salah satu wujud tugasnya yaitu implementasi tanda tangan elektronik bagi pejabat Pemerintah Kabupaten Natuna.

Dalam upaya untuk mewujudkan pelayanan yang efektif dan efisien, Pemerintah Kabupaten Natuna menerapkan tanda tangan elektronik. Pengelolaan dokumen sudah mengarah pada lesspaper bahkan menuju ke paperless. Dengan tanda tangan elektronik ini, diharapkan terjadi pemangkasan proses birokrasi, dan juga pemangkasan anggaran dalam pelayanan dokumen administrasi. Penanganan pelayanan administrasi pemerintahan kepada masyarakat harus semakin cepat, tepat, serta aman.

Ruang lingkup pekerjaan atas kegiatan yang dilaporkan ini adalah implementasi tanda tangan elektronik bagi pejabat Pemerintah Kabupaten Natuna sehingga diharapkan dapat membantu kinerja pemerintah daerah dalam

mengimplementasikan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) di Lingkungan Pemkab. Natuna.

Tabel 5.5
Indikator, Tolok Ukur dan Target Kinerja Kegiatan Penyelenggaraan Persandian Tahun Anggaran 2023

INDIKATOR	TOLOK UKUR KINERJA	TARGET KINERJA (setelah DPPA)	HASIL PENCAPAIAN TARGET KINERJA
Keluaran	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang ditetapkan	1 Regulasi	1 Regulasi
Hasil	Jumlah OPD yang telah menerapkan prosedur pengamanan informasi dan persandian	15 OPD	42 OPD

Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, pada Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023, dari target 15 OPD yang menerapkan prosedur pengamanan informasi dan persandian dalam bentuk pemanfaatan Sertifikat Elektronik untuk Tanda Tangan Elektronik, tercapai jumlah 42 atau 255,56% OPD yang menerapkan prosedur pengamanan informasi dan persandian dalam bentuk pemanfaatan Sertifikat Elektronik untuk Tanda Tangan Elektronik di lingkungan Pemkab. Natuna.

Tabel 5.6
DATA OPD YANG MENERAPKAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK UNTUK TANDA TANGAN ELEKTRONIK

NO	NAMA OPD	JUMLAH PENGGUNA
1	Sekretariat Daerah	9 Orang
2	Dinas Komunikasi dan Informatika	19 Orang
3	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PERKIM)	2 Orang
4	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	1 Orang
5	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	35 Orang
6	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	1 Orang

NO	NAMA OPD	JUMLAH PENGGUNA
7	Dinas Lingkungan Hidup	1 Orang
8	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2 Orang
9	Dinas Perhubungan	3 Orang
10	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	5 Orang
11	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP)	13 Orang
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1 Orang
13	Dinas Pariwisata	27 Orang
14	Dinas Perikanan	5 Orang
15	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB)	1 Orang
16	Dinas Sosial	1 Orang
17	Inspektorat	8 Orang
18	Sekretariat DPRD	1 Orang
19	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPD)	7 Orang
20	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM)	7 Orang
21	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP3D)	6 Orang
22	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)	24 Orang
23	Satpol PP	1 Orang
24	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR)	21 Orang
25	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD)	1 Orang
26	Dinas Kesehatan	15 Orang
27	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	9 Orang
28	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1 Orang
29	Dinas Pemuda dan Olahraga	4 Orang
30	Dinas Pemadam Kebakaran	1 Orang
31	Kecamatan Bungura Barat	2 Orang
32	Kecamatan Bunguran Batubi	1 Orang
33	Kecamatan Bunguran Selatan	1 Orang
34	Kecamatan Bunguran Timur	3 Orang
35	Kecamatan Bunguran Timur Laut	1 Orang
36	Kecamatan Bunguran Utara	4 Orang
37	Kecamatan Pulau Seluan	1 Orang
38	Kecamatan Pulau Tiga	5 Orang

NO	NAMA OPD	JUMLAH PENGGUNA
39	Kecamatan Pulau Tiga Barat	1 Orang
40	Kecamatan Serasan	6 Orang
41	Kecamatan Serasan Timur	1 Orang
42	Kecamatan Subi	1 Orang
	Total Jumlah Pengguna	259 Orang

Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, pada Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023 yang sudah dilakukan ini, dapat dinilai bahwa target daripada kegiatan yang utama terkait dengan melengkapi regulasi yang utuh dan menyeluruh sebagai payung hukum pemanfaatan Sertifikat Elektronik untuk Tanda Tangan Elektronik di lingkungan Pemkab. Natuna masih belum maksimal dan optimal tercapai.

Sekiranya di tahun 2023 dan selanjutnya, dapat segera disusun dan dibuat sebuah regulasi yang utuh dan menyeluruh, yang mencakup semua bidang pekerjaan yang dilakukan di lingkungan Pemkab. Natuna, baik dalam hal urusan administrasi umum, kepegawaian dan juga urusan administrasi keuangan. Sehingga penerapan Sertifikat Elektronik untuk Tanda Tangan Elektronik ini dapat sepenuhnya digunakan, mulai dari Pimpinan tertinggi sampai dengan Pejabat yang paling rendah.

3. Akses Internet

Sampai dengan akhir 2021, dalam mendukung berjalannya tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika, Pemerintah Pusat melalui Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Informatika berperan aktif membantu penyediaan infrastruktur dan sarana prasana komunikasi dan informasi melalui program KPU/USO.

Ada juga bantuan CSR PT. Palapa Ring Barat dan PT. Telkom berupa akses internet untuk fasilitas publik (wifi publik). Dari 77 Kelurahan/Desa, 49 Kelurahan/Desa telah ada akses internet (48 Kelurahan/Desa dari bantuan CSR PT. Palapa Ring Barat dan PT. Telkom maupun bantuan Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kemkominfo) sedangkan 1 Kelurahan yaitu Kelurahan Sedanau dari penyambungan akses internet dari Kantor Kecamatan Bunguran Barat yang disediakan Dinas Komunikasi dan Informatika sejak tahun

2018, dari 147 sekolah (SD s/d SMA), 67 sekolah telah ada akses internet sedangkan dari 15 Puskesmas di Kabupaten Natuna, 14 Puskesmas telah mendapatkan bantuan akses internet seperti yang terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 5.7
DATA AKSES INTERNET KELURAHAN/DESA, PUSKESMAS, SEKOLAHAN dan RUANG PUBLIK/PERKANTORAN

No	NAMA LOKASI	JENIS PERANGKAT / ISP			TAHUN				
		Fiber Optik (FO)	Vs at	Wireless / Radio Link	PT. TELKOM	PT. PALAPARINGBARAT	BAKTI	KOMINFO	
KECAMATAN BUNGURAN TIMUR									
1	Kelurahan/Desa	1	Kelurahan Ranai	□					2022
		2	Kelurahan Bandarsah	□			2018		
		3	Kelurahan Ranai Darat		□				2022
		4	Kelurahan Batu Hitam	□					2022
		5	Desa Sungai Ulu		□			2019	
		6	Desa Batu Gajah						
		7	Desa Sepempang	□			2018		
	Puskesmas	1	Puskesmas Bunguran Timur	□			2018		
	Sekolah (SD)	1	SDN 001	□			2018		

No	NAMA LOKASI		JENIS PERANGKAT / ISP			TAHUN			
		RANAI							
	2	SDN 002 RANAI							
	3	SDN 003 SUNGAI ULU		□				2018	
	4	SDN 004 RANAI							
	5	SDN 005 SEPEMPAN G							
	6	SDN 006 BANDARSY AH	□						2022
	7	SDN 007 RANAI DARAT							
	8	SDN 008 Batu Gajah		□				2015	
	9	SDN 009 AIR RAYA		□				2019	
	10	SDN 010 SEBAKUNG		□				2019	
	11	SDN 011 PUAK			□				2022
	12	MI DARUL ULUM RANAI	□			2018			
	13	SDN 012 RANAI							
Sekolah	1	SMP 1 BUNGURAN	□			2018			

No	NAMA LOKASI		JENIS PERANGKAT / ISP			TAHUN			
(SMP)		TIMUR							
	2	SMP 2 BUNGURAN TIMUR	□				2018		
	3	SMP 3 BUNGURAN TIMUR		□				2018	
	4	SMP NURUL JANNAH			□		2018		
	5	MTS N 2 NATUNA							
Sekolah (SMA)	1	SMAN 1 BUNGURAN TIMUR	□				2018		
	2	SMAN 2 BUNGURAN TIMUR	□				2018		
	3	SMKN 1 BUNGURAN TIMUR	□				2018		
	4	MAN 1 BUNGURAN TIMUR			□		2018		
	5	SMK YPMN			□		2018		
	6	SMK PARIWISAT A		□					2019
RUANG PUBLIK/ PERKANTO RAN	1	TAMAN PANTAI KENCANA (Gedung Jembatan)	□				2018		

No	NAMA LOKASI		JENIS PERANGKAT / ISP			TAHUN			
	2	GEDUNG TIC Ranai	□			2018			
3	GEDUNG TIC Ranai	□				2019			
4	LOBI KANTOR BUPATI, Bukit Arai	□			2018				
5	RUANG TUNGGU Pelabuhan Penagi	□			2018				
6	HALAMAN Kantor Perizinan (DPMPTSP)	□			2018				
7	ARENA PERMAINAN RAKYAT (Tugu Gasing)	□			2018				
8	Kantor Perpustakaan, Sihotang	□			2018				
9	Kantor Perpustakaan, Sihotang			□		2019			
10	RUANG TUNGGU Bandara RSA	□			2018				
11	RUANG TUNGGU Bandara	□				2018			

No	NAMA LOKASI		JENIS PERANGKAT / ISP			TAHUN			
			RSA						
	1 2	Kantor DPRD NATUNA	□				2018		
	1 3	POS POLISI Pantai Kencana (relok ke HDS Cafe)	□				2018		
Kecamatan Bunguran Timur Laut									
2	Kelurahan/Desa	1	Desa Ceruk		□			2019	
		2	Desa Tanjung						
		3	Desa Kelanga						
		4	Desa Pengadah						
		5	Desa Sebadai Hulu		□			2016	
		6	Desa Limau Manis	V			2023		
		7	Desa Selemam						
	Puskesmas	1	Puskesmas Bung. Timur Laut		□			2019	
		2	Puskesmas Bung. Timur Laut	□					2022
	Sekolah (SD)	1	SDN 001 Tanjung		□			2015	
		2	SDN 002						

No	NAMA LOKASI	JENIS PERANGKAT / ISP			TAHUN				
			KELANGA						
		3	SDN 003 PENGADAH						
		4	SDN 004 CERUK						
		5	SDN 005 LIMAU MANIS		<input type="checkbox"/>			2018	
		6	SDN 006 BUKIT LIMAN						
		7	SDN 007 Sebadai Hulu		<input type="checkbox"/>			2015	
	Sekolah (SMP)	1	SMPN 1 BUNGURAN TIMUR LAUT		<input type="checkbox"/>			2018	
		2	SMPN SATU ATAP BUNGURAN TIMUR LAUT		<input type="checkbox"/>			2019	
		3	MTs Ibnu Rusyd						
	Sekolah (SMA)	1	SMAN 1 BUNGURAN TIMUR LAUT		<input type="checkbox"/>			2018	
		2	SMK MIGAS		<input type="checkbox"/>			2019	
	KECAMATAN BUNGURAN TENGAH								
3	Kelurahan/De sa	1	Desa Harapan Jaya		<input type="checkbox"/>			2019	
		2	Desa Tapau		<input type="checkbox"/>			2019	

No	NAMA LOKASI		JENIS PERANGKAT / ISP			TAHUN			
		3	Desa Air Lengit		<input type="checkbox"/>				2019
	Puskesmas	1 Puskesmas Bung. Tengah		<input type="checkbox"/>				2018	
	Sekolah (SD)	1 SDN 001 HARAPAN JAYA		<input type="checkbox"/>				2019	
		2 SD NEGERI 002 TAPAU		<input type="checkbox"/>				2015	
		3 SDN 003 AIR LENGIT							
	Sekolah (SMP)	1 SMPN 1 BUNGURAN TENGAH		<input type="checkbox"/>				2018	
		2 MTS BABURRAH MAN		<input type="checkbox"/>				2019	
	Sekolah (SMA)	1 SMAN 1 BUNGURAN TENGAH		<input type="checkbox"/>				2018	
KECAMATAN BUNGURAN SELATAN									
4	Kelurahan/Desa	1 Desa Cemaga		<input type="checkbox"/>				2019	
		2 Desa Cemaga Utara							
		3 Desa Cemaga Selatan							
		4 Desa Cemaga							

No	NAMA LOKASI		JENIS PERANGKAT / ISP			TAHUN			
			Tengah						
	Puskesmas	1 Puskesmas Bung. Selatan		<input type="checkbox"/>				2018	
	Sekolah (SD)	1 SDN 001 CEMAGA							
		2 SDN 002 BATU BAYAN							
		3 SDN 003 SINGGANG BULAN							
		4 SDN 004 PIAN PADANG							
		5 SDN 005 SETENGAR							
		6 SDN 006 TELUK DEPEH							
	Sekolah (SMP)	1 SMPN 1 BUNGURAN SELATAN		<input type="checkbox"/>				2018	
		2 MTS DARUSSAL AM		<input type="checkbox"/>				2019	
		3 SMPN 2 SATU ATAP							
	Sekolah (SMA)	1 SMAN 1 BUNGURAN SELATAN		<input type="checkbox"/>				2019	
5	KECAMATAN BUNGURAN BARAT								

No	NAMA LOKASI		JENIS PERANGKAT / ISP			TAHUN			
	Kelurahan/Desa	1	Kelurahan Sedanau			<input type="checkbox"/>			
2		Desa Mekar Jaya		<input type="checkbox"/>				2019	
3		Desa Binjai							
4		Desa Pian Tengah		<input type="checkbox"/>				2019	
5		Desa Selaut		<input type="checkbox"/>				2019	
Puskesmas	1	Puskesmas Bung. Barat		<input type="checkbox"/>				2018	
Sekolah (SD)	1	SDN 001 SEDANAU							
	2	SDN 002 SEDANAU							
	3	SDN 003 SEDANAU							
	4	SDN 004 PIAN TENGAH							
	5	SDN 006 SEDANAU	<input type="checkbox"/>						2022
	6	SDN 007 SEDANAU							
	7	SDN 008 SEDANAU							
	8	SDN 009 BINJAI							
	9	SDN 014 SEBUTON							
	10	SDN 015 SEGERAM							

No	NAMA LOKASI		JENIS PERANGKAT / ISP			TAHUN			
	Sekolah (SMP)	1	SMPN 1 BUNGURAN BARAT		<input type="checkbox"/>				2018
2		SMP SATU ATAP PIAN TENGAH		<input type="checkbox"/>				2019	
3		MTSN 1 NATUNA							
4		MTs MIFTAHUNN AJAH		<input type="checkbox"/>				2019	
5		MTS AL AROFAH							
6		MTS MADINATUN NAJAH		<input type="checkbox"/>				2019	
7		SMPN 3 SATU ATAP							
Sekolah (SMA)	1	SMAN 1 BUNGURAN BARAT		<input type="checkbox"/>				2018	
	2	SMKN 1 BUNGURAN BARAT		<input type="checkbox"/>				2018	
	3	MAN 2 NATUNA		<input type="checkbox"/>				2019	
	4	MAS MADINATUN NAJAH BUNGURAN BARAT							
6	KECAMATAN BUNGURAN UTARA								

No	NAMA LOKASI		JENIS PERANGKAT / ISP			TAHUN		
	Kelurahan/Desa	1	Desa Kelarik Barat		<input type="checkbox"/>			
2		Desa Kelarik						
3		Desa Kelarik Utara						
4		Desa Kelarik Air Mali						
5		Desa Teluk Buton						2020
6		Desa Belakang Gunung						
7		Desa Seluan Barat		<input type="checkbox"/>				2019
8		Desa Gunung Durian		<input type="checkbox"/>				2019
Puskesmas	1	Puskes Bung. Utara		<input type="checkbox"/>				2019
Sekolah (SD)	1	SD NEGERI 001 KELARIK		<input type="checkbox"/>				2015
	2	SDN 002 KELARIK						
	3	SDN 003 KELARIK						
	4	SDN 004 SELUAN						
	5	SDN 005 TELUK BUTON						

No	NAMA LOKASI		JENIS PERANGKAT / ISP			TAHUN				
	Sekolah (SMP)	1	SMPN 1 BUNGURAN UTARA							
2		SMPN 2 BUNGURAN UTARA								
3		MTS NUR ICHAN		<input type="checkbox"/>				2019		
4		SMPN 3 SATU ATAP								
Sekolah (SMA)	1	SMAN 1 BUNGURAN UTARA		<input type="checkbox"/>				2019		
KECAMATAN BUNGURAN BATUBI										
7	Kelurahan/Desa	1	Desa Batubi Jaya							
		2	Desa Gunung Putri							
		3	Desa Sedarat Baru		<input type="checkbox"/>				2019	
		4	Desa Sedanau Timur							
		5	Desa Semedang		<input type="checkbox"/>				2019	
Puskesmas	1	Puskes Bung. Batubi		<input type="checkbox"/>				2018		
Sekolah (SD)	1	SDN 005 TANJUNG SEBAUK								
	2	SDN 010 TRANS I								

No	NAMA LOKASI		JENIS PERANGKAT / ISP			TAHUN			
		3	SDN 011 TRANS II						
	4	SDN 012 TRANS III							
	5	SDN 013 TRANS I							
	Sekolah (SMP)	1 SMPN 2 BUNGURAN BARAT		<input type="checkbox"/>				2018	
	Sekolah (SMA)	1 SMAN 2 BUNGURAN BARAT		<input type="checkbox"/>				2018	
		2 SMKN 1 BUNGURAN BATUBI		<input type="checkbox"/>				2018	
KECAMATAN PULAU TIGA									
8	Kelurahan/Desa	1 Desa Sededap		<input type="checkbox"/>				2019	
		2 Desa Sabang Mawang							
		3 Desa Tanjung Batang							
		4 Desa Serantas		<input type="checkbox"/>				2019	
		5 Desa Sabang Mawang Barat							
		6 Desa Teluk Labuh						2020	

No	NAMA LOKASI		JENIS PERANGKAT / ISP			TAHUN			
	Puskesmas	1	Puskes Pulau Tiga		<input type="checkbox"/>				2018
Sekolah (SD)	1	SDN 002 TANJUNG BATANG							
	2	SDN 003 SEDEDAP							
	3	SDN 004 BALAI							
	4	SDN 006 SERANTAS							
Sekolah (SMP)	1	SMPN 1 PULAU TIGA		<input type="checkbox"/>				2019	
	2	MTS BAKTI NATUNA							
	3	MTS AL HIDAYAH							
KECAMATAN PULAU TIGA BARAT									
9 Kelurahan/De sa	1	Desa Pulau Tiga							
	2	Desa Tanjung Kumbik Utara							
	3	Desa Setumuk							
	4	Desa Selading		<input type="checkbox"/>				2019	
Puskesmas	1	Puskes Pulau Tiga Barat		<input type="checkbox"/>				2018	

No	NAMA LOKASI		JENIS PERANGKAT / ISP			TAHUN			
	Sekolah (SD)	1	SDN 001 TANJUNG KUMBIK						
2		SDN 005 SELADING							
3		SDN 007 SETUMUK							
Sekolah (SMP)	1	SMPN 1 PULAU TIGA		<input type="checkbox"/>				2019	
Sekolah (SMA)	1	SMAN 1 PULAU TIGA		<input type="checkbox"/>				2019	
	2	MAS BAKTI NATUNA		<input type="checkbox"/>				2019	
KECAMATAN MIDAI									
Kelurahan/Desa	1	Kelurahan Sabang Barat		<input type="checkbox"/>				2018	
	2	Desa Sebelat		<input type="checkbox"/>				2019	
	3	Desa Air Putih							
Puskesmas	1	Puskes Midai		<input type="checkbox"/>				2019	
Sekolah (SD)	1	SDN 001 MIDAI							
	2	SDN 003 AIR PUTIH							
	3	SDN 004 MIDAI							
	4	SDN 005 SEBELAT							
	5	MI BUSTANUL							

No	NAMA LOKASI		JENIS PERANGKAT / ISP			TAHUN			
		ULUM							
Sekolah (SMP)	1	SMPN 1 MIDAI		<input type="checkbox"/>				2019	
	2	MTSN 3 NATUNA		<input type="checkbox"/>				2019	
Sekolah (SMA)	1	MAS Bustanul Ulum							
KECAMATAN SUAK MIDAI									
Kelurahan/Desa	1	Desa Air Kumpai		<input type="checkbox"/>				2019	
	2	Desa Batu Belanak		<input type="checkbox"/>				2019	
	3	Desa Gunung Jambat		<input type="checkbox"/>				2019	
Puskesmas	1	Puskesmas Suak Midai							
Sekolah (SD)	1	SDN 002 JAMBAT							
	2	SDN 006 GUNUNG JAMBAT							
Sekolah (SMA)	1	SMAN 1 MIDAI		<input type="checkbox"/>				2019	
KECAMATAN SERASAN									
Kelurahan/Desa	1	Kantor Kelurahan Serasan		<input type="checkbox"/>				2018	
	2	Desa Kampung		<input type="checkbox"/>				2019	

No	NAMA LOKASI		JENIS PERANGKAT / ISP			TAHUN		
		Hilir						
	3	Desa Batu Berian		<input type="checkbox"/>			2019	
	4	Desa Tanjung Setelung		<input type="checkbox"/>			2019	
	5	Desa Tanjung Balau		<input type="checkbox"/>			2019	
	6	Desa Pangkalan						
	7	Desa Jermalik		<input type="checkbox"/>			2019	
Puskesmas	1	Puskesmas Serasan		<input type="checkbox"/>			2018	
Sekolah (SD)	1	SD 001 PELIMPAK						
	2	SD 002 AIR SEKAIN						
	3	SD 003 TANJUNG BALAU						
	4	SD 004 JERMALIK						
	5	SD 005 GENTING						
	6	SD 006 BATU BERIAN						
	7	SD 007 AIR TEMIANG						

No	NAMA LOKASI		JENIS PERANGKAT / ISP			TAHUN			
	Sekolah (SMP)	1	SMPN 1 SERASAN		<input type="checkbox"/>				2019
2		MTS IBNU HAJAR		<input type="checkbox"/>				2019	
3		SMPN 2 SATU ATAP							
4		SMPN 3 SATU ATAP							
Sekolah (SMA)	1	SMAN 1 SERASAN		<input type="checkbox"/>				2019	
KECAMATAN SERASAN TIMUR									
Kelurahan/Desa	1	Desa Arung Ayam		<input type="checkbox"/>				2019	
	2	Desa Air Nusa		<input type="checkbox"/>				2019	
	3	Desa Air Ringau		<input type="checkbox"/>				2019	
	4	Desa Harapan Baru (Payak)		<input type="checkbox"/>				2019	
Puskesmas	1	Puskes Serasan Timur		<input type="checkbox"/>				2018	
Sekolah (SD)	1	SDN 001 BATU AMPAR							
	2	SDN 002 AIR NUSA		<input type="checkbox"/>				2019	
	3	SDN 003 KAMPUNG PAYAK		<input type="checkbox"/>				2019	

No	NAMA LOKASI		JENIS PERANGKAT / ISP			TAHUN				
		4	SDN 004 AIR RINGAU		<input type="checkbox"/>				2019	
	Sekolah (SMP)	1 SMPN 1 SERASAN TIMUR		<input type="checkbox"/>				2019		
	Sekolah (SMA)	1 SMAN 1 SERASAN TIMUR		<input type="checkbox"/>				2019		
KECAMATAN SUBI										
1 4	Kelurahan/Desa	1	Desa Pulau Panjang		<input type="checkbox"/>				2019	
		2	Desa Subi Besar		<input type="checkbox"/>				2019	
		3	Desa Subi		<input type="checkbox"/>				2019	
		4	Desa Meliah		<input type="checkbox"/>				2019	
		5	Desa Terayak		<input type="checkbox"/>				2019	
		6	Desa Kerdau		<input type="checkbox"/>				2019	
		7	Desa Subi Besar Timur							
		8	Desa Meliah Selatan							
	Puskesmas	1	Puskes Subi		<input type="checkbox"/>				2018	
	Sekolah (SD)	1	SDN 001 SUBI							
		2	SDN 002 SUBI							
		3	SDN 003 SUBI							
		4	SDN 004 PULAU							

No	NAMA LOKASI		JENIS PERANGKAT / ISP			TAHUN			
			PANJANG						
	5	SDN 005 PULAU PANJANG							
Sekolah (SMP)	1	SMPN 1 SUBI		<input type="checkbox"/>				2019	
	2	SMPN SATU ATAP SUBI		<input type="checkbox"/>				2019	
Sekolah (SMA)	1	SMAN 1 SUBI		<input type="checkbox"/>				2019	
KECAMATAN PULAU LAUT									
Kelurahan/Desa	1	Desa Air Payang		<input type="checkbox"/>				2019	
	2	Desa Tanjung Pala		<input type="checkbox"/>				2019	
	3	Desa Kadur		<input type="checkbox"/>				2019	
Puskesmas	1	Puskesmas Pulau Laut		<input type="checkbox"/>				2018	
Sekolah (SD)	1	SDN 001 PULAU LAUT							
	2	SDN 002 TANJUNG PALA		<input type="checkbox"/>				2019	
	3	SDN 003 KADUR		<input type="checkbox"/>				2019	
Sekolah (SMP)	1	SMPN 1 PULAU LAUT		<input type="checkbox"/>				2019	
	2	MTS AT TAQWA		<input type="checkbox"/>				2019	

No	NAMA LOKASI			JENIS PERANGKAT / ISP			TAHUN		
	Sekolah (SMA)	1	SMAN 1 PULAU LAUT		□				2019
Ruang Publik	1	Pos TNI Pulau Sekatung		□				2019	

Rekapitulasi data bantuan akses internet bagi sarana pendidikan, perkantoran maupun sarana kesehatan setiap kecamatan dapat dilihat pada tabel 5.8.

Tabel 5.8
REKAPITULASI BANTUAN AKSES INTERNET PER KECAMATAN

NO	KECAMATAN	LOKASI BANTUAN AKSES INTERNET														
		KELURAHAN / DESA			SD / MI			SMP/MTS			SMA			PUSKESMAS		
		JUMLAH	BANTUAN AKSES INTERNET		JUMLAH	BANTUAN AKSES INTERNET		JUMLAH	BANTUAN AKSES INTERNET		JUMLAH	BANTUAN AKSES INTERNET		JUMLAH	BANTUAN AKSES INTERNET	
			SUDAH	BELUM		SUDAH	BELUM		SUDAH	BELUM		SUDAH	BELUM		SUDAH	BELUM
1	2	3			4			5			6			7		
1	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR	7	6	1	13	8	5	5	4	1	6	6	0	1	1	0
2	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR LAUT	7	2	5	7	3	4	3	2	1	2	2	0	1	1	0
3	KECAMATAN BUNGURAN TENGAH	3	3	0	3	2	1	2	2	0	1	1	0	1	1	0
4	KECAMATAN BUNGURAN SELATAN	4	1	3	6	6	0	3	2	1	1	1	0	1	1	0
5	KECAMATAN BUNGURAN BARAT	5	4	1	10	1	9	7	4	3	4	3	1	1	1	0
6	KECAMATAN BUNGURAN UTARA	8	4	4	5	1	4	4	1	3	1	1	0	1	1	0
7	KECAMATAN BATUBI	5	2	3	5	0	5	1	1	0	2	2	0	1	1	0
8	KECAMATAN PULAU TIGA	6	3	3	4	0	4	3	1	2	0	0	0	1	1	0
9	KECAMATAN PULAU TIGA BARAT	4	1	3	3	0	3	1	1	0	2	2	0	1	1	0
10	KECAMATAN MIDAI	3	2	1	5	0	5	2	2	0	1	0	1	1	1	0
11	KECAMATAN SUAK MIDAI	3	3	0	2	0	2	0	0	0	1	1	0	1	0	1
12	KECAMATAN SERASAN	7	6	1	7	0	7	4	2	2	1	1	0	1	1	0
13	KECAMATAN SERASAN TIMUR	4	4	0	4	3	1	1	1	0	1	1	0	1	1	0
14	KECAMATAN SUBI	8	6	2	5	0	5	2	2	0	1	1	0	1	1	0
15	KECAMATAN PULAU LAUT	3	3	0	3	2	1	2	2	0	1	1	0	1	1	0
JUMLAH		77	50	27	82	26	56	40	27	13	25	23	2	15	14	1

Kehadiran akses internet di sekolah, desa/kelurahan dan puskesmas sangat dinantikan mengingat besarnya kebutuhan akan keberadaan akses internet tersebut dalam menunjang aktivitas kegiatan di sekolah, desa/kelurahan maupun puskesmas.

Disekolah, akses internet selain dipergunakan para siswa untuk mengenal dan belajar tentang internet juga penting bagi guru dalam melakukan kegiatan administrasi sekolah berkenaan dengan siswa-siswa dan guru itu sendiri.

Untuk desa/kelurahan, akses internet di pergunakan untuk menunjang administrasi desa. Sedangkan di Puskesmas, keberadaan internet sebagai penunjang administrasi kesehatan, dan komunikasi antara petugas kesehatan dalam rangka memberikan layanan kepada masyarakat.

C. BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

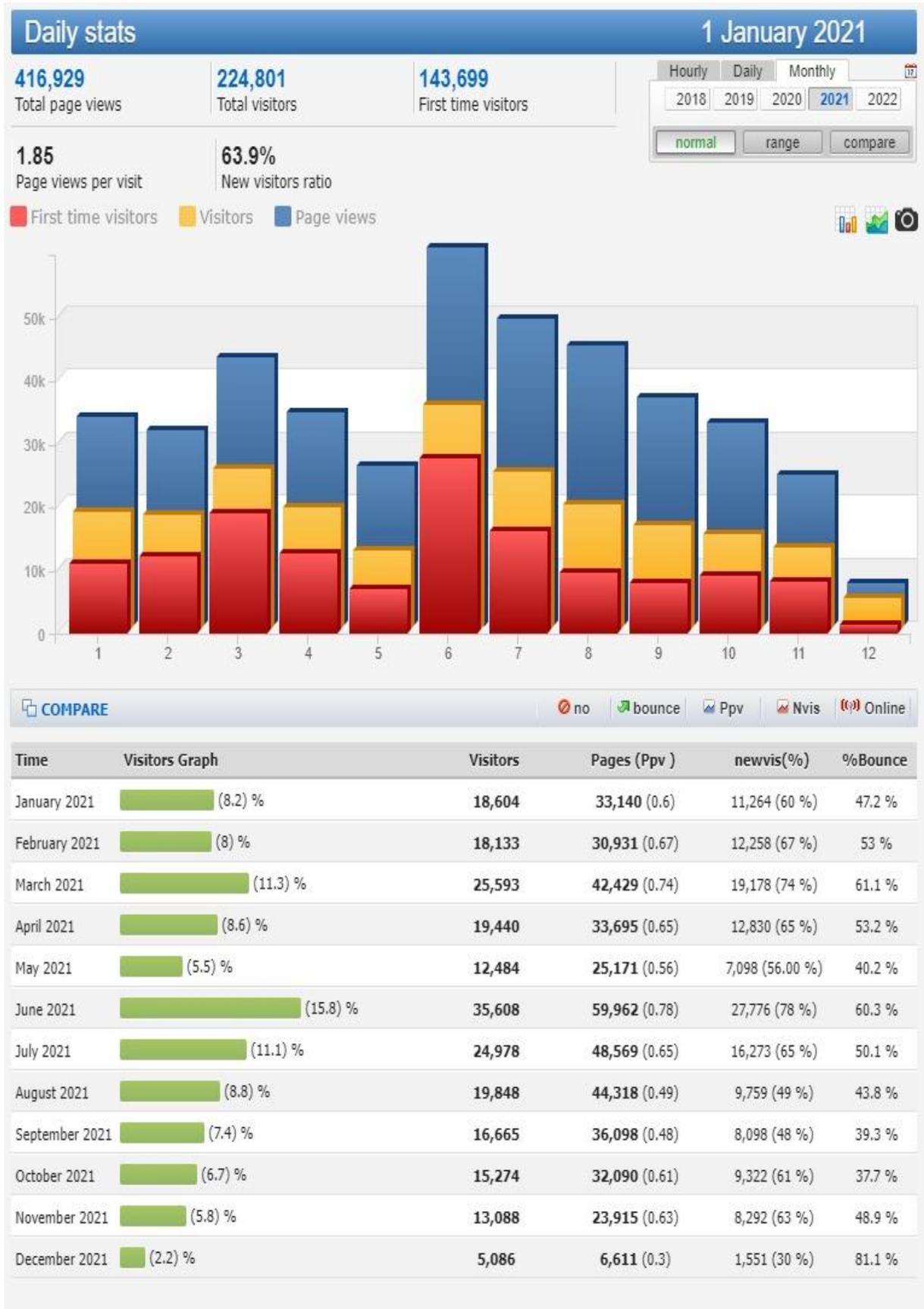
Untuk pengelolaan informasi dan komunikasi berbagai kegiatan rutinitas mulai dari penyediaan dan pengelolaan media informasi publik pemerintah daerah. Selain pengelolaan website pemkab Natuna maupun website Dinas Komunikasi dan Informatika yang telah dijelaskan pada BAB IV dalam Laporan Tahunan ini, penyebaran informasi untuk publik juga dilakukan melalui berbagai media sosial yang ada antara lain Whatsapps, Facebook, Twitter, Instagram maupun Youtube. Baik berupa berita/artikel/informasi penyelenggaraan pemerintah daerah maupun melalui info grafis serta video untuk memberikan informasi kepada masyarakat melalui medsos.

Jumlah pengunjung yang mengakses website Dinas Komunikasi dan Informatika mengalami kenaikan dari tahun 2021 sebanyak 22.128 pengunjung sedangkan di tahun 2022 sebanyak 171.270 pengunjung dengan new visitor ratio 87%. Sementara jumlah pengunjung yang mengakses website Pemkab. Natuna meningkat dari tahun 2021 sebanyak 187.254 pengunjung sedangkan di tahun 2022 sebanyak 224.801 pengunjung dengan new visitor ratio 63,9%. Pengunjung website mengalami penurunan dikarenakan pada bulan Juli-November situs website tidak dapat diakses.

Gambar 5.1.
JUMLAH KUNJUNGAN WEBSITE
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2021



Gambat 5.2
JUMLAH KUNJUNGAN WEBSITE
PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2021



Tabel 5.9**PERBANDINGAN KUNJUNGAN WEBSITE YANG DIKELOLA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2018/2023**

Website yang dikelola Diskominfo	TAHUN				
	2018	2019	2020	2021	2022
natunakab.go.id	21.444	80.134	187.254	224.801	58.130
diskominfo.natunakab.go.id	6.994	24.034	22.128	171.270	36.176

Salah satu fasilitas yang disediakan bagi pengguna website untuk menyampaikan keluhan, kritik maupun saran dengan menyiapkan form kotak saran. Tujuannya adalah sebagai sarana menjangkau kritik dan saran dari pengguna website, sebagai media komunikasi sebuah instansi atau lembaga dengan pengguna website dan sebagai bahan evaluasi untuk peningkatan mutu/kinerja pelayanan sebuah instansi atau lembaga. Cara tersebut memiliki beberapa keunggulan diantaranya lebih menghemat waktu, mudah dalam akses penggunaan, proses yang cepat sehingga instansi atau lembaga yang bersangkutan dapat merespon dalam waktu singkat. Selain kotak saran, penggunaan website www.natuna.lapor.go.id/SP4N-LAPOR merupakan wujud dari misi Kabupaten Natuna yang ke tujuh yaitu “Mengoptimalkan Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi”. Sepanjang tahun 2022 seluruh admin pengelola di lingkungan pemerintah Kabupaten Natuna telah memberikan pelayanan public kepada 40 pelapor, yang seluruhnya disampaikan melalui SP4N-LAPOR. Dari hasil pengelolaan, jumlah laporan yang masuk selama 1 Januari – 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.10
Jumlah Data SP4N Lapor dari 01 Januari s/d 31 Desember 2023

NO	OPD	KATEGORI	JUMLAH ADUAN	STATUS	
				SELES AI	DALAM PROSES
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jalan	4	2	
		Sungai		1	
		Jembatan			1
2	Dinas Pendidikan	Guru	1	1	
3	Dinas Komunikasi dan Informatika	Website	3	1	
		Jaringan		2	
4	Dinas Perhubungan	Lampu Jalan	1	1	
5	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Data	1	1	
6	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Pembebasan Tanah	1	1	
7	Dinas Kesehatan	Tenaga Kesehatan	1	1	
8	Dinas Sosial	BLT	1	1	
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Administrasi Kependudukan	1	1	
10	PLN Natuna	Jaringan Listrik	1	1	

Dengan adanya laporan yang masuk berjumlah 40 laporan bukan berarti pelayanan publik di kabupaten natuna sangat baik, melainkan sebagai evaluasi apakah masih banyak masyarakat yang belum tahu kanal pengaduan online Lapor ini. Sehingga setiap OPD diharapkan berperan serta dalam mensosialisasikan kanal lapor agar lebih dimanfaatkan masyarakat sebagai media penyaluran aspirasi dan aduan pelayanan publik. Dan diharapkan dapat meningkatkan peran serta masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Natuna.

PENUTUP

KESIMPULAN

Sebagaimana telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi masyarakat. Selain hak mendapatkan informasi, hak memperoleh pelayanan bagi masyarakat juga merupakan kewajiban bagi pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika, namun, pada Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N), Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) sebagai layanan penyampaian semua aspirasi dan pengaduan masyarakat masih sangat kurang sekali dalam menanggapi pengaduan yang diajukan oleh masyarakat. Hal ini disebabkan juga karena Jumlah OPD yang menyelenggarakan Layanan Informasi dan dokumentasi yang dapat diakses masyarakat masih dalam skala kecil.
2. Pemimpin memiliki wewenang dalam mengambil suatu tindakan jika dalam sebuah masalah kantor yang tidak bisa diselesaikan sendiri, dengan adanya hubungan kerjasama antara pemimpin dan pegawai, pemimpin bisa merembukkan masalah seperti bagaimana meningkatkan pelayanan publik agar masyarakat bisa mendapatkan layanan dan informasi yang mereka butuhkan.
3. Rencana kegiatan pembangunan yang banyak terhenti, hal ini disebabkan karena terbatasnya dana yang disediakan oleh pemerintah sehingga banyak kegiatan yang harus di pilah ulang untuk dijadikan sebagai prioritas utama, sehingga rencana yang sudah dibuat harus di tunda ditahun selanjutnya.

REKOMENDASI

1. Pelayanan informasi publik di Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) dan Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) harus lebih dipedulikan. Memberikan pelayanan yang terbaik ke publik akan informasi yang mereka butuhkan.
2. Meningkatkan koordinasi dan koneksi ke pusat untuk mencari sumber dana baru yang bisa dijadikan alternatif pelaksanaan kegiatan dan pengajuan usulan-usulan kegiatan yang bersumber dari APBN ke Kementerian Komunikasi dan Informatika dan koordinasi dengan penyelenggara telekomunikasi.
3. Untuk peningkatan akses internet OPD perlu dibangun jaringan fiber optic dalam rangka pemenuhan kebutuhan fasilitasi teknologi informasi bagi ketersediaan dan penyebaran informasi publik serta rencana penerapan aplikasi yang terintegrasi antar OPD sekaligus efisiensi anggaran belanja internet yang sebelumnya dianggarkan pada masing-masing OPD
4. Meningkatkan kualitas berita/informasi yang ditampilkan dalam website dengan selalu update berita/informasi terbaru kegiatan penyelenggaraan pemerintah Kabupaten Natuna, mengingat pada saat ini kebutuhan akan informasi dan media pengakses informasi semakin banyak dan mudah diperoleh.
5. Perlunya peningkatan kerjasama dengan Lembaga/satuan kerja/ organisasi/komunitas yang berkecimpung dalam program atau kegiatan Teknologi Informasi dan Komunikasi sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik.
6. Dengan tersusunnya Laporan Tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna ini, diharapkan dapat memberikan gambaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Natuna.



DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN NATUNA